

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

PERANG MELAWAN TERORISME

(Perang Global AS Melawan Islam)

Perang Dagang
AS-Cina

Bagaimana
Menyikapi Fatwa?

M. Ismail Yusanto:
Makar Jahat Mereka
Pasti Gagal



AGENDA UMAT



Purwakarta. Forum Mudzakah Ulama Aswaja Purwakarta menggelar buka puasa bersama para ulama se-Kabupaten Purwakarta. Acara berlangsung Ahad (27/05) di Pondok Pesantren Nurrahman al-Burhani, Purwakarta. Di dalam acara ini juga dibahas beberapa isu-isu terkini. Tampak hadir puluhan kiai, ajengan, asatidz serta muhibbin.



Ahad, 27 Mei 2018

Pamarican. Para ulama di Kota Banjar dan Ciamis mengadakan Ijtima' Ulama pada Ahad [28/5] di Pondok Pesantren Riyadlul Huda, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Ijtima' tersebut bertema, "Terorisme Bukan Ajaran Islam, Khilafah Ajaran Islam."



Bangkalan. Sabtu [26/5] tidak kurang dari 30 ulama dan masyarakat berkumpul di kediaman KHR Muhammad Halili, Blega Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Para ulama Aswaja Madura tersebut menolak teror bom yang opininya menyudutkan Islam dan kaum Muslim.



Madiun. Sekitar 175 ulama, asatidz dan masyarakat berkumpul di Pagotan, Madiun, Jawa Timur dalam sebuah Ijtima ulama dan masyarakat pada Jumat [25/5]. Tampak hadir dalam forum ini di antaranya adalah KH Anas Karim (Magetan), Kiai Bonari (Ponorogo), KH Imam Romli (Magetan), Kiai Hariyanto (Madiun), KH Nasyir al-Mahdi (Ponorogo), Kiai Misno (Ngawi) dan sejumlah ulama lain.



Jombang. Pada hari ketiga Ramadhan 1439 H, bertepatan dengan Sabtu [19/5] para ulama Wilayah Kasepuhan bertemu di rumah KH Misbah Halimi, M.Pd Jombang untuk buka puasa bersama dan mengadakan ijtima ulama dengan masyarakat. Tidak kurang dari 50 ulama berkumpul di sini. Mereka prihatin, pasca terjadinya aksi kerusuhan dan teror bom, terkesan ada "teror baru" untuk menakut-nakuti siapapun yang ingin hidup dalam Islam kaffah.



Tangerang. Sabtu [26/5], para ulama Tigaraksa dan Jambe Kab. Tangerang mengadakan Ijtima' Ulama di Majelis Bani Halimi, Jambe Pojok Kec. Jambe, Kab. Tangerang, yang diasuh oleh Al Mukarom KH Zaenul 'Arifin. Dalam acara ini, semua ulama yang hadir sepakat menolak untuk mengaitkan terorisme dengan Islam.

Daftar Isi

Makar Jahat Mereka Pasti Gagal

Bagaimanapun hebatnya makar kaum anti Islam terhadap Islam dan kaum Muslim, mereka pasti gagal. Pasti. Termasuk makar mereka dalam memerangi Islam dan kaum Muslim dengan menggunakan kedok Perang Melawan Terorisme. Allah SWT pasti membalas makar mereka. Makar Allah SWT pasti memang.

Iqtishadiyah:

19

Perang Dagang AS-Cina

Akhir-akhir ini terjadi perang dagang AS-Cina yang cukup sengit. Mengapa perang dagang antar kedua negara itu terjadi? Apa latar belakangnya? Bagaimana pula gambarnya? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian global? Itulah yang dicoba dijelaskan dalam rubrik *Iqtishadiyah* kali ini.



44

Soal-Jawab:

Bagaimana Menyikapi Fatwa?

Fatwa ulama adalah di antara yang sering dijadikan rujukan oleh kaum Muslim dalam menyikapi sejumlah persoalan keagamaan. Masalahnya, fatwa ulama tidak selalu merupakan hasil ijtihad yang sahih. Kadang banyak fatwa ulama yang malah bertentangan dengan nas-nas yang *shârih* (jelas, tegas). Jika demikian, bagaimana seharusnya kita menyikapi fatwa?

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Ketakwaan Paripurna	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Radikal?	7
<i>Fokus</i> : Di Balik Perang Melawan Terorisme dan Radikalisme	9
<i>Analisis</i> : Perang Melawan Terorisme: Agenda AS	14
<i>Iqtishadiyah</i> : Perang Dagang AS-Cina	19
<i>Afkar</i> : Melawan Terorisme Amerika	23
<i>Catatan Dakwah</i> : Dari WoT ke WoR	27
<i>Nisa</i> : Islam Meradikalisasi Perempuan?	30
<i>Fikih</i> : Hukum Syariah Seputar Operasi Kecantikan	33
<i>Lintas Dunia</i>	35

<i>Hiwar</i> : M. Ismail Yusanto: Makar Jahat Mereka Pasti Gagal	39
<i>Soal Jawab</i> : Bagaimana Menyikapi Fatwa?	44
<i>Ibrah</i> : Takwa	48
<i>Tafsir</i> : Dahsyatnya Azab Neraka	50
<i>Telaah Kitab</i> : Ketentuan Bermusyawarah; Pasal 108 Kitab Muqaddimah ad-Dustûr	55
<i>Siyasah Dakwah</i> : Pengaitan Terorisme dengan Radikalisme	58
<i>Hadis Pilihan</i> : Tanpa Pengorbanan, Umat Akan Terhinakan	62
<i>Takrifat</i> : Hadis Sahih	64
<i>Dunia Islam</i> : Konspirasi Global Dalam Perang Melawan Terorisme	67
<i>Tarikh</i> : Sikap Tegas Khalifah Kepada Keluarganya	70

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Jl.

Pancoran Barat I, No.

12B, Pancoran,

Jakarta Selatan. e-

mail: redaksialwaie

@gmail.com

Pemimpin Umum: M.

Anwari. **Pemimpin**

Perusahaan dan

Keuangan: M. Anwari

Pemimpin Redaksi:

Ibnu Faruq. **Redaktur**

Pelaksana: M. Arief

Billah. **Redaktur:** Abu

Umam, Yahya

Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 7.500,- (P.

Jawa) dan Rp.

10.000,- (Luar P.

Jawa).

Pembaca yang budiman, isu terorisme kembali mencuat. Lagi-lagi dikaitkan dengan Islam dan umatnya. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai pelaku. Singkatnya, seolah sudah menjadi terori baku: pelaku terorisme pasti umat Islam.

Belakangan terorisme dikaitkan dengan radikalisme. Radikalisme itu sendiri lekat dengan istilah syariah, jihad dan khilafah. Para pengusung ketiganya—syariah, jihad dan khilafah—lalu dituding kaum radikal. Mereka dituduh terlibat aksi-aksi terorisme. Saat tudingan tersebut tidak pernah bisa dibuktikan, seperti yang dialamatkan pada Hizbut Tahrir, mereka tetap memaksakan tuduhannya: Hizbut Tahrir mungkin tidak terlibat langsung dalam aksi-aksi terorisme, tetapi sudah pasti menginspirasi para pelakunya. Mengapa? Kata mereka, karena para pelaku terorisme mencita-citakan penegakan kembali Khilafah, sama dengan cita-cita Hizbut Tahrir.

Tudingan di atas jelas ngawur sengawur-ngawurnya. *Pertama:* Pelaku teror faktanya tidak selalu dari kalangan Muslim. Malah lebih banyak pelakunya non-Muslim. Misalnya, pelaku teror Bom Alam Sutra beberapa waktu lalu. Pelakunya Kristen. Mengapa dia tidak disebut teroris?

Kedua: Tindakan terorisme justru lebih banyak dilakukan oleh negara, bahkan dengan korban yang jauh lebih besar. Contohnya serangan brutal AS ke Irak, Afganistan atau Suriah yang telah menewaskan jutaan manusia yang tak berdosa. Demikian pula dukungan AS yang terus-menerus terhadap penjajah Israel yang telah membantai ratusan ribu rakyat Palestina. Lalu mengapa AS dan Israel tidak disebut teroris?

Ketiga: Mengaitkan terorisme dengan radikalisme terlalu dipaksakan. Apalagi definisi keduanya selama ini juga tidak jelas. Jika terorisme identik dengan kekerasan, faktanya kekerasan yang dilakukan negara terhadap bangsa lain—sebagaimana dilakukan AS dan Isarel—tidak disebut tindak terorisme. Sebaliknya, Hamas, misalnya, yang nyata-nyata hanya membela diri dari berbagai tindakan keji Israel, dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Demikian juga terkait radikalisme. Maknanya dan batasannya kabur. Jika mengusung syariah, jihad dan khilafah disebut kaum radikal, pastinya Islam dituding agama radikal. Pasalnya, syariah, jihad dan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam.

Jika demikian, seluruh narasi perang melawan terorisme dan radikalisme pada akhirnya memang perang melawan Islam dan kaum Muslim. Faktanya, perang ini memang telah menjadi agenda global AS dan Barat demi menghadang laju kebangkitan Islam dan kebangkitan kembali Khilafah.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.



KETAKWAAN PARIPURNA

Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan ibadah ramadhan kita. Kaum Muslim di seluruh dunia menunjukkan kebahagiaan dan ketaatannya kepada Allah SWT, dengan melaksanakan shalat idul fitri. Takbir, tahlil dan tahmid bergema di seluruh penjuru dunia.

Namun demikian, tentu kita tidak boleh melupakan nasib saudara-saudara kita yang masih sangat menyedihkan di berbagai negara. Di Irak dan Afghanistan, saudara-saudara kita masih berada di bawah cengkeraman negara imperialis, Amerika dan sekutunya.

Di Palestina, kaum Muslim masih dijajah. Selama puluhan tahun tanah mereka dirampas dan diduduki oleh kaum Yahudi Israel hingga kini. Sebagian penduduknya dibunuh. Sebagian lagi terusir. Mereka hidup menderita. Mereka terlunta-lunta hingga hari ini. Keadaan mereka selalu terancam. Mereka harus menghadapi kekejaman negara zionis sendirian, termasuk sepanjang bulan Ramadhan. Ironisnya, para penguasa di negeri-negeri Muslim hanya berdiam diri, seolah tak peduli.

Keadaan memilukan juga dialami saudara-saudara kita di Cina. Di negara Komunis itu, umat Islam dari suku Uighur di Xinjiang menjadi korban kebrutalan suku Han. Suku ini didukung penuh oleh rezim Komunis, Cina.

Nasib yang sama dialami saudara-saudara kita di Pattani Thailand, Moro Philipina Selatan, Kashmir, Rohingya di Myanmar, Pakistan, Banglades dan lain-lain. Semua ini kian memperpanjang daftar penderitaan umat Islam hari ini.

Adapun di dalam negeri, umat Islam terus-menerus ditekan dan disudutkan. Di antaranya melalui isu radikalisme dan terorisme yang kembali dimunculkan. Banyak ulama dikriminalisasi. Organisasi dakwahnya, seperti HTI, dibubarkan. Umatnya pun terus diawasi. Pihak-pihak yang membenci Islam berusaha dengan sekuat tenaga mengaitkan aksi terorisme dengan perjuangan dakwah menegakkan syariah Islam. Bahkan ada yang ingin membungkam dakwah Islam dengan memprovokasi penguasa agar menerapkan undang-undang represif seperti pada rezim

otoriter sebelumnya.

Perlu kita perhatikan, kemenangan hanya mungkin diraih oleh kaum Mukmin ketika benar-benar bertakwa. Shaum Ramadhan adalah salah satu sarana yang bisa mengantarkan kaum Muslim menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Itulah yang Allah SWT tegaskan: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana shaum itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa* (TQS al-Baqarah [2]: 183).

Namun demikian, agar benar-benar menjadi Mukmin yang bertakwa secara paripurna, puasa Ramadhan saja tidaklah cukup. Faktanya, selain puasa Ramadhan, Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim banyak hal agar mereka benar-benar bertakwa (*la'allakum tattaqûn*). Allah SWT, misalnya, memerintahkan kaum Muslim untuk melakukan totalitas ibadah (penghambaan/pengabdian) kepada Allah SWT. Inilah yang Allah SWT tegaskan: *Hai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa* (TQS al-Baqarah [2]: 21).

Lebih dari itu, kita harus menyadari bahwa ketakwaan harus diwujudkan tidak hanya dalam ranah individu belaka, tetapi juga harus direalisasikan pada ranah masyarakat dan negara. Inilah yang boleh disebut sebagai “ketakwaan kolektif”. Ketakwaan kolektif ini mewujudkan dalam bentuk masyarakat dan negara yang berdiri di atas akidah Islam dan yang menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya aturan kehidupan mereka. Ketakwaan kolektif ini hanya mungkin bisa diwujudkan dalam institusi negara yang menerapkan syariah Islam secara *kâffah*. Institusi negara itu tidak lain adalah Khilafah ‘*ala minhaj an-nubuwwah*. Khilafah inilah yang pernah dipraktikkan secara nyata oleh Khulafur Rasyidin *ridwânulLâh ‘alayhim* dulu.

Sayang, hari ini Khilafah dikriminalisasi. Orang atau organisasi yang mendakwahkan kewajiban menegakkan khilafah dipersekusi dengan tuduhan sepihak tanpa bukti. Padahal jelas, Khilafah adalah ajaran Islam. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya, *Ash-Shawâ'iq al-Muhriqah* (hlm. 7), kewajiban menegakkan Khilafah bahkan telah menjadi Ijmak Sahabat. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya, *Al-Mustashfâ* (1/14), Ijmak Sahabat itu tidak bisa di-*naskh* (dihapuskan/dibatalkan).

Marilah kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT agar menolong kita untuk mewujudkan cita-cita mulia ini. Dengan itu kaum Muslim merasakan kegembiraan nyata karena meraih kemenangan yang juga nyata. Inilah yang Allah SWT gambarkan dalam firman-Nya: *Pada hari (kemenangan) itu bergembiralah kaum Mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang* (TQS ar-Rum [30]: 4-5).

Hanya saja, Allah Yang Mahaadil telah menetapkan syarat bagi hamba-Nya yang ingin mendapat pertolongan-Nya. Allah SWT berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian* (TQS Muhammad [47]: 7).

Di dalam tafsirnya, *Tasyîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr al-Qur'ân al-Manân* (1/782), Abdurrahman as-Sa'di menjelaskan bahwa amal praktis ‘*menolong Allah*’ adalah dengan menegakkan sekaligus mendakwahkan agama-Nya dan berjihad melawan musuh-musuh-Nya.

Alhasil, yang dimaksud dengan ‘menolong Allah’ itu adalah dengan mempraktikkan totalitas ketakwaan kepada-Nya. Takwa inilah yang menjadi syarat bagi datangnya pertolongan Allah kepada hamba-Nya. [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Urgensi Peran Ulama

M. Arifin
Tabayyun Center

Ulama adalah *waratsatul anbiya'*. Penting bagi ulama dan umat ini membangun kembali kesadaran ideologis dan politis Islam. Tentu peran

ulama sangatlah besar. Jika ulama sukses menanamkan kesadaran ideologis dan politis Islam pada diri umat, tanpa dikomando ulama pun, umat pasti akan selalu menjatuhkan pilihannya pada Islam, partai Islam maupun syariah Islam.

Peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam. Lebih dari itu, bersama umat ulama harus berupaya menerapkan akidah dan syariah Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan (ekonomi, politik/pemerintahan, pendidikan, sosial, hukum/peradilan, politik luar negeri dll); bukan hanya dalam tataran spiritual, moral dan ritual belaka. Karena itu ulama harus selalu terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi saw. Hal itu tidak mungkin terjadi jika syariah Islam tidak diterapkan oleh negara. Negara pasti mau menerapkan syariah Islam jika ada dukungan dan dorongan kuat dari para ulama.

Ulama hendaknya menjadi pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ulama juga harus mampu menyingsingkan makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum Muslim. Dengan ungkapan lain, ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada ideologi-politik. Dengan demikian, fatwa-fatwa ulama mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum Muslim.

Di samping perlu meneladani ulama dari generasi para Sahabat Nabi saw., ulama saat ini perlu meneladani para ulama sebelum mereka. Kita, misalnya, bisa belajar dari dua ulama Ahlus-Sunnah, seperti Abu Hanifah dan Ibn Taimiyyah. Sejarah tidak pernah melupakan kedua sosok ulama mulia ini. Sebagaimana diketahui, kaum Muslim mampu bangkit dari keterpurukan selama sekitar 50 tahun. Akhirnya, di bawah pimpinan Sultan Shalahuddin al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem setelah dikuasai Pasukan Salib selama 88 tahun. Menurut Dr. Irsan al-Kilani dalam bukunya, *Hakadza Zhahara Jilu Shalahuddin wa Hakadza Adat al-Quds*, Shalahudin bukanlah pemain tunggal yang 'turun dari langit' dalam mengangkat keterpurukan umat Islam. Ia adalah produk dan bagian sebuah generasi baru yang telah dipersiapkan oleh para ulama yang hebat.

Dalam lingkup nasional, sejarah juga tidak bisa melupakan peran ulama. Peristiwa 10 November 1945, misalnya, jelas tidak bisa dilepaskan dari peran KH Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Bung Tomo saat itu segera datang berkonsultasi pada KH Hasyim Asy'ari

guna meminta restu bagi dimulainya perlawanan terhadap tentara Inggris.

Alhasil, ulama maupun umat harus kembali menyadari bahwa 'kekalahan politik' Islam yang terus-menerus terjadi dan keterpurukan umat ini tidak terlepas dari kelalaian kita untuk terus berjuang menegakkan syariah Islam. Ulama harus terus istiqamah membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat. Mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa. []

Kapan Mandiri Kelola Kekayaan Rakyat!

Yuli Sarwanto
(Dir. FAKTA)



pengelolaan SDA Indonesia saat ini amat memperhatikan. Kita menyaksikan bagaimana tambang emas di Grasberg Papua dikeruk oleh perusahaan raksasa Amerika tanpa

mempedulikan aspek lingkungan maupun lahan. Pasalnya asas yang dipakai oleh sistem Kapitalisme adalah kemaslahatan besar (benefit profit). Studi kasus PT Freeport di Papua menunjukkan fakta bahwa pengelolaan SDA dalam sistem Kapitalisme sangat merusak lingkungan. Hampir seluruh proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan pengeboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan dan penggerusan batuan bijih.

Pemerintah Indonesia banyak membuat berbagai kebijakan yang bisa dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan liberalisasi. Pemerintah mengundang para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Liberalisasi investasi jelas membuka masuknya investor asing di Indonesia. Keran investasi sampai saat ini makin dibuka lebar di era reformasi. Mirisnya, kondisi rakyat negeri ini tak banyak berubah meski rezim senantiasa berganti. Kondisi rakyat Indonesia kebanyakan hidup dalam bayang-bayang disintegrasi, kemiskinan, dan kriminalitas yang kian tajam dan meningkat. Padahal potensi SDA Indonesia yang luar biasa itu seharusnya berdampak positif bagi bangsa Indonesia.

Sayang, meski rezim terus berganti, sistem yang ada masih sistem lama, hanya 'dipermaak' dengan berbagai kepalsuan. Itulah demokrasi. SDA Indonesia sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Penguasaan asing atas SDA rakyat justru memperoleh 'pembenaran', legalitas dan perlindungan dari berbagai payung hukum, yakni UU yang bernafas liberal. Akibatnya, banyak kebijakan yang dihasilkan bukan menguntungkan rakyat, tetapi justru membuntungkan rakyat.

Indonesia memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Secara geopolitik berada pada pertarungan pengaruh ideologi kapitalisme dan sosialisme. Dilihat dari geoekonomi, yaitu telaah faktor-faktor spasial permukaan bumi sebagai pertimbangan ekonomi, kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Hutan, minyak bumi, batubara, gas alam, sumberdaya laut, dan tambang emas menjadi gambaran kekayaan yang ada di bumi Indonesia. Keadaan seperti ini tentu menjadikan Indonesia dilirik oleh banyak negara.

Adanya sumberdaya alam yang sangat melimpah dan beraneka ragam tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat masih menjerit ketika BBM naik. Akses lapangan kerja semakin sulit. Pendidikan semakin mahal. Ini terjadi karena yang diterapkan adalah neoliberalisme yang membebaskan pihak swasta asing maupun dalam negeri mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dengan dalih penanaman modal, pihak swasta bisa memiliki keluasaan dalam mengelola kekayaan alam hingga pada kebijakan penentuan harga dan distribusi. Akhirnya, peran Pemerintah tidak lebih hanya sebagai penjual dan rakyatnya sebagai pembeli.

Masalah ini harus segera dicari solusinya. Negaralah yang harusnya mengatur semua kekayaan alam dan mengembalikan dalam bentuk kemaslahatan umat. Rasulullah saw. bersabda, "*Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api.*" (HR Ibnu Majah). []



Muhammad Rahmat Kurnia

RADIKAL?

Radikal. Kata ini tiba-tiba menyeruak menjadi perbincangan banyak kalangan masyarakat. Tentu, dengan konotasi negatif. Bila kita membuka-buka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di sana terdapat makna-makna radikal, yakni (1) secara mendasar (sampai pada hal yang prinsip), misalnya dalam frase 'perubahan yang radikal'; (2) amat keras menuntut perubahan (undang-undang pemerintahan); (3) maju dalam berpikir atau bertindak.

Bila demikian, makna radikal itu bisa positif atau negatif. Bergantung pada sudut pandang yang digunakan.

Sebut saja pandangan Bung Karno. Dalam buku bertajuk "Mentjapai Indonesia Merdeka" (Maret 1933), beliau menulis bahwa untuk menuju Indonesia merdeka harus dipimpin oleh sebuah partai pelopor. Apa unsur-unsur penopangnya? "*Di antara obor-obornja pelbagai partai jang masing-masing mengaku mau menjuluhi perjalanannya, massa lantas melihat hanya satu obor jang terbesar njalanja dan terterang sinarnja, satu obor jang terkemuka djalanja, ja'ni obornja kita punya partai, obornja kita punya radikalisme!*" tulisnya.

Jelas, makna radikal di sana bermakna bagus. Perubahan yang sifatnya mendasar menuju ke arah kebaikan. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan beliau bahwa konstruktivisme yang beliau maksud bukanlah konstruktivisme kaum reformis yang warung-warungan dan kedai-kedai, tetapi konstruktivismenya radikalisme, yang bersifat *radical dynamisch* membongkar tiap batu-alas gedung stelsel imperialisme-

kapitalisme. Gerakan radikal ini ditujukan untuk membongkar imperialisme-kapitalisme. Tentu bermakna positif.

Pada tahun 1918 didirikan Radicale Concentratie, artinya gabungan perkumpulan yang sifatnya radikal. Anggotanya terdiri atas Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Insulinde dan Indische Sociaal Demokratische Vereeniging (ISDV). Kemudian diajukan tuntutan-tuntutan kepada Pemerintah Belanda. Masyarakat kala itu memandang perkumpulan radikal tersebut baik. Mereka memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.

Pada saat ini terdapat gerakan-gerakan Islam yang melawan neoimperialisme dan liberalisme-kapitalisme. Mereka melihat zamrut khatulistiwa ini sudah terpapar neoimperialisme dan liberalisme-kapitalisme. Data-data tersaji dalam berbagai publikasi, betapa negeri Muslim terbesar ini dikuasai oleh pihak asing. Lalu mereka melakukan perlawanan untuk 'memerdekakan' negerinya dari penjajahan gaya baru tersebut. Sebagai solusinya, ditawarkanlah syariah Islam. Persoalannya, mengapa mereka itu dicap sebagai radikal dalam makna yang negatif. Tak heran bila bertebaran meme-meme bernada perlawanan.

Sebenarnya pemberian stigma itu bukan hal baru. Dulu, *The New York Times*, edisi 20 November 1945 memiliki *headline* 'Moslem Fanatics Fight in Surabaya'. Para pejuang yang mengusir penjajah pimpinan Bung Tomo itu dicap sebagai 'Moslem Fanatics'. Padahal perjuangan mereka dasarnya *jihad fi sabilillah*. Teriakannya pun berupa kalimat takbir: Allahu Akbar! Pada saat rakyat menyanyunkannya sebagai pejuang,

justro kaum penjajah kala itu menamainya dengan cap negatif ‘Moslem Fanatics’. Bahkan, seingat saya, hingga tahun 1985-an stigma Muslim fanatik ini sering kali disematkan kepada orang yang berpegang teguh pada Islam. Remaja putri yang mengenakan jilbab kala itu sering mendapatkan tuduhan Muslim fanatik. “Jangan fanatiklah..!” Ucapan itu sering terdengar.

Penanaman makna negatif terhadap istilah *radikal* ini makin menemukan momentumnya. Katakan saja, pada tahun 2011, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saut Usman Nasution menyatakan terdapat 19 pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan doktrin bermuatan radikalisme (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160203201841-20-108711/bnpt-19-pondok-pesantren-terindikasi-ajarkan-radikalisme>).

“Apakah (indikasi itu) sudah valid betul, apakah masih ada penambahan atau pengurangan? Karena di Indonesia ini umat beragama menjalankan ibadah bermacam-macam. Ada yang punya pemahaman itu (radikal) masih wajar-wajar. Ada yang punya pemahaman ini sangat luar biasa,” ujar Saut di Jakarta.

Ia melanjutkan, “Tapi intinya, kami melihat 19 (pondok pesantren) ini sudah ada keterlibatan (dengan gerakan radikal), apakah dosennya, pengajarnya, atau termasuk santrinya yang ada dalam kelompok radikalisme yang selama ini diproses hukumnya di Indonesia. Itu kriteria kami.”

Pondok pesantren itu pun bercap radikal.

Tidak mengherankan beberapa waktu lalu ada video tentang seorang santri yang viral di dunia maya. Santri itu akan pulang ke rumah dari pondoknya dengan membawa kardus. Di jalan ditodong senjata oleh pihak Keamanan. Dia diduga membawa bom di dalam dus. Ternyata, isinya pakaian. Hal ini mengisyaratkan hal negatif apa yang ada di benak mereka tentang seorang santri. Sangat menyedihkan bila hal ini terus terjadi. Orangtua akan takut menyekolahkan anaknya di pesantren.

Hal ini juga terkena pada kampus. Direktur

Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamli mengatakan hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar paham radikalisme. “PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua (paham radikalisme). Dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi,” kata Hamli dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525210629-12-301431/bnpt-kedokteran-dan-eksakta-di-7-ptn-terpapar-radikalisme>).

Cap negatif itu dilekatkan pada beberapa kampus. Wajar bila pihak kampus meminta penjelasan apa indikator suatu kampus disebut radikal. “Mau menyuruh anak saya mondok di pesantren takut radikal. Mau saya suruh kuliah khawatir jadi radikal. Bingung aku ...,” keluh Mas Dendy.

Eh, tak berhenti sampai di situ. Masjid juga dikabarkan sudah terpapar paham radikal. Ayzumardi mengatakan, dalam salah satu survei yang dilakukan terdapat sekitar 40 masjid di wilayah DKI yang memberikan ceramah mendekati radikalisme (6/6/2018). Gubernur Anies Baswedan menaggapinya dengan santai, “Ya, yang *ngomong* suruh *nunjukin*”, maksudnya masjid yang mana.

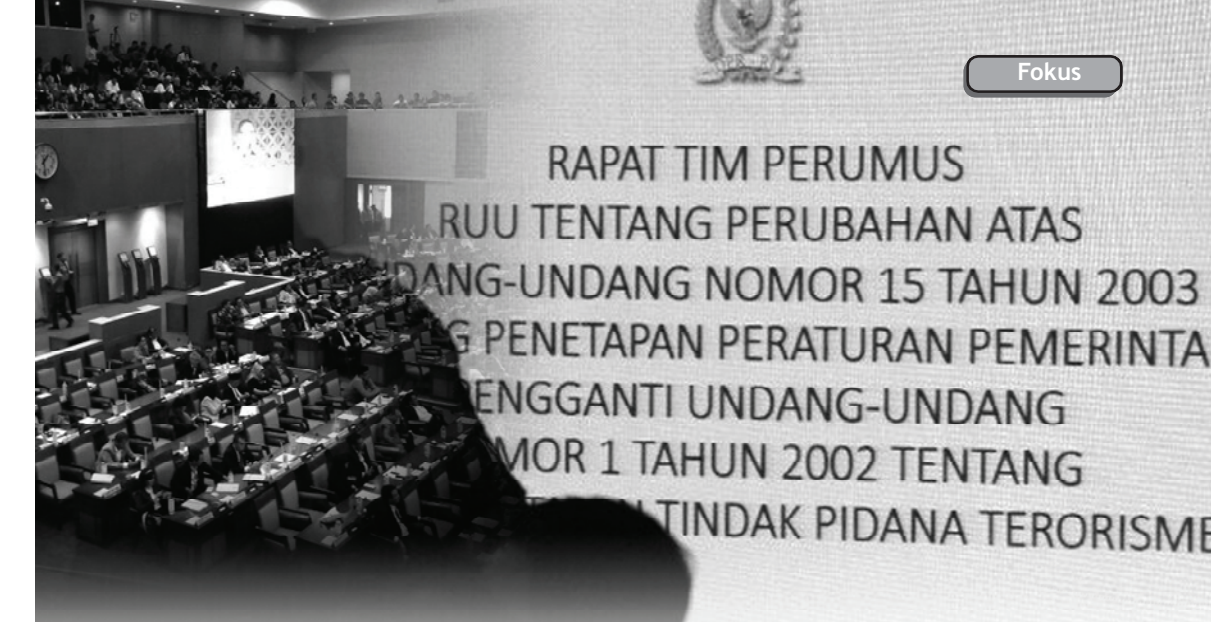
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan membenarkan ada masjid atau rumah ibadah dan pondok pesantren yang terindikasi terpapar paham radikal (6/6/2018).

Jangan sampai stigma ini mewujudkan menjadi ‘teror’ bagi orangtua. Merasa takut ketika anaknya rajin ngaji. Khawatir ketika anaknya mulai mengenakan jilbab. Galau saat anaknya rajin ke masjid. Takut kena paham radikal.

Bila dulu ketika tuduhan fundamentalis marak dijadikan cap negatif, Tokoh Islam Ahmad Sumargono *almarhum* justru berkata dengan lantang, “*Yes, I am a Fundamentalist.*”

Kini, hanya muncul sebuah meme: “Kami generasi radikal (ramah, terdidik, dan berakal)”.

□



RAPAT TIM PERUMUS RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

DI BALIK PERANG MELAWAN TERORISME DAN RADIKALISME

Babak baru perang melawan terorisme dan radikalisme dimulai oleh Pemerintah setelah tanggal 25 Mei lalu DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Terorisme. Pemerintah merasa perlu untuk segera meloloskan revisi UU Terorisme pasca kerusuhan di Mako Brimob Depok dan ledakan bom di sejumlah kota di Tanah Air pada bulan Mei lalu. Bahkan Presiden RI Jokowi menegaskan akan mengeluarkan Perppu soal terorisme bila DPR tak segera ketok palu untuk revisi UU Terorisme. Akhirnya, pengesahan revisi UU itu berjalan mulus meski hanya dihadiri 99 orang dari 560 anggota dewan.

DPR yang mengesahkan Undang-Undang Terorisme ini berjanji bila konten dalam undang-undang ini lebih baik dan melindungi kepentingan publik. Dalam revisi Undang-Undang ini setidaknya ada 15 poin yang direvisi dalam UU Terorisme. Ke-15 poin itu termaktub dalam 5 bab baru di UU Terorisme, yakni bab terkait pencegahan, bab terkait korban aksi terorisme, bab kelembagaan, bab pengawasan dan peran TNI. Khusus terkait

pencegahan, ada empat pasal baru yang ditambahkan, yakni pasal 43A, 43B, 43C dan 43D.

Selain ada hukuman yang lebih berat kepada teroris yang mempergunakan anak-anak, juga diyakini lebih 'tajam' karena menggunakan sistem relasi untuk menjerat jaringan teroris. Misalnya disebutkan bahwa seseorang bisa dijerat terlibat melakukan aksi terorisme bila "Memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja menghasut untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan." Para pelaku terorisme juga diancam akan dicabut kewarganegaraannya.

DPR juga meyakini bila revisi ini lebih baik karena ada tim pengawas yang berperan untuk mengevaluasi bila terjadi *abuse of power* dalam penindakan aksi terorisme. Selain itu juga dihilangkan pasal 'Guantanamo', yakni penahanan terduga terorisme di tempat yang tidak diketahui publik.

Spirit Islamophobia?

Apakah pengesahan UU Terorisme bisa

lepas dari spirit islamphobia yang akan berdampak pada pendiskreditan terhadap agenda dakwah Islam bahkan ajaran Islam? Tampaknya pandangan itu justru akan terus menjadi *mindset* penindasan teroris di Tanah Air, bahwa terorisme itu berakar dari radikalisme Islam. Hal itu bisa disimak dari berbagai pernyataan eksekutif negara, sebagian legislatif dan aparat penegak hukum khususnya BNPT yang berulang menegaskan hal demikian.

Radikalisme yang dimaksud juga mengalami perluasan, bukan sekadar ditujukan pada aliran jihadis dan takfiri (sikap mengkafirkan pemerintah dan orang lain). Radikalisme juga mulai diarahkan pada kelompok Islam yang dipandang punya sikap intoleran—seperti menolak pemimpin kafir, menolak aliran seperti Ahmadiyah—ditambahkan lagi kelompok yang memperjuangkan syariat Islam dan Khilafah. Abdullah Daraz dari Maarif Institute menyatakan bahwa jihad bukan satu-satunya terminologi yang suka disalahtafsirkan oleh kaum radikal, tetapi juga kata *khilafah* yang menimbulkan fanatisme buta (*Bbc.com*, 17/05/2018).

Hal senada juga dilontarkan Setara Institute, “Terorisme itu bertingkat. Tidak serta-merta seseorang jadi teroris. Tangga pertama adalah intoleransi,” ujar Direktur Riset Setara Institute Halili dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (*Kompas.com*, 19/5/2018).

Pernyataan-pernyataan serupa banyak dilontarkan sejumlah kalangan, khususnya dari kalangan Pemerintah, aparat keamanan khususnya BNPT, tokoh-tokoh LSM dan media massa *mainstream*. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran tembak perang melawan terorisme tetap kelompok Islam.

Ini tidaklah mengejutkan. Pemantik awal perang melawan terorisme di Tanah Air memang Bom Bali pada tahun 2002. Namun, secara global *War On Terrorism* (WOT) adalah arahan AS pasca serangan menara kembar

WTC 11 September 2001. Publik tidak akan lupa bagaimana pidato Presiden AS George Bush senior yang terkenal dengan frase “*you’re either with us or againts us* (bersama kami atau melawan kami)”. Ini menunjukkan, di tangan AS-lah komando perang melawan terorisme.

Kelompok masyarakat yang menjadi target serangan WOT adalah umat Muslim. Di AS sendiri, dengan payung hukum Patriot Act, Pemerintah AS memata-matai warganya sendiri, khususnya melakukan pengawasan ketat dan mengirim intel ke kantong-kantong warga Muslim di AS seperti mesjid dan Islamic Centre.

Bukti bahwa AS menjadikan kelompok Islam sebagai sasaran operasi memerangi terorisme adalah operasi militer AS ke Afganistan pada 7 Oktober 2001. Afganistan dituding menjadi markas al-Qaeda dan melindungi pimpinannya saat itu, Osama bin Laden. Operasi militer AS bersama pasukan koalisi berlanjut ke Irak pada 20 Maret 2003. Tujuannya untuk menjatuhkan Saddam Husain yang dituduh memiliki senjata kimia pemusnah massal.

Faktor lain yang menguatkan agenda operasi melawan terorisme dan radikalisme Islam adalah rangkaian peristiwa menjelang dan setelah Pilkada DKI lalu. Untuk pertama kali di negeri ini, jutaan Muslim bersatu dalam Aksi 411 dan 212. Aksi massa itu menolak pemimpin kafir dan menuntut hukum atas penistaan agama yang dilakukan Gubernur petahana DKI Basuki Tjahja Purnama. Aksi besar ini berujung pada kalahnya Basuki atau Ahok meski saat itu kubu Ahok disokong penguasa, aparat dan sejumlah konglomerat. Peristiwa ini dipandang sebagian orang sebagai ancaman terhadap demokrasi-sekularisme.

Setelah itu isu ancaman radikalisme Islam semakin kencang ditiupkan. Kubu Ahok menuding kelompok radikal seperti HTI dan FPI berada di balik kekalahan Ahok. Isu intoleransi, anti-Pancasila, anti kebhinekaan, SARA, radikalisme, terus digaungkan. Tujuannya agar

publik mengasosiasikan semangat politik Islam dengan ancaman terhadap negara.

Sebelum pengesahan Undang-Undang Terorisme, Pemerintah berkali-kali menyatakan perang terhadap apa yang mereka sebut radikalisme Islam. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mengajarkan sikap intoleran dan menyuarakan kewajiban penerapan syariah Islam dan Khilafah Islam.

Sebagai respon, Majelis Ulama Indonesia mengingatkan Pemerintah agar tidak mengaitkan aksi terorisme dengan Islam. Sekjen MUI, Anwar Abbas, dalam pernyataannya mendesak Kepolisian dan juga media tidak buru-buru mengaitkan kasus radikalisme dan terorisme dengan agama Islam. “Kami berharap kepada pihak Kepolisian dan media dalam menangani dan menghadapi masalah, terutama yang terkait dengan masalah kriminal, radikalisme dan terorisme, agar jangan cepat-cepat mengaitkan para pelakunya dengan agama Islam meskipun mereka beragama Islam,” ungkapnya.

Menurut Anwar, hal itu mestinya tidaklah sulit untuk dilakukan. “Karena saya lihat pihak Kepolisian dan media juga bisa tidak mengaitkan masalah yang ditimbulkan oleh orang Kristen, misalnya, dengan agama Kristen, atau oleh orang Hindu dengan agama Hindu yang dianut oleh pelakunya.”

Selama ini, hampir di seluruh dunia, terutama di Barat, aksi terorisme selalu dikaitkan dengan Islam dan tidak pernah dengan agama lain atau ras kulit putih. Di AS, beberapa kali terjadi penembakkan massa yang dilakukan oleh warga kulit putih. Pemerintah AS, juga media massa di Amerika, tidak pernah melabeli pelaku dengan sebutan ‘teroris’, hanya disebut *gunman*.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sudah berkali-kali menakut-nakuti warga, menculik, bahkan membunuh warga dan aparat, juga tak pernah dikategorikan sebagai

kelompok teroris. Juga tak pernah disebut agama mereka, Kristen. Aparat dan media massa *mainstream* nasional seolah sepakat menyebut mereka sebagai ‘kelompok bersenjata’. Persis dengan gaya Pemerintah AS dan media massa di sana. Padahal bila ditilik dari UU Terorisme, aksi yang dilakukan OPM harusnya masuk kategori terorisme karena telah jelas mengganggu keamanan publik dan bermotif politik, yakni separatisme.

Alhasil, perang melawan terorisme dan radikalisme jelas ditujukan kepada kalangan Islam.

Perppu dan UU Terorisme

Berbagai langkah mulai disusun untuk melancarkan agenda perang melawan terorisme dan radikalisme. *Pertama*, mengesahkan UU Terorisme, UU Ormas dan penindakan terhadap kelompok Islam radikal. Langkah awal memerangi gerakan Islam radikal adalah mencabut Badan Hukum Publik (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia. Ironinya, pencabutan BHP milik HTI dilakukan dengan mengeluarkan Perpu Ormas, yang menabrak sejumlah aturan administrasi. Tudingan yang dilontarkan, HTI mengusung ideologi Khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

Setelah itu semua instansi Pemerintah mulai melakukan penyisiran terhadap PNS maupun tenaga kerja honorer yang terindikasi mengusung Islam radikal, khususnya yang berafiliasi kepada HTI. Kampus-kampus negeri maupun swasta mulai membersihkan dosen dan guru besar yang dituduh terlibat. Ada yang diberi peringatan sampai diberhentikan sementara. Sejumlah kampus negeri juga mengancam akan memberhentikan mahasiswanya yang terlibat dalam gerakan Islam radikal.

Sebagai bagian dari melawan radikalisme, pada bulan Ramadhan ini, Pemerintah melalui Kemenag merilis nama 200 mubalig yang

direkomendasikan oleh Pemerintah untuk menjadi narasumber bagi masyarakat. Rilis nama ini dilakukan agar publik membatasi ruang gerak para mubalig yang dicurigai kerap mengajarkan ‘radikalisme Islam’. Ironinya, dalam daftar nama itu tercantum sejumlah nama yang sudah dikenal sebagai bagian jaringan Islam Liberal.

Taktik Belah-Bambu

Langkah *kedua* yang dilakukan Pemerintah untuk memerangi radikalisme adalah melakukan operasi belah-bambu. Pemerintah menggelar karpet merah untuk kelompok Islam moderat dan liberal sambil mendiskreditkan tokoh-tokoh dan kelompok yang dikategorikan sebagai pendukung radikalisme Islam. Kelompok Islam moderat dan liberal juga menjadi media darling untuk sejumlah media massa *mainstream*. Mereka selalu mendapat tempat untuk menjadi narasumber.

Sejumlah kegiatan pengajian yang dilakukan oleh para mubalig yang dianggap pro radikalisme berulang dijegal. Ada yang dipersekusi oleh segelintir massa dari ormas tertentu. Ada juga yang dilarang sampai dibubarkan oleh aparat keamanan. Dalihnya, pembicaraanya berasal dari kalangan anti-NKRI dan anti-Pancasila. Menghadapi aksi persekusi semacam itu, aparat bersikap ambigu. Ada kesan pembiaran. Bahkan dalam sejumlah agenda tablig, dengan dalih menjaga keamanan, aparat malah ikut membubarkan ketimbang mengamankan pelaku persekusi.

Rilis nama 200 mubalig yang dikeluarkan oleh Kemenag juga menandakan *like and dislike* Pemerintah terhadap sebagian mubalig. Publik mempertanyakan kriteria yang digunakan Kemenag serta ormas Islam serta tokoh Islam mana yang memberikan rekomendasi tersebut. Pasalnya, nama-nama mubalig yang disukai publik serta memiliki kapasitas dan kredibilitas keilmuan justru tidak disertakan dalam daftar

mubalig versi Kemenag. Lagi-lagi Pemerintah memeragakan kebijakan yang berpotensi menjadi belah-bambu terhadap umat.

Kriminalisasi Ajaran Islam

Perang terhadap radikalisme bukan hanya ditujukan kepada person atau kelompok tertentu. Perang ini juga dilakukan terhadap sejumlah ajaran Islam. Taktik yang dilakukan adalah menciptakan kriminalisasi dan monsterisasi terhadap syariah Islam, jihad dan khilafah. Sudah sejak lama Barat mendiskreditkan jihad sebagai pemicu terorisme. Apalagi kemudian media massa Barat kerap mem-*blow up* aksi pengeboman yang terjadi sebagai aksi jihad kelompok ekstrem. Aparat dan media massa juga kerap menyebut pelaku aksi pengeboman itu sebagai kaum jihadis untuk mengaburkan makna jihad yang sesungguhnya. Padahal hukum fikih tentang jihad berbeda dengan aksi pengeboman. Hanya saja, fakta hukum yang benar tidak pernah disampaikan kepada publik. Hal ini menguatkan citra bahwa jihad adalah ajaran yang kejam dalam syariah Islam. Untuk selanjutnya terjadi pembelokan makna jihad dari pengertian sebenarnya ke makna lain, seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad ekonomi, dsb.

Barat juga mulai melakukan kriminalisasi dan monsterisasi terhadap ajaran kekhilafahan. Bukan saja dengan memanipulasi opini tentang hukum khilafah, Barat—dalam hal ini AS—diduga kuat membidani kelahiran ISIS. Dalam video wawancara dengan reporter *Fox News*, Hillary Clinton menyebut bahwa AS memiliki kepentingan sangat besar di Asia Tengah, kawasan yang dua dekade lalu dikuasai Uni Soviet. “*When the Soviet Union invaded Afghanistan we had this brilliant idea were going to come to Pakistan and create a force mujahedeen and equip them with stinger missiles and everything else to go after the*

Soviets inside Afghanistan.”

Pernyataan Hillary ini sama dengan apa yang ia sampaikan di hadapan rapat Pemerintah dengan Senat Amerika Serikat. Dalam rapat tersebut Hillary menyebut hubungan AS dengan Afganistan, Taliban, Mujahidin, ISIS dan gerakan radikal lain. Rapat ini disiarkan secara langsung di CNN.

Praktik-praktik kejam yang diperagakan ISIS terhadap tawanan kemudian diekspos ke berbagai media massa, termasuk media sosial. Hal ini kemudian menjadi momok bagi masyarakat dunia, termasuk kaum Muslim sekaligus menjadi komoditi agenda perang melawan radikalisme.

Setelah itu berbagai kalangan selalu mencoba mengaitkan kewajiban penegakan Khilafah dengan aksi terorisme. Mereka mencoba membangun opini publik bahwa seruan penegakan Khilafah mengharuskan aksi kekerasan terhadap pemerintah dan publik.

Meluruskan Pandangan

Di tengah derasnya opini dan langkah perang melawan radikalisme dan terorisme, umat justru membutuhkan penjelasan yang jernih tentang syariah Islam, Islam politik, Khilafah dan jihad. Tentu agar tidak terjadi monsterisasi terhadap ajaran Islam yang berujung pada phobia terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Sejatinya syariah Islam adalah rahmat bagi semesta alam, baik itu perkara jihad maupun kewajiban penegakkan Khilafah. Kekhilafahan yang pernah eksis selama dua belas abad telah memayungi dunia dengan hukum yang adil dan mensejahterakan manusia. Spanyol saat berada dalam kekuasaan kaum Muslim dikenal sebagai negara damai bagi tiga agama; Islam, Yahudi dan Nasrani.

Khilafah Islam pun berulang memberikan bantuan kemanusiaan kepada sejumlah kerajaan Kristen Eropa. Pada tahun 1845-1852

Di tengah derasnya opini dan langkah perang melawan radikalisme dan terorisme, umat justru membutuhkan penjelasan yang jernih tentang syariah Islam, Islam politik, Khilafah dan jihad. Tentu agar tidak terjadi monsterisasi terhadap ajaran Islam yang berujung pada phobia terhadap hukum-hukum Allah SWT.

M seantero Eropa mengalami kelaparan hebat yang dikenal dengan *The Great Hunger* atau *The Great Irish Famime*. Kala itu Khalifah Abdul Majid I mengirim bantuan berupa 1000 sterling serta tiga kapal besar memuat makanan, sepatu dan keperluan warga lainnya.

Yang banyak tak diketahui publik, pada tahun 1492 Sultan Bayezid II dari Khilafah Utsmaniyah menyelamatkan 150 ribu pengungsi Yahudi dari ancaman inkuisisi di Spanyol. Sultan Bayezid memerintahkan agar kapal yang membawa pengungsi dievakuasi ke tanah Khilafah Utsmanisyah. “Mengurus keturunan Nabi Ibrahim dan Yakub adalah perintah Allah,” kata beliau kala itu. Bahkan Sultan memerintahkan bawahannya agar memberikan makanan dan pakaian layak bagi para pengungsi Yahudi tersebut.

Nah, apakah yang seperti ini yang disebut sebagai ancaman kemanusiaan? [Iwan Januar]



Donald J. Trump
@realDonaldTrump

Follow

The threat from radical Islamic terrorism is very real, just look at what is happening in Europe and the Middle-East. Courts must act fast!

RETWEETS

32,937

LIKES

146,637



NO EXIT © Andy Singer



PERANG MELAWAN TERORISME: AGENDA AS

Dr. Kusman Sadik

Donald Trump tweeted: “The threat from radical Islamic terrorism is very real, just look at what is happening in Europe and the Middle-East. Courts must act fast!” (*Washingtonpost.com*, 22/05/2017).

Pada masa kepemimpinan Donald Trump, proyek besar AS *global war on terrorism* (GWOT) diperkirakan akan semakin keras. Sejak masa kampanyenya, Trump memang menjanjikan bahwa di antara bagian program utamanya adalah meningkatkan upaya memerangi terorisme. Bahkan dia mengkritik Obama sebagai pemimpin AS yang sangat lemah dalam menjalankan proyek GWOT.

Trump juga lebih memperjelas target GWOT adalah gerakan Islam. Seperti yang dilansir oleh *Washingtonpost* di atas, Trump secara tegas melalui Twitter menyatakan tentang adanya ancaman nyata dari ‘*radical Islamic terrorism*’. Karena itu menurut dia, perlu aksi cepat untuk menghadapinya.

Istilah ‘*radical Islamic terrorism*’ ini

merupakan frase yang sering dipakai Trump ketika menyinggung masalah terorisme. Misalnya pada saat pidato pelantikannya, Trump mengatakan bahwa ia akan memperkuat aliansi lama dan membentuk aliansi baru serta menyatukan dunia beradab melawan terorisme Islam radikal. Secara sangat arogan dia juga menyatakan akan membasmi terorisme Islam radikal secara menyeluruh dari muka bumi.

AS Makin Bernafsu

Di bawah komando Trump, ke depan AS akan semakin memperkuat dan memperluas proyek GWOT. Sebagaimana dilansir *Consortiumnews.com* (26/04/2018), Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS kini sedang menyiapkan rancangan undang-undang baru terkait *The Authorization to Use Military Force* (AUMF).

Inti RUU tersebut adalah pemberian otoritas yang lebih besar kepada Presiden Trump dalam penggunaan kekuatan militer.

Sebelumnya otoritas tersebut ada di tangan Kongres AS. Jika nanti RUU itu disahkan maka Trump bisa menggerakkan militer perang AS di mana pun dan kapan pun yang dia inginkan tanpa perlu persetujuan Kongres.

Sebagaimana diketahui, kongres AS pada tahun 2001 dan 2002 mengeluarkan AUMF masing-masing untuk invasi terhadap Afghanistan dan Irak. Meskipun otoritas ini terbatas, George Bush, Barack Obama dan dilanjutkan oleh Donald Trump terus melakukan operasi militer di Afghanistan dan Irak hingga saat ini. Bahkan Trump kini memperluas invasi militernya ke Suriah.

Pada *draft* AUMF 2018 tersebut tidak ada lagi batasan waktu operasi militer sehingga bisa terus berlanjut selama menurut AS di tempat itu masih ada ancaman. Jelas ini strategi AS untuk melanggengkan invasi militernya di suatu negara. Dalihnya adanya ancaman tentu sangat mudah untuk dicari sebagai pembenarannya.

Dulu George W Bush menjadikan momentum WTC 9/11 pada 2001 itu sebagai legalitas untuk menebar ancaman ke seluruh dunia melalui proyek GWOT. Dia secara arogan saat itu memaksa setiap negara untuk berada bersama AS. Negara yang menolak akan dikategorikan sebagai pendukung teroris (*either you are with us or you are with the terrorists*).

Apabila mencermati fakta GWOT sejak Bush, Obama hingga Trump saat ini terlihat dengan jelas bahwa terdapat agenda kepentingan AS di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah untuk menjaga dominasi AS sebagai pimpinan Kapitalisme di dunia, legitimasi imperialisme dan mencegah kebangkitan Islam.

Menjaga Dominasi Kapitalisme

Pasca Blok Timur (Komunisme) pimpinan Uni Soviet runtuh, kekuasaan dunia secara politik ada di tangan Blok Barat (Kapitalisme)

pimpinan AS. Untuk menjaga dominasinya di dunia, AS perlu membuat proyek politik global. Proyek ini bisa digunakan untuk menekan dan menghukum suatu negara yang tidak tunduk pada AS. Proyek tersebut tidak lain adalah GWOT.

Robert Gilpin, analis politik dari Princeton University AS, pernah menyoroti GWOT tersebut dalam kaitannya dengan upaya AS untuk mendominasi dunia. Dia mempublikasikan hasil analisisnya itu di *International Relations Journal* Tahun 2005 Vol 19(1) dengan judul, "*War is Too Important to Be Left to Ideological Amateurs*".

Menurut Gilpin, proyek GWOT diarsiteki oleh kelompok *ultra-nationalists* atau *imperialist-elite* yang mendominasi pemerintahan Bush saat itu. Di antaranya adalah Wapres Richard Cheney, Menhan Donald Rumsfeld dan seorang pejabat tinggi di Kementrian Dalam Negeri John Bolton. Tujuan utama mereka adalah mempertahankan dominasi AS di dunia dan mencegah munculnya kekuatan lain yang membahayakan supremasi AS.

Gilpin menambahkan bahwa rencana mencapai dominasi global tersebut sebenarnya telah dirancang AS sejak masa Ronald Reagan. Kemudian pada masa Bush kembali ditegaskan dalam *draft: Cheney–Wolfowitz Doctrine*. Salah satu isi doktrin tersebut adalah pemakaian kekuatan militer AS untuk mencegah bangkitnya kekuatan lain di dunia.

Faktanya memang mudah dilihat. Di bawah payung GWOT, AS bertindak seakan polisi dunia. AS bisa menghukum negara manapun di dunia melalui invasi militer dengan alasan negara tersebut mendukung atau menjadi poros terorisme.

Legitimasi Imperialisme

Imperialisme atau penjajahan merupakan metode dasar penyebaran ideologi Kapitalisme.

Seperti disebutkan di atas, AS telah menjadikan GWOT sebagai alat untuk mendominasi dunia di bawah ideologi Kapitalismenya. Itu berarti juga AS akan mencengkeram dunia dalam imperialismenya yang dilegitimasi oleh GWOT.

Pada *Cheney–Wolfowitz Doctrine* juga disebutkan bahwa AS harus melakukan penguasaan terhadap cadangan minyak dunia, baik di Timur Tengah, Asia Tengah maupun di tempat lainnya. Gilpin (2005) menyatakan bahwa jika dikaitkan dengan latar belakang para tokoh ultranasionalis yang merancang GWOT akan semakin jelas bahwa konsep imperialisme ada di balik perang melawan terorisme.

Tokoh ultranasionalis yang dimaksud Gilpin itu adalah Bush, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Rice dan beberapa tokoh lain dalam pemerintahan Bush saat itu. Mereka memiliki saham di berbagai perusahaan minyak. Faktanya, perang melawan terorisme telah menjatuhkan korban sangat banyak, baik warga sipil di Irak, Afghanistan, Pakistan, atau di tempat-tempat lain. Pada saat yang sama, perang itu memberikan keuntungan raksasa bagi kaum kapitalis. Mereka telah meraup untung dari pengontrolan kilang-kilang minyak dan gas di Irak dan Afghanistan.

Ketika perang terus berlanjut, pabrik-pabrik senjata akan terus memproduksi dan terus mendapatkan pasar, perusahaan keamanan privat terus mendapatkan order, dan perusahaan pembangunan infrastruktur terus mendapat kontrak pembangunan (rekonstruksi) di negara-negara bekas perang. Perusahaan minyak juga mengambil keuntungan besar karena harga minyak yang cenderung naik pesat bila perang di Timur Tengah meletus.

Afganistan merupakan poros strategis di Asia Tengah yang berbatasan dengan Uni Soviet, Cina dan Iran. Negara itu juga berada di persimpangan jalur pipa dan cadangan gas,

mineral serta minyak yang sangat besar dan belum dimanfaatkan. Menurut sebuah laporan bersama Pentagon yang dipublikasikan oleh New York Times, Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) dan USAID, Afghanistan saat ini memiliki cadangan mineral yang sebelumnya tidak diketahui dan belum dimanfaatkan. Jumlahnya diperkirakan bernilai satu triliun dollar (U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan, *NYTimes.com*, 14 Juni 2010).

Pada laporan itu juga disebutkan mengenai hasil analisis pejabat Pentagon yang menunjukkan bahwa di satu lokasi di Provinsi Ghazni, Afghanistan, terdapat potensi simpanan mineral lithium setara dengan yang ada di Bolivia. Lithium merupakan sumberdaya yang saat ini semakin bernilai untuk digunakan sebagai baterai telepon selular dan laptop serta sebagai kunci masa depan untuk mobil listrik.

Mencegah Kebangkitan Islam

Perang peradaban antara Islam dan Kapitalisme merupakan sebuah keniscayaan yang mesti terjadi. Ini sebagaimana diramalkan oleh Huntington dalam bukunya, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (1996). Pasca runtuhnya ideologi Komunisme Uni Soviet, Islam menjadi satu-satunya ancaman bagi AS dan sekutunya dalam mewujudkan ideologi Kapitalismenya. Huntington menyatakan, “*The rhetoric of America’s ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam.*”

Dalam upaya mewujudkan itu, AS memerlukan sebuah langkah strategis yang bersifat global. Itu terwujud melalui momentum WTC 9/11 yang kemudian melahirkan proyek GWOT. Melalui GWOT, AS telah mengeluarkan dekrit perang global terhadap terorisme. Secara spesifik disebutkan

Alqaeda, kelompok Islam ekstrem radikal serta segala sesuatu yang dapat mengancam kepentingan AS secara politik dan ekonomi.

AS di bawah Trump diperkirakan akan semakin kuat mengarahkan GWOT menjadi perang melawan Islam. *Washingtonpost* (18/07/2017) memuat tulisan analisis yang berjudul “*Samuel Huntington, a Prophet for the Trump Era*”. Tulisan itu menggambarkan politik luar negeri Trump saat ini, yang memang secara tegas menunjukkan anti-Islam mengikuti tesis Huntington.

Trump memilih John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional. Seperti diketahui John Bolton adalah pemimpin sebuah organisasi yang sering mengeluarkan pendapat sinis tentang Islam dan imigran Muslim. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan aktivis anti-Muslim di AS. Trump juga memutuskan memilih Mike Pompeo, Direktur CIA, sebagai menteri luar negeri, menggantikan Rex Tillerson. Pompeo pernah menuduh para pemimpin Muslim AS sebagai pihak yang berpotensi terlibat dalam serangan teroris.

Jurnalis Nahal Toosi di harian *Politico* menyatakan bahwa Bolton dan Pompeo sekarang akan bekerja untuk Presiden Trump yang telah menuduh tanpa bukti bahwa Muslim AS ikut merayakan serangan 9/11 (*Politico.com*, 26/03/2018). Mereka bertiga dikenal sebagai aktivis anti-Muslim sehingga kebijakan politik mereka mudah ditebak ke mana arahnya.

Jadi isu terorisme dalam wadah GWOT sejatinya digunakan oleh AS untuk menghadang kebangkitan Islam. Kebangkitan ini akan ditandai dengan tegaknya Kekhilafahan Islam. Itu terungkap dalam dokumen-dokumen milik Pemerintah AS. Misalnya dalam dokumen ‘*Mapping Global Future*’ disebutkan bahwa *National Intelligence Council* (NIC) ketika tahun 2004 sudah membuat prediksi situasi yang akan terjadi pada tahun 2020.

NIC menilai, ada empat skenario yang kemungkinan akan terjadi di dunia. Salah satu skenario tersebut adalah berdirinya kembali Khilafah Islamiyah sebagai pemerintahan Islam global. Khilafah akan mampu memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global Barat di bawah pimpinan AS.

Kesadaran Barat terhadap ancaman ideologi Islam dalam sistem Khilafah itu dapat pula dilihat dari berbagai pernyataan para pemimpin Barat sendiri. Presiden George W. Bush (Jr) pada tahun 2006 pernah mengatakan, “*This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East, and Southeast Asia.*” (Khilafah ini akan menjadi imperium Islam yang totaliter yang akan melintasi negeri-negeri Muslim kini dan dulu, membentang dari Eropa hingga Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia Tenggara) (www.theinevitablecaliphate.com).

Kekhawatiran Barat terhadap Khilafah inilah yang melatarbelakangi serangkaian konspirasi, strategi dan kebijakan politik luar negeri mereka untuk mencegah Khilafah berdiri kembali. Tentu Barat sadar, jika Khilafah berdiri dan mempersatukan umat Islam sedunia dengan segenap potensi dan kekuatan yang dimiliki, maka hegemoni dan kepentingan Barat di dunia akan runtuh.

Membangun Kesadaran Umat

Perang melawan terorisme di bawah proyek GWOT yang dikomandani AS sejatinya adalah perang melawan Islam. Tentu GWOT ini bukan untuk kepentingan negeri Muslim, tetapi untuk kepentingan negara-negara penjajah. Memang, mereka berdalih bahwa GWOT itu demi melindungi keamanan negeri Muslim dari bahaya aksi terorisme. Namun, untuk menghindari konflik terbuka dengan umat Islam mereka melakukannya dengan dua pendekatan. *Pertama*: Mereka tidak melakukan

serangan langsung terhadap Islam. Mereka menyamakannya dengan perang melawan terorisme, radikalisme, fundamentalisme, atau berbagai ungkapan kamufase lainnya. Pasalnya, kalau mereka menyatakan secara terbuka perang melawan Islam tentu akan memunculkan reaksi dari seluruh umat Islam di dunia. Hal seperti itu sangat tidak diinginkan oleh mereka untuk terjadi.

Kedua: Mereka meminjam tangan orang Islam untuk berperang melawan orang Islam lainnya. Apa yang terjadi di Irak dan Afganistan membuktikan kepada mereka bahwa berperang secara langsung dengan umat Islam sangat berat. Pasalnya, perlawanan umat Islam di negeri tersebut tidak mudah ditundukkan.

Mereka kemudian membentuk pemerintahan boneka di Irak dan Afganistan untuk memerangi rakyatnya sendiri. Hal seperti itu pulalah yang mereka terapkan pada negeri-negeri Muslim lainnya. Penguasa negeri tersebut diarahkan untuk memerangi rakyatnya sendiri yang Muslim dengan dalih perang melawan terorisme, radikalisme dan fundametalisme. Upaya itu sekaligus untuk menutupi fakta terorisme yang telah dilakukan AS di berbagai negeri Muslim.

Penyesatan opini yang mereka lakukan itu harus dihadapi oleh umat Islam melalui aktivitas dakwah untuk menjelaskan ajaran Islam. Dengan begitu nantinya masyarakat paham bahwa semua ajaran Islam, termasuk di dalamnya Khilafah, merupakan rahmat dari Allah SWT, bukan keburukan sebagaimana yang dipropagandakan oleh mereka. Dakwah Islam bersifat *fikriyah* (pemikiran) dan '*unfiyah*' (tanpa kekerasan) sehingga tidak mungkin melahirkan terorisme.

Perlu pula dijelaskan bahwa ancaman sesungguhnya bagi negeri-negeri Muslim adalah sistem kapitalisme-liberalisme. Terbukti berbagai kerusakan di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik yang terjadi di negeri-negeri

Perlu pula dijelaskan bahwa ancaman sesungguhnya bagi negeri-negeri Muslim adalah sistem kapitalisme-liberalisme. Terbukti berbagai kerusakan di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik yang terjadi di negeri-negeri Muslim justru bersumber pada penerapan sistem kapitalisme ini. Proyek GWOT adalah sarana bagi AS untuk mempropagandakan kapitalisme-liberalisme di negeri-negeri Muslim. Itu bagian strategi AS untuk semakin memperkuat cengkeraman imperialismenya.

Muslim justru bersumber pada penerapan sistem kapitalisme ini. Proyek GWOT adalah sarana bagi AS untuk mempropagandakan kapitalisme-liberalisme di negeri-negeri Muslim. Itu bagian strategi AS untuk semakin memperkuat cengkeraman imperialismenya.

Sebagai catatan akhir, faktanya saat ini justru ada peningkatan kesadaran umat Islam di berbagai negeri Muslim. Itulah kesadaran untuk menegakkan kembali syariah Islam secara *kâffah* dalam naungan Khilafah. Apabila kesadaran tersebut makin menguat dan meluas maka tentu itu akan menjadi mimpi buruk bagi AS. Sebabnya, Khilafah tidak hanya menjadi pertanda berakhirnya imperialisme AS di negeri Muslim, namun juga menjadi pertanda runtuhnya peradaban kapitalisme-liberalisme di dunia.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []



PERANG DAGANG AS-CINA

Presiden AS Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif bea masuk 1.300 produk ekspor Cina ke AS yang nilainya mencapai US\$ 50 miliar (22/3). Produk-produk tersebut di antaranya komponen pesawat terbang, baterai, panel televisi, alat kesehatan, satelit, dan senjata.

Tidak lama berselang, Cina melakukan pembalasan dengan menaikkan tarif bea masuk beberapa barang-barang impor AS hingga 25 persen. Produk-produk tersebut di antaranya aluminium, pesawat terbang, mobil, daging babi dan kedelai. Beberapa produk seperti buah-buahan, kacang dan pipa baja dikenakan tarif 15 persen.

Kebijakan Trump tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia hal itu merupakan balasan atas perdagangan yang tidak fair yang dilakukan oleh Cina, termasuk mencuri hak kekayaan intelektual negara itu. Memang, hampir 20 tahun terakhir defisit perdagangan AS dengan Cina semakin lebar. Artinya, ekspor Cina ke AS lebih banyak ketimbang nilai ekspor AS ke

Cina. Produk ekspor Cina pun tidak lagi didominasi oleh barang-barang murah yang padat tenaga kerja, namun semakin bergeser pada produk-produk padat modal dan teknologi. Pada tahun 2000, total defisit perdagangan AS mencapai US\$377 miliar. Dari jumlah itu, Cina menyumbang 22 persen. Pada tahun 2010, dari nilai defisit yang mencapai US\$500 miliar, 55 persennya berasal dari Cina (*US-China Securities and Exchange Commission*, 2011).

Serbuan impor barang Cina dijadikan kambing hitam melemahnya industri manufaktur AS. Banyak perusahaan AS, termasuk yang berteknologi tinggi seperti industri panel surya, berguguran. Dampak berikutnya, penyerapan tenaga kerja di AS ikut merosot. Pada tahun 2011, beberapa riset menyebutkan impor Cina menyebabkan hilangnya pekerjaan 600 ribu pekerja kelas bawah dan 2,4 juta untuk pekerja kelas atas. Namun, faktor internal AS tak dapat ditampik. Tingginya biaya produksi di AS, terutama pajak

dan upah tenaga kerja yang mahal, ikut mendorong banyak perusahaan AS meninggalkan negara itu dan mengalihkan pabrik mereka ke negara-negara yang biaya produksinya lebih rendah seperti Cina.

Sebenarnya bukan hanya AS yang mengalami defisit perdagangan dengan Cina. Negara-negara Eropa dan Asia termasuk Indonesia juga mengalami hal serupa. Hingga tahun 2006, neraca perdagangan Indonesia dengan Cina masih surplus. Namun, sejak tahun 2007 Indonesia telah mencatat defisit dengan pertumbuhan fantastis. Tahun 2017 nilainya telah mencapai US\$6,3 miliar. Kenaikan itu terutama sejak Indonesia ikut menandatangani *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) tahun 2008. Parahnya lagi, mayoritas barang yang diekspor Indonesia ke Cina adalah barang-barang mentah atau setengah jadi seperti batubara dan nikel. Diolah di Cina dan sebagian diekspor kembali ke Indonesia. Sayang, hingga saat ini Pemerintah Indonesia tak pernah melakukan evaluasi apalagi koreksi terhadap kebijakan yang indikasinya telah banyak merugikan ekonomi Indonesia.

Strategi Cina

Keberhasilan Cina menjadi negara eksportir terbesar dunia bukan tanpa strategi. Namun demikian, strategi itu oleh banyak negara termasuk AS dianggap tidak sehat dan melanggar tata perdagangan global. Cina, misalnya, dituding melakukan praktik dumping atas produk-produk eksportnya. Artinya, barang-barang yang diekspor lebih murah dibandingkan dengan harga jual barang tersebut di dalam negeri atau lebih rendah dibandingkan dengan harga produksinya. Tujuannya antara lain untuk memperlemah atau bahkan mematikan kompetitor di negara tujuan ekspor sehingga eksportir dapat menguasai pasar di negara itu. Setelah itu,

barulah harganya disesuaikan pada tingkat yang menguntungkan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan survei Kementerian Perdagangan, sekitar 20 persen produk Cina yang terindikasi dumping seperti pada produk baja dan pelat timah. Sayang, hanya sedikit yang diusut secara serius. Pasalnya, tak banyak asosiasi produsen domestik yang mampu menempuh proses pembuktian yang relatif cukup rumit dan memakan waktu. Adapun Pemerintah hanya menunggu bola.

Oleh karena itu, tidak aneh jika gugatan negara mitra dagang Cina terhadap negara itu sangat masif. Sebagai contoh, sejak 2008-2012, lebih dari 600 komplain diajukan ke WTO. Isinya menggugat kebijakan perdagangan Cina yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan. Sayang, sikap WTO terhadap Cina, terutama oleh pemerintahan Trump, dianggap terlalu lunak. Akhirnya, Trump melanggar aturan WTO: menaikkan tarif secara sepihak tanpa terlebih dulu meminta restu WTO.

Tak seperti Indonesia, Cina cukup cerdik memanfaatkan WTO. Meskipun Cina telah menjadi anggota WTO tahun 2001, negara itu tidak menelan bulat-bulat berbagai rekomendasi dari lembaga itu. Cina memanfaatkan liberalisasi untuk membuka pasar eksportnya. Pada saat yang sama, dengan berbagai cara, Cina sangat ketat memproteksi arus masuk barang, jasa dan investasi asing ke negara itu. Dengan demikian pasar domestik tetap dikuasai oleh produk perusahaan-perusahaan lokal. Industri telekomunikasi informasi semisal Google, Facebook dan Apple dibuat tak berkutik oleh Pemerintah Cina. Jadilah Baidu, Tencent dan Xiaomi sebagai pemenang.

Strategi Cina lainnya yang banyak dipersoalkan AS adalah melakukan manipulasi nilai Yuan agar tetap melemah terhadap mata

uang negara lain terutama dolar AS. Dengan demikian harga barang ekspor Cina tetap lebih murah di AS. Sejak era George W. Bush, Pemerintah AS kerap memprotes Cina mengenai masalah ini, namun tak sampai bertindak seradikal Trump.

Cina juga dituding memberikan subsidi yang sangat besar untuk perusahaan-perusahaan domestik, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang masih mendominasi beberapa sektor ekonomi seperti energi dan perbankan. Dalam bukunya, *Subsidies to Chinese Industries*, Haley dan Haley (2013) mengungkap beberapa bentuk subsidi tersebut seperti: subsidi energi (batubara, listrik, gas, dan minyak bumi); pinjaman modal tanpa bunga atau dengan bunga murah; subsidi bahan baku utama; penyediaan tanah, teknologi, insentif pajak, dan sebagainya. Subsidi tersebut telah menjadi salah satu penopang performa perusahaan-perusahaan eksportir Cina, terutama yang padat modal dan berada di provinsi pesisir Cina. Subsidi itu tidak hanya menutupi kerugian mereka, namun juga dapat menutupi biaya-biaya strategis seperti pemasaran dan pengurusan biaya paten.

Di mata rivalnya, Cina juga dianggap diskriminatif terhadap investor asing. Namun bagi Cina, langkah itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara itu dari para kompetitornya. Cina, misalnya, selain membatasi kepemilikan saham asing, mengharuskan perusahaan asing di beberapa sektor melakukan transfer teknologi ke perusahaan lokal dengan mewajibkan usaha patungan antara perusahaan asing dan domestik (*joint venture*). Perusahaan rintisan (*start-up*) yang bergerak dalam teknologi juga disokong dengan berbagai kemudahan seperti pengurangan pajak pendapatan. Pemerintah pusat dan daerah juga harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa domestik,

termasuk yang berteknologi tinggi. Dengan kebijakan itu, secara perlahan, perusahaan domestik menjadi mandiri dan berikutnya mampu mengalahkan dominasi perusahaan-perusahaan asing. Bahkan kini, Cina yang dimotori beberapa perusahaan seperti Baidu, Alibaba dan Tencent hampir menyalip AS dalam industri kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Ini adalah salah satu industri yang saat ini dianggap paling canggih.

Meskipun demikian, kesungguhan Cina untuk memajukan negaranya juga terlihat dari besarnya anggaran riset dan pengembangan (R&D). Anggarannya kini telah mencapai US\$479 miliar atau 2,1 persen dari PDB-nya. Ini hampir menyaingi AS yang mencapai US\$554 miliar. Jika Cina konsisten dengan langkah ini, tak butuh waktu lama, negara itu akan mampu mengungguli kedigdayaan AS di bidang sains dan teknologi.

Saling Membutuhkan

Meningkatnya tensi konflik perdagangan AS dengan Cina bisa melebar kemana-mana. Namun demikian, kedua negara itu masih saling membutuhkan. Cina adalah tujuan ekspor utama AS setelah Kanada dan Meksiko. AS juga merupakan pangsa pasar utama ekspor Cina.

Dari sisi investasi, perusahaan-perusahaan raksasa AS juga banyak berinvestasi di Cina. Ekonomi yang tumbuh pesat, juga jumlah kelas menengah yang semakin besar, menjadi daya tarik investor asing seperti AS untuk menanamkan modalnya di Cina. Demikian pula sebaliknya, AS adalah tujuan investasi utama Cina.

Seperti diketahui, Pemerintah Cina sedang giat-giatnya mendorong investor lokal khususnya BUMN untuk memperluas pasar di luar negeri dan mengakuisisi aset-aset potensial di negara lain. Di AS sendiri nilai investasi Cina pada tahun 2016 mencapai

US\$45 miliar atau hampir 25 persen dari total investasi luar negara itu yang mencapai US\$200 miliar. Investasi Cina pada sektor keuangan juga sangat besar.

Data Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa dari US\$6,3 triliun surat utang AS per Maret 2018, paling banyak dipegang oleh investor Cina dengan nilai US\$1,2 triliun atau 20 persen dari keseluruhan obligasi yang dipegang investor asing. Bagi AS, pembelian investor asing atas surat utang negara itu sangat vital agar ekonomi negara itu bisa tetap berjalan.

Dengan demikian perang dagang antara kedua negara itu dapat dimaknai sebagai upaya tawar-menawar untuk menuju keseimbangan baru ekonomi yang lebih menguntungkan bagi AS. Pasar yang lebih terbuka, penghargaan pada hak paten dan perlakuan yang lebih setara pada investor asing.

Meskipun demikian, melemahnya daya saing AS bukan semata karena menguatnya peran Cina dalam perdagangan global. Persoalan ekonomi negara ini sudah sedemikian berat: mulai dari utang luar negeri yang semakin menggunung, defisit transaksi berjalan dan modal, defisit APBN, penurunan produktivitas pekerja, pelemahan industri manufaktur, hingga perekonomian yang semakin bertumpu pada sektor finansial yang sangat keropos.

Pasa saat yang sama, kemajuan ekonomi Cina saat ini menunjukkan bahwa peran negara masih sangat penting dalam menggerakkan ekonomi suatu negara. Ini sekaligus mematahkan argumentasi kelompok neoliberal yang menentang habis-habisan keterlibatan negara dalam mengelola ekonomi. Namun demikian, cepat atau lambat, pengaturan ekonomi Cina yang semakin kapitalistik diproyeksikan akan menghadapi persoalan yang serupa seperti yang dihadapi oleh negara-negara kapitalis lainnya. Bukan hanya kesenjangan pendapatan yang semakin lebar,

eksploitasi alam dan manusia juga semakin akut. Gejala instabilitas juga mulai mengancam ekonomi negara itu.

Kebangkitan

Kemajuan pesat ekonomi Cina yang mampu menyaingi kekuatan ekonomi AS, Eropa dan Jepang dapat menjadi pelajaran bagi kaum Muslim bahwa peluang mereka untuk menjadi negara *super power* termasuk dalam aspek ekonomi sangat terbuka lebar. Selain jumlah penduduk yang besar, potensi sumberdaya alam yang melimpah dan posisi strategis akan menjadi modal dasar untuk membangun ekonomi. Dari sisi inovasi teknologi, mereka dapat membangun secara progresif, seperti mengadaptasi teknologi negara-negara maju, selama mereka memiliki visi untuk menjadi negara maju.

Modal paling bernilai yang dimiliki oleh umat Islam adalah eksistensi ideologi Islam yang masih diemban umat Islam. Islam sebagai sistem hidup telah memberikan panduan dalam mengatur urusan manusia, termasuk dalam masalah ekonomi. Pengaturan masalah kepemilikan barang dan jasa, pembelanjaan dan distribusinya, termasuk di dalamnya pengelolaan fiskal, moneter, industri, dan perdagangan telah dijelaskan secara rinci berdasarkan tuntunan wahyu ilahi.

Sayang, pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924, ideologi ini tak lagi diemban oleh satu negara pun. Oleh karena itu, satu-satunya persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah mewujudkan institusi yang mampu menerapkan ideologi Islam dan menyatukan seluruh potensi umat Islam. Dengan wadah tersebut, umat Islam dalam berbagai bidang akan mampu menjadi umat terbaik dan mengungguli negara-negara penganut ideologi kapitalisme seperti AS dan Cina.

Wallâhu a'lam bi as-shawâb. [Muis]

MELAWAN TERORISME AMERIKA

Abu Halwa

Setelah Perang Dingin usai, Amerika Serikat sebagai pemimpin ideologi kapitalis menjadikan Islam satu-satunya musuh ideologis. Ragam pemahaman dan aksi dibuat untuk melumpuhkan Islam. Sebut saja sistem demokrasi dalam pemerintahan, nasionalisme untuk menyekatkan negeri-negeri Islam, konsep pluralisme dalam bermasyarakat, liberalisme (kebebasan) dalam bergaul, HAM versi Barat, dialog antar umat beragama, moderat dalam beragama, politik pasar bebas, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Semua itu merupakan pemahaman-pemahaman berbahaya yang oleh AS dijadikan sebagai instrumen untuk memukul Islam dan menancapkan peradabannya.

Terorisme lahir dari rahim Amerika. Tumbuh suburnya pun atas desain Amerika. Tahun 1979, Dinas Intelijen Amerika dan Inggris membahas istilah ini. Mereka sepakat bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target politis.

Berbagai konferensi kemudian menyusul. Dibuatlah berbagai hukum dan undang-undang untuk membatasi aksi-aksi yang digolongkan sebagai terorisme. Undang-

undang itu juga dibuat untuk mengkategorikan mana organisasi, gerakan atau kelompok teroris. Undang-undang itu diklaim untuk membatasi gerak teroris. Kenyataannya, UU tersebut tidak mendalam dan tunduk pada orientasi politik negara yang membuatnya.

Amerika kemudian merekayasa opini umum internasional dan regional untuk melawan terorisme (*War on Terrorism*). Dengan rekomendasi UU, Amerika dapat memata-matai siapa pun dan di mana pun yang mereka tuduh sebagai teroris. Bisa individu, organisasi, partai, maupun negara. Oleh karena itu, hampir tidak ada satu pun gerakan Islam saat ini, kecuali harus siap-siap dicap sebagai teroris oleh Amerika.

Amerika juga telah mengeksploitasi aksi-aksi yang dilakukan untuk merealisasikan target-target sipil. Pelakunya bisa gerakan politik atau gerakan militer yang tidak memiliki hubungan dengan Amerika. Bisa juga gerakan yang mempunyai hubungan dengan Amerika (CIA). Banyak dokumen yang menerangkan bahwa aksi-aksi yang dicap sebagai aksi terorisme sebenarnya didalangi oleh CIA sendiri. Misal, pembajakan pesawat TWA di Beirut tahun 80-an. Amerika juga

memanfaatkan peristiwa peledakan gedung Pusat Perdagangan Dunia (WTC) di New York dan Kantor Penyelidikan Federal di Oklahoma—sebelum diketahui pelakunya—dengan mengeluarkan Undang-undang Perlawanan Terhadap Terorisme yang disetujui oleh Senat Amerika tahun 1997. ISIS kemudian menjadi ikon tumbal aksi terorisme. Terdapat banyak keterangan yang menyatakan bahwa ISIS sendiri didesain oleh Amerika dan Inggris.

Publik harus menyadari, Amerikalah sesungguhnya terorisme sejati itu. Jutaan darah kaum Muslim di Irak, Afganistan, Suriah dan negeri Muslim lain tumpah oleh Amerika dan sekutunya. Tahun 2003, dengan alasan yang mengada-ada (tuduhan adanya senjata pemusnah massal di Irak), teroris Amerika menyerang Irak dan membunuh tidak kurang dari setengah juta manusia. Demikian pula perang perkepanjangan yang terjadi di Suriah. Amerika adalah negara yang paling bertanggung jawab. Menurut laporan SCPR yang dirilis pada tahun 2015, 470.000 warga Suriah telah tewas dan 1.900.000 lainnya mengalami cedera baik fatal maupun ringan dalam konflik.

“*Global War on Terrorisme*” adalah agenda Amerika untuk melawan Islam dan kaum muslim. Agenda ini jelas untuk kepentingan hegemoni Amerika atas negeri-negeri Islam. Tidak ada sedikitpun umat Islam yang diuntungkan atas gerakan WOT. Rangkaian kasus bom, korban fisik dan non-fisik (*framing* berita, semuanya menyudutkan Islam dan kaum Muslim) juga umat Islam.

Narasi dari pihak penguasa atas berbagai kejadian bom selalu mendeskriditkan Islam dan kaum Muslim. Label terorisme selalu diidentikkan dengan Islam dan kaum Muslim. Mengapa label teroris ini tidak dialamatkan kepada Leopard pelaku Bom Alam Sutera yang beragama Katolik? Atau Republik Maluku Selatan (RMS) yang merongrong kedaulatan

Negara? Atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah menumpahkan darah aparat keamanan? Giliran santri bersarung, digerbek. Alat buktinya adalah al-Quran.

Karena itu wajib bagi kaum Muslim untuk menolak segala bentuk program “*Global War on Terrorism*” ini.

Sikap Politik Kaum Muslim

Syariah Islam adalah tempat kita mematok sikap atas berbagai kejadian dan opini yang dikembangkan media *mainstream* atas kasus teror bom. Seorang Muslim wajib mengutuk siapa pun pelaku pengeboman. Perilaku biadab tersebut sungguh sangat dikecam oleh syariah Islam. Islam mengharamkan seorang Muslim melakukan teror. Islam adalah agama yang menyebar dan menumbuhsuburkan rahmat untuk sekeliling (*rahmatan lil alamin*).

Terorisme bukan ajaran Islam. Terorisme tidak ada secuil pun kaitannya dengan Islam. Islam melarang seorang Muslim menumpahkan darah dan menghilangkan jiwa manusia tanpa *haq*. Allah SWT berfirman:

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا﴾

Siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS al-Maidah [5]: 32).

Landasan teologi jihad yang sering dikaitkan dengan kasus terorisme juga harus diklarifikasi dan diberi penjelasan. Dalam beberapa keterangan hadis, jihad adalah amal

utama terkait dengan perang yang dilakukan di mana, kapan dan dalam kondisi seperti apa. Jihad sama sekali berbeda dengan aksi teror selama ini.

Kita menolak keras segala tindak teror. Namun, kita tetap harus kritis dan tidak serta-merta setuju dengan penanganan teroris yang didesain oleh Amerika dan sekutunya. Program “*Global War on Terrorism*” dengan rangkaian UU anti teroris tidak pernah adil diarahkan. Moncong senjata Densus 88 dan UU anti terorisme tidak pernah adil dan selalu dialamatkan pada Islam. Jadi tidak layak program ini didukung oleh umat Islam.

Umat Islam justru wajib curiga jika pemberantasan terorisme ini melibatkan atau bekerjasama dengan Amerika. Berdasarkan fakta yang dijelaskan di atas, UU antiteror justru dijadikan Amerika untuk memata-matai, menuduh dan mencap pihak-pihak lain sebagai kelompok atau organisasi teror. Kaum Muslim wajib membongkar hakikat apa yang dinamakan UU terorisme dan hakikat politik Amerika yang digunakan untuk menciptakan hegemoni atas dunia melalui undang-undang itu.

Umat Islam juga jangan mau diadu domba baik antar mereka ataupun dengan umat agama lain. Desain bom yang dilakukan di gereja dan pelakunya dialamatkan kepada umat Islam adalah *framing* adu domba. Padahal semua umat beragama meyakini bahwa tidak ada satu agama pun yang membenarkan aksi teror terhadap manusia. Apalagi dalam agama Islam.

Politik adu domba di dalam internal umat Islam itu saat umat dilabeli dengan istilah Islam garis keras, Islam aliran radikal, dan lain-lain. Itu semua adalah propaganda dari musuh-musuh Islam. Tujuannya untuk melemahkan umat Islam dari dalam. Islam adalah satu. Kitabnya satu, yakni al-Quran. Nabinya satu, Muhammad saw. Perbedaan dalam umat adalah rahmat. Bukan perpecahan. Jadi jangan mau diadu domba.

Kekuatan Politik dan Langkah Strategis

Arus “*War on Terrorism*” yang terus menggasak dan menyudutkan Islam dan kaum Muslim kian deras. Ini karena kaum Muslim tidak memiliki kekuatan politik. Kesadaran politik yang kita bangun harus bermuara pada kekuatan politik nyata. Jika tidak, umat Islam selalu dalam sasaran opini dan objek berbagai tindak kekejian ragam teror. Tanpa kekuatan politik itu, umat Islam akan selalu menjadi “santapan” dan diadu domba oleh negara-negara penjajah.

Opini politik, intrik dan rekayasa politik yang menyudutkan Islam dan kaum Muslim selama ini dilakukan oleh Negara Superpower Amerika dan sekutunya. Didukung pula oleh penguasa-penguasa negeri Islam yang berkhianat terhadap umatnya. Jelas ini tidak sebanding dengan Islam dan kaum Muslim yang tidak memiliki kekuatan politik. Umat Islam saat ini berada pada posisi yang tercerai-berai di lebih 50 negara. Mereka tidak bersatu. Mereka tidak kompak dalam menghadapi makar-makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam.

Jutaan umat Islam hanya bisa mengutuk tindakan negara teroris Amerika dan sekutunya yang melakukan pembantaian umat Islam di Irak, Palestina, Suriah, Kasymir, Rohingya, dan di belahan dunia lainnya. Angkatan bersenjata, kekayaan alam dan sumberdaya manusia tidak bisa efektif tersalurkan untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Semua itu karena tidak ada kekuatan politik yang menyatukannya. Kekuatan politik itu adalah Khilafah Islamiyah ‘*ala Minhâj Nubuwwah*.

Langkah yang harus ditempuh umat Islam dalam perang melawan terorisme ala Amerika adalah dakwah. Memang, dalam kasus berbagai tindak teror, umat Islam secara fisik menjadi korban. Namun, tidak ada sedikitpun ruang yang menghalalkan umat melakukan tindakan kekerasan menyikapi “perang” ini.

Yang harus dilakukan adalah dakwah penyadaran dan pembinaan yang bermuara pada penyatuan kaum Muslim.

Umat perlu disadarkan tentang pentingnya memiliki kesadaran politik (*wa'yu siyasi*) yang benar dan sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Politik sejatinya adalah “pengaturan tentang urusan umat/masyarakat”. Secara politis, kaum Muslim harus menyadari bahwa rangkaian kejadian yang ada di masyarakat (termasuk opini WOT) tidak lepas dari kebijakan politik yang dilakukan oleh penguasa. Kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, corak budaya, peribadatan, sungguh tidak lepas dari aturan yang lahir dari kebijakan (politik). Tipikal pemimpin (politik) dan sistem yang mereka jalankan adalah kunci arah kehidupan dalam bermasyarakat.

Termasuk bagian dari kesadaran politik, umat harus mewaspadai paham-paham yang ditaburkan musuh seperti paham demokrasi, nasionalisme, liberalisme, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Rangkaian paham ini jelas-jelas untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslim.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan umat dengan pemikiran Islam yang bersumber dari akidah Islam. Umat Islam harus mendapatkan penjelasan tentang makna politik dalam Islam dan bagaimana peran politik umat. Umat juga mendapatkan penjelasan sejarah peradaban Islam, bagaimana sistem pendidikan dalam Islam, sistem ekonomi dalam pandangan Islam, dan lain sebagainya. Pembinaan tersebut harus dilakukan dengan intensif sehingga memberikan pola pemahaman yang berkarakter sesuai dengan petunjuk Islam. Dengan itu umat memiliki pemikiran dan perasaan yang sama, yang distandarisasi dengan akidah Islam.

Inilah dulu yang dilakukan oleh Rasulullah saw. atas para sahabatnya. Beliau menanamkan persepsi yang kuat atas visi misi hidup seorang Muslim. Dari mana ia berasal, ke mana ia setelah

Termasuk bagian dari kesadaran politik, umat harus mewaspadai paham-paham yang ditaburkan musuh seperti paham demokrasi, nasionalisme, liberalisme, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Rangkaian paham ini jelas-jelas untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslim.

mati, dan apa yang dia harus lakukan selama hidup. Apa yang Rasul saw. lakukan adalah membentuk kepribadian Islam pada diri para sahabat. Dengan itu mereka memiliki pola pikir dan pola sikap yang khas, yang terstandarisasi dengan akidah dan syariah Islam.

Kesatuan pemikiran dan perasaan inilah yang menjadi tumpu kekuatan persatuan umat Islam. Akan tiba saatnya modal kekuatan itu nyata saat Allah memberikan pertolongan-Nya. Itulah saat terwujud kesatuan umat dalam naungan Khilafah ‘ala *Minhâj Nubuwwah*. Allah SWT berfirman:

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ بَنَصَّرَ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ
يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾

Pada hari (kemenangan) itu bergembiralah kaum Mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Perkasa lagi Penyayang (QS ar-Rum [30]: 4-5). []



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

Dari *WoT* ke *WoR*

Setelah era Perang Dingin berakhir, Barat melihat Dunia Islam paling potensial menjadi rival mereka ke depan. Dunia Islam memiliki segalanya untuk menandingi Barat. Dari segi populasi, jumlah Muslim sedunia sangat besar. Lebih dari 1,6 miliar. Mereka tinggal di wilayah yang secara geopolitis sangat strategis. Sangat kaya secara ekonomi. Yang paling utama, Dunia Islam memiliki sistem nilai—Islam itu sendiri—yang sangat mungkin membuat umat Islam sedunia bangkit kembali. Apalagi secara historis Dunia Islam memang pernah menjadi adidaya berbilang abad lamanya.

Bila Barat tidak ingin tergusur dominasinya dari pentas dunia, calon lawan ini harus dipukul dulu sebelum benar-benar kelak menjadi menjadi kuat dan sulit dikalahkan. Caranya bagaimana?

Pertama: Dengan meluncurkan apa yang mereka sebut *War on Terrorism (WoT)*. Teroris itu didefinisikan siapa saja yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan dan

menimbulkan ketakutan yang meluas. Karena itu bila benar mereka ingin memerangi terorisme, mestinya semua orang, kelompok bahkan negara yang dalam meraih tujuan menggunakan kekerasan harus dianggap teroris. Nyatanya tidak. Ini tak lain adalah *war on Islam*. Dalam *list FTO (Foreign Terrorist Organization)* yang dikeluarkan oleh DK PBB, lebih dari 95% adalah individu dan kelompok Muslim. Di antaranya ada Syekh Ahmad Yasin dan Hamas. Bagaimana mungkin Hamas yang sedang berjuang untuk merebut tanah Palestina disebut teroris. Sebaliknya, Israel yang menjajah dan membunuh warga Palestina hampir tiap hari tidak disebut apa-apa? Imam Samudra disebut teroris dan sudah dihukum mati. Dia dituding meledakkan sekian ton bom di sepenggal jalan di Legian Bali yang mengakibatkan ratusan orang meninggal, ratusan lagi luka-luka dan ratusan bangunan hancur. Sebaliknya, Bush memerintahkan invasi AS ke Irak, menjatuhkan lebih dari 30 ribu ton bom. Akibatnya, bukan hanya sepenggal jalan

di Baghdad, seluruh Baghdad bahkan seluruh Irak hancur dan lebih dari 1,4 juta warganya tewas. Anehnya, Bush, jangankan dihukum mati, disebut teroris pun tidak.

Setiap kali ada kejadian yang bersifat teror pasti segera dikaitkan dengan Islam. Bila ternyata tidak terkait dengan Islam seperti penembakan di sejumlah tempat di AS, juga di negeri ini, yang pelakunya ternyata bukan Muslim, maka tidak akan disebut teroris.

Lalu apakah benar ambruknya WTC, yang dijadikan sebagai dalih Pemerintah AS menyeru dunia melawan terorisme itu, terjadi karena serangan teroris? Banyak pihak, termasuk di dalam negeri AS sendiri, meragukan klaim itu. Mereka lebih percaya, pelaku sebenarnya tak lain adalah otoritas di dalam AS itu sendiri. Apa buktinya? Banyak.

Beberapa bulan setelah peristiwa besar itu terjadi, saya mendapatkan kiriman dari AS sekeping CD berjudul *In Plane Site* yang dibuat oleh *Dave von Kleist*. Dalam CD itu diungkap

banyak sekali fakta yang menunjukkan klaim teroris yang telah menghancurkan WTC dan Gedung Pentagon tidaklah benar. Misalnya, dimensi kerusakan Gedung Pentagon jauh lebih kecil bila dibanding dimensi pesawat yang katanya menabrak. Tidak ada rekaman CCTV luncuran pesawat menabrak gedung. Di dalamnya juga tidak dijumpai bangkai kursi, bangkai bagasi atau bangkai manusia. Di WTC juga didapat kesaksian satpam setempat tentang adanya demolisi (peledakan) secara sengaja di setiap lantai. Yang paling besar di basement. Nah, demolisi secara sengaja inilah yang telah membuat Gedung WTC itu kemudian amblas ke bawah. Bukan seperti yang diklaim bahwa gedung itu ambruk karena ditabrak pesawat.

Kedua: Melakukan *political decaying* (pembusukan politik) dan *khilafah monsterizing* (monsterisasi khilafah) melalui pembentukan ISIS dengan khilafahnya. Sedemikian buruk citra Khilafah itu, lihatlah sekarang. Khilafah di mata sebagian publik menjadi sebuah terma yang sangat menakutkan. Ketakutan itu selalu dengan dasar apa yang terjadi di Suriah dan Irak dengan ISIS sebagai aktor utamanya. Bila orang takut Khilafah, bagaimana bisa diajak bersama-sama menegakkannya? Itulah yang saat ini terjadi. Dengan begitu, Barat berharap untuk beberapa saat kebangkitan Islam bisa ditunda, bila tidak bisa dicegah sama sekali.

Untuk menyuksekskan kedua cara ini, mereka mengembangkan apa yang disebut *War on Radicalism* (WoR). Mereka tahu, gagasan kembalinya peradaban Islam yang dibentuk melalui penerapan syariah secara *kāffah* tidak akan pernah benar-benar bisa dihilangkan dari benak umat Islam, termasuk soal khilafah. Mereka tahu, itu semua adalah ajaran Islam. Khilafah bahkan telah menjadi bagian dari sejarah Dunia Islam yang tidak mungkin dihapus begitu saja. Melawan itu semua

Setiap kali ada kejadian yang bersifat teror pasti segera dikaitkan dengan Islam. Bila ternyata tidak terkait dengan Islam seperti penembakan di sejumlah tempat di AS, juga di negeri ini, yang pelakunya ternyata bukan Muslim, maka tidak akan disebut teroris.

bagaikan menghalangi terangnya siang dan gelapnya malam. Tak mungkin. Namun, mereka juga tidak mungkin membiarkan. Tidak mungkin juga terang-terangan menyerang Islam. Karena itu Islam harus dibungkus dengan sebuah istilah yang lebih dulu dicitraburukkan. Itulah *radikalisme*.

Mereka katakan, radikalisme adalah akar dari terorisme. Semua pelaku teroris berpaham radikal. Radikalisme sama bahayanya dengan terorisme. Jadi, memerangi terorisme (*war on terrorism*) harus disertai dengan memerangi radikalisme (*war on radicalism*). Soal apa definisi radikalisme, tak penting. Seperti juga terorisme, radikalisme nyaris tanpa definisi. Penguasalah yang mendefinisikan, termasuk yang menentukan siapa yang radikal dan siapa yang bukan.

Perang melawan radikalisme kini menjadi senjata ampuh untuk menghalangi dakwah, khususnya dakwah politis-ideologis, menyingkirkan lawan politik dari mimbar-mimbar umat, termasuk sangat efektif menjadi alat untuk mempersekusi siapa saja yang tidak dikehendaki kehadirannya oleh penguasa. Jadilah *war on radicalism* topeng atau *mask*. Topeng ini juga dipakai oleh kaum islamophobia yang sudah lama gerah melihat perkembangan dakwah Islam yang memang sangat marak sejak beberapa dekade terakhir. Seolah mendapat peluang, tak sungkan, ada seorang pejabat tinggi pengidap islamophobia terang-terangan mengatakan bahwa radikalisme di kampus sudah berkembang sejak tahun 80-an, dan kini sudah merambah ke sekolah-sekolah dari sekolah menengah hingga sekolah dasar.

++++

Melihat fenomena ini, teringat kita pada ayat 8 dari surah ash-Shaff. Di situ Allah SWT menyatakan (yang artinya): “*Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut*

Perang melawan radikalisme kini menjadi senjata ampuh untuk menghalangi dakwah, khususnya dakwah politis-ideologis, menyingkirkan lawan politik dari mimbar-mimbar umat, termasuk sangat efektif menjadi alat untuk mempersekusi siapa saja yang tidak dikehendaki kehadirannya oleh penguasa. Jadilah *war on radicalism* topeng atau *mask*.

(tipudaya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya.”

Hal kurang lebih sama sebenarnya pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Mereka memerangi jilbab, menghalangi kegiatan training-training kelslaman seperti pesantren kilat, menangkapi sejumlah dai atau mubalig dengan aneka tuduhan. Hasilnya? Orde Baru tumbang. Dakwah jalan terus. Jilbab makin marak. Kesadaran Islam makin tumbuh dimana-mana. Semua yang serba Islam atau syariah seperti sekolah Islam, bank syariah, pakaian *syar'i*, makanan halal, seni Islami terus berkembang. Tak terbendung. Kini dengan pongahnya, kaum islamophobia hendak kembali membendungnya. Lihat saja, tak akan bisa. Seperti yang sudah-sudah, bendungan itu akan jebol. Cepat atau lambat. Insya Allah. □

ISLAM MERADIKALISASI PEREMPUAN?

Siti Nafidah Anshory

Peristiwa Bom Surabaya jelang Ramadhan lalu menyisakan perbincangan soal keterlibatan perempuan dalam gerakan terorisme. Artikel bertajuk *"Bangkitnya Jihadis Perempuan"* yang dipublis *tirto.id* menegaskan bahwa perempuan semakin punya peran penting dalam gerakan ekstremis dan aksi teror di Indonesia.

Simpulan ini juga seakan mengamini hasil laporan berjudul, *"Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists"*. Laporan ini dipublikasikan *Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)* pada tahun 2017 lalu. Dalam laporan lembaga yang digawangi Sidney Jones ini disebutkan bahwa peran perempuan dalam gerakan ekstremisme-terorisme di Indonesia terus berkembang selama kurun waktu empat dekade terakhir. Bahkan saat diwawancara *Tempo*, Sidney Jones, yang juga peneliti terorisme di Asia Tenggara sekaligus penasihat senior di International Crisis Group, mengatakan bahwa saat ini *perempuan ternyata bukan hanya siap menjadi istri, ibu atau ustadzah, tetapi juga siap menjadi martir atau kombatan*. Sebuah simpulan yang tidak bisa dibilang main-main!

Menepis Fitnah Keji

Adanya narasi yang menggambarkan bahwa ajaran Islam bisa meradikalisasi atau mengubah

perempuan seperti monster yang hilang rasa keibuan adalah fitnah yang sangat keji. Ini tidak sesuai dengan realita ajaran Islam. Bahkan tuduhan ini terkesan dipaksakan dan mengada-ngada. Faktanya, jumlah perempuan yang mereka sebut-sebut terlibat dalam terorisme baik global maupun lokal tak lebih banyak dari kaum Muslimah yang memiliki pemahaman yang lebih jernih tentang Islam.

Apalagi upaya generalisasi yang mereka lakukan dengan mengungkap narasi semacam "kebangkitan jihadis perempuan", "radikalisasi kaum perempuan," atau yang semacamnya, tampak sangat tendensius dan terkesan ditujukan untuk menyerang Islam dan menstigma negatif agenda perjuangan menegakkan sistem Islam, termasuk yang dilakukan oleh kaum perempuan yang terlibat aktif dalam gerakan Islam ideologis, namun berjuang tanpa kekerasan.

Lantas, apa yang sesungguhnya mereka inginkan dengan semua fitnah keji yang mereka lontarkan?

Untuk menjawab hal ini, kita tak bisa melepaskan diri dari analisis masalah atas realitas yang terjadi terkait konstelasi politik internasional. Sebagaimana diketahui, negara-negara kapitalis Barat berkepentingan untuk melanggengkan hegemoninya atas dunia. Salah satunya melalui isu globalisasi nilai-nilai Barat

dan semua produk hukum atau sistem hidup Barat di dunia, khususnya di Dunia Islam.

AS getol melakukan banyak hal di Dunia Islam hingga hari ini. Misalnya, agenda *perang global melawan terorisme* (GWOt). *Sequel* terbarunya bertajuk '*war on evil ideology*' atau 'perang melawan ideologi setan' (baca: perang melawan ideologi Islam). AS juga memicu gelombang infiltrasi pemikiran dan budaya sekular—terutama isu demokratisasi, liberalisasi, ide-ide gender dan budaya permissif—di negeri-negeri Islam. Dalam hal ini AS memanfaatkan jasa para antek lokal dari kalangan liberalis sekular. Mereka didanai dan dimediasi secara besar-besaran dan kontinu. AS juga melakukan politik adu domba. AS pun menggelar banyak proyek deradikalisasi yang mereka rancang di negeri-negeri Islam. Semua ini menjadi bukti betapa AS yang kampiun Kapitalisme ini terobsesi dengan impiannya menjadi penguasa tunggal dalam Tata Dunia Barunya.

Untuk memuluskan serangan total peradaban kapitalis sekular atas Dunia Islam inilah, isu globalisasi mereka *blow up* sedemikian rupa. Globalisasi ini menjadi sarana efektif untuk mematikan kekuatan perekonomian kaum Muslim dengan senjata modal/uang mereka. Globalisasi ini pun ditujukan untuk merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kaum Muslim sejak dari dasarnya, yakni kekuatan ideologis yang dimiliki Islam. Islam jelas lekat dalam pribadi-pribadi Muslim, termasuk kaum perempuan dan generasi. Islam lekat dalam *prototype* keluarga Muslim hingga pada profil masyarakat/Negara Islam (Khilafah) dengan berbagai aktivitas politiknya, termasuk jihad. Dalam konteks inilah serangan keji ini diarahkan.

Mereka berharap Islam makin kehilangan cahaya dan berbau busuk. Mereka pun berharap peradaban Islam makin tak dirindukan dan makin ditakuti oleh anak-anak kaum Muslim sendiri, termasuk kaum perempuan.

Inilah hakikat persoalan yang sedang terjadi di balik isu radikalisisasi perempuan. Mereka tak

ingin kaum Muslimah—dengan seluruh peran strategis dan politisnya, baik sebagai istri, ibu maupun sebagai anggota masyarakat—paham tentang tanggung jawab mereka terhadap Islam dan kaum Muslim. Mereka tak ingin jika kaum Muslimah terpapar ide-ide Islam ideologis. Palsanya, hal demikian akan membuka wawasan berpikir dan kesadaran mereka tentang hakekat akar permasalahan umat yang kian hari kian jauh dari kemuliaan, kian terhina dan terjajah. Semua sebagai akibat mereka mencampakkan Islam. Mereka juga tak rela umat Islam, termasuk kaum perempuannya, paham bahwa satu-satunya peta jalan perubahan untuk mengembalikan kemuliaan mereka hanyalah dengan kembali ke pangkuan Islam.

Muslimah Wajib Mengambil Peran

Satu hal yang harus dipahami, kaum Muslimah sebagai bagian dari umat memiliki tanggung jawab besar atas nasib kaum Muslim. Kiprahnya dalam perjuangan Islam tak bisa diabaikan, bahkan akan menentukan keberhasilan perjuangan umat secara keseluruhan.

Ada beberapa hal yang harus dipahami kaum Muslimah terkait komitmen keterlibatannya dalam perjuangan umat saat ini. *Pertama*, berjuang bersama dengan gerakan Muslimah yang menjadikan akidah dan hukum Islam sebagai landasan gerak dan perjuangannya. Harus diyakini, hanya dengan menjadikan akidah dan hukum Islamlah gerakan Muslimah akan membawa berkah berupa kemuliaan umat yang hakiki dibawah naungan ridha Ilahi.

Kedua, pergerakan Muslimah harus memiliki visi dan misi yang sama dengan pergerakan kolektif (jamaah) Islam, yakni bertujuan menegakkan kalimah Allah. Caranya dengan meneladani cara yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Kaum Muslim harus membina dan menyebarkan pemikiran Islam yang jernih dan utuh (*kāffah*) di tengah-tengah umat, terutama di kalangan Muslimah lainnya. Mereka juga harus melakukan pergolakan pemikiran dan perjuangan

politik. Dengan begitu kesadaran akan rusaknya sistem kehidupan yang mengungkung mereka saat ini dan keharusan kembali pada sistem Islam akan tersebar menyeluruh di setiap komponen umat. Titik tekan perjuangan gerakan Muslimah ada pada tataran strategis, bukan pada tataran teknis sekadar bagaimana merebut kekuasaan, sebagaimana jalan yang diambil para jihadis melalui aksi-aksi teror atau sebagaimana kaum feminis yang berjuang melalui mantra *affirmative action*.

Ketiga, gerakan Muslimah harus menjadi bagian yang bersinergi dengan pergerakan kolektif Islam. Pergerakan Muslimah bukan pergerakan yang terpisah dari pergerakan umat. Ini karena Islam memiliki cara pandang yang khas dan universal. Setiap permasalahan yang muncul akan dipandang sebagai masalah manusia, tidak dibedakan sebagai masalah laki-laki saja atau perempuan saja. Semuanya harus menjadi tanggung jawab seluruh umat. Semua masalah harus dipecahkan dengan pemecahan yang sama, yakni dengan Islam.

Keempat, pergerakan Muslimah harus memiliki kejelasan *fikrah* (konsep/pemikiran) dan *tharīqah* (tatacara merealisasikan pemikiran) serta ikatan yang sah di antara para aktivisnya. Pergerakan Muslimah—sebagaimana juga pergerakan jamaah Islam yang menjadi induknya—harus memiliki wawasan politik global. Dalam arti, mereka memiliki kesadaran bahwa umat Islam di dunia adalah satu umat, dan harus menjadi umat yang satu, baik secara pemikiran maupun secara politis. Dengan begitu perjuangan Muslimah tidak boleh terbatas oleh sekat-sekat imajiner bernama negara. Mereka harus melebur dalam aktivitas pergerakan Muslimah dan umat Islam lainnya yang berjuang di seluruh pelosok bumi. Mereka sama-sama berusaha mewujudkan satu kepemimpinan politis yang menerapkan Islam atas seluruh umat.

Kelima, gerakan Muslimah harus bersifat politis, yakni mengarahkan perjuangannya pada upaya optimalisasi peran politik perempuan di

tengah-tengah masyarakat sesuai aturan Islam, yakni dalam peran dan fungsinya sebagai pencetak dan penyangga generasi masa depan umat. Dengan demikian arah pemberdayaan tidak fokus pada optimalisasi peran publik saja (sebagaimana perpektif feministik yang mendikotomikan sektor publik dan domestik). Pemberdayaan juga tidak untuk ditarget sebagai kombatan sebagaimana fenomena kelompok radikal ISIS dll. Pemberdayaan itu harus mengarah pada upaya optimalisasi seluruh peran perempuan, baik di sektor publik maupun domestik, sesuai tuntunan syariah.

Pada tataran praktis, hal ini dilakukan dengan cara membina pemikiran dan pola sikap mereka dengan Islam. Dengan itu terbentuk perempuan Muslimah berkepribadian Islam tinggi sekaligus memiliki kesadaran politik Islam yang juga tinggi. Mereka paham hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan umat. Mereka pun terdorong untuk senantiasa mengikuti perkembangan peristiwa politik dalam dan luar negeri mereka. Kesadaran politik Islam ini bermakna, mereka memahami dan meyakini bahwa pemeliharaan urusan-urusan umat (baik politik dalam maupun luar negeri) harus diatur dengan syariah Islam. Mereka pun memahami bagaimana konstelasi politik dan tantangan-tantangan politik yang akan mereka hadapi dalam perjuangan melanjutkan kehidupan Islam ini. Dengan begitu mereka tak akan mudah terjebak dengan berbagai narasi dan konspirasi yang diciptakan Barat untuk melemahkan perjuangan mewujudkan kemuliaan Islam.

Insyaa Allah, dengan cara ini, di tengah umat akan lahir generasi-generasi pemimpin yang berkepribadian Islam mumpuni, cerdas dan berkesadaran politik tinggi pula. Jika ini berhasil, bisa dipastikan kepemimpinan dunia akan kembali ke tangan umat Islam, sebagaimana yang dulu pernah terjadi di masa-masa sejarah keemasan peradaban Islam.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. ﷻ

HUKUM SYARIAH SEPUTAR OPERASI KECANTIKAN



pa hukum syariah tentang operasi kecantikan?

Pertama: Operasi kecantikan itu ada termasuk bagian dari pengobatan seperti operasi untuk mengatasi cacat pada tubuh semacam cacat akibat penyakit, kecelakaan lalu lintas, kebakaran atau yang lain, atau menghilangkan cacat bawaan lahir seperti pengamputasian jari tambahan atau memisahkan dua jari yang berdempetan dsb. Operasi semacam ini adalah boleh. Dalilnya adalah hadis riwayat at-Tirmidzi dari 'Arfajah bin Asad yang berkata:

«أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ»

*Pada Hari al-Kulab zaman jahiliah hidungku rusak. Lalu aku menggunakan hidung buatan dari perak sehingga membuatku bau busuk. Kemudian Rasulullah saw. menyuruhku untuk menggunakan hidung buatan (yang terbuat) dari emas (HR at-Tirmidzi, hadis *hasan gharib*).*

An-Nasai juga telah meriwayatkan hadis dari 'Arfajah bin As'ad bahwa dia:

«أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ»، وحسنه الألباني

Hidungnya rusak pada Hari al-Kulab zaman jahiliah. Lalu dia menggunakan hidung buatan dari perak dan itu membuatnya bau busuk. Kemudian Nabi saw. memerintahkan dia untuk menggunakan hidung buatan dari emas (HR an-Nasa'i).

Al-Albani menilai hadis ini *hasan*. Makna “*anfan min waraq[ini]*” yakni dari perak. Ini menunjukkan bahwa operasi kecantikan tersebut termasuk bagian dari *treatment* dan pengobatan yang boleh.

Kedua: Operasi kecantikan yang termasuk bagian dari mempercantik dan bukan termasuk dari pengobatan. Ini tidak boleh. Dalilnya adalah:

Hadis yang telah telah dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dari 'Alqamah, dari Abdullah yang berkata:

«لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى»

Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, orang yang meminta dicabut rambut dari wajahnya, orang yang

merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah (HR al-Bukhari).

Imam Muslim juga telah meriwayatkan hadis ini dengan redaksi:

«لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَغَيَّرَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللَّهُ»

Allah melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato, orang yang mencabut rambut dari wajah dan yang meminta dicabut rambut dari wajahnya, dan orang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah (HR Muslim).

Jelas dari hadis tersebut bahwa orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan adalah berdosa. Artinya, perbuatan ini haram. Juga jelas bahwa itu disertai dengan ‘*illat*’ “*li al-husni* (untuk kecantikan)”. Ini merupakan sifat yang memberikan makna konotatif. Artinya, orang yang merenggangkan gigi untuk tujuan kecantikan adalah berdosa. Ini berarti, jika bukan untuk tujuan kecantikan, yakni sebagai *treatment* atau pengobatan, maka boleh.

Di dalam *Lisân al-‘Arab* dinyatakan: *al-falaju fi al-asnân* adalah renggangnya antara gigi depan dan *ar-rabâ’iyât* (gigi antara gigi seri dan gigi taring) sejak bawaan lahir. Jika dibuat-buat maka itu adalah *at-taffij*; laki-laki itu *affaju al-asnân* dan perempuan itu *falja`u al-asnân*. Jadi *al-mutafallijât* adalah perempuan yang giginya dikikir untuk mengecilkannya dan membuat jarak kecil di antara gigi untuk mempercantik gigi dan menampilkan pemilik gigi itu seperti penampilan gadis kecil. Artinya, hal itu tanpa adanya di gigi perempuan itu cacat yang membutuhkan pengobatan dan *treatment* melainkan hanya untuk mempercantik dan kecantikan. Ini tidak boleh berdasarkan apa yang ada di dalam hadis tersebut. Rasul saw. melaknat *al-mutafallijât li al-husni* (perempuan yang merenggangkan gigi

untuk kecantikan). Mereka melakukan hal itu demi kecantikan dan itu merupakan ‘*illat*’ dalam larangan tersebut. Jika ‘*illat*’ itu tidak ada, yakni jika tidak untuk kecantikan melainkan untuk pengobatan dan *treatment*, maka boleh.

Imam an-Nawawi menjelaskan *al-mutafallijât li al-husni* di dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan menyatakan, “*Al-Mutafallijât* maksudnya merenggangkan gigi dengan mengikir gigi antara gigi depan dan gigi taring. Itu berasal dari *al-falju*, yaitu renggangan antara gigi seri (gigi depan) dan gigi taring. Hal itu dilakukan oleh perempuan yang telah menopause dan yang mendekati usia menopause untuk menampakkan lebih muda dan punya gigi bagus sebab renggangan kecil di antara gigi itu milik gadis kecil.

Adapun sabda Rasul saw., “*al-mutafallijât li al-husni*” maknanya mereka melakukan hal itu demi kecantikan. Di dalamnya ada isyarat bahwa yang haram adalah yang dilakukan demi kecantikan. Adapun seandainya perempuan itu membutuhkannya untuk pengobatan atau cacat di gigi dan semacamnya maka itu boleh.

Begitulah, ‘*illat*’-nya adalah (untuk kecantikan). Jika operasi tersebut dalam bab *treatment* dan pengobatan maka boleh. Jika tubuhnya sejak lahir adalah normal dan operasi itu bukan dalam bab *treatment*, melainkan hanya untuk kecantikan dan mempercantik diri, maka tidak boleh.

Ini yang saya kuatkan dalam masalah ini. *Wallâh a’lam wa ahkam*. [Syaiikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah]

Sumber:

<http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/51222.html>
<https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-2207520000.1523552944./797581010438972/%D8%9Ftype=3&theater>
<https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/YVBQXXYH2qT>
<https://twitter.com/ataabularashtah/status/984477933472505857>
<http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3864>



Solusi Tuntas Selamatkan Palestina dan Rohingya Dibacakan di Dhaka



Satu-satunya solusi tuntas untuk menyelamatkan Palestina dan Rohingya adalah dengan memobilisasi militer kaum Muslim di bawah komando Khilafah yang kedua. Solusi tersebut dibacakan secara serentak usai shalat Jumat (*Jumma Bayan*) oleh Hizbut Tahrir Bangladesh di depan hampir semua masjid di Kota Dhaka, (25/5/2018).

“Wahai para prajurit yang tulus dari militer Bangladesh! Anda tidak bisa diam dalam menghadapi kekejaman mengerikan dan kesombongan entitas Yahudi terkutuk di tanah yang diberkati (Palestina) dan umat Budha Myanmar!” pekik salah satu orator seperti dilansir Kantor Pusat Media Hizbut Tahrir.

Karena sebagai pemimpin dunia Muslim, terutama orang Arab dan Turki, meninggalkan kewajiban mereka untuk membebaskan al-Quds



dan Arakan, “Sekarang tugas itu jatuh kepada Anda untuk membebaskan tangan Anda dari rezim pengkhianat ini, klien rendah lain dari kolonial Barat, untuk jihad melawan entitas Yahudi dan negara teroris Budha Myanmar!” pekiknya.

Orator juga mengingatkan agar jangan pernah berpikir walau sejenak bahwa masalah Palestina adalah ‘masalah Arab’ dan masalah Arakan adalah ‘masalah Rohingya’. Itu adalah masalah seluruh umat Muslim.

“Kami tahu, Anda sekalian memiliki kerinduan berjihad di jalan Allah untuk membebaskan Masjid al-Aqsa. Jadi berikan dukungan nyata (*nusrah*) kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan Khilafah kedua, Khilafah yang benar-benar Khilafah. Hizbut Tahrir memiliki keberanian dan tekad untuk memobilisasi Anda menuju al-Quds dan Arakan untuk menyelamatkan saudara dan saudari Anda yang membutuhkan,” pungkasnya.

Mesti Aktivisnya Ditangkapi, HT Pakistan Tetap Dakwahkan Khilafah

“Pelecehan dan penangkapan yang terus-menerus dilakukan Pemerintah tidak akan menghentikan perjuangan Hizbut Tahrir Pakistan untuk terus mengungkap kebobrokan sistem demokrasi dan mempromosikan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah,” demikian isi poin pertama dari sembilan poin Pernyataan Sikap Hizbut Tahrir Pakistan yang disampaikan



Hizbut Tahrir Inggris ke Komisi Tinggi Pakistan di London, Jumat (25/5/2018).

Seperti dilansir Kantor Pusat Media Hizbut Tahrir, pada poin empat disebutkan tuduhan oleh rezim Pakistan bahwa anggota Hizbut Tahrir terlibat dalam militansi kekerasan adalah fitnah (*complete fabrication*). Hizbut Tahrir belum pernah menggunakan kekerasan untuk mendukung tujuan politiknya. Ini telah dikenal oleh pengamat politik dan organisasi HAM di seluruh dunia.



Fitnah ini, seperti tertulis dalam poin lima, sengaja dibuat oleh rezim lantaran rezim tak mampu melawan pemikiran Hizbut Tahrir dengan pemikiran lagi. Hizbut Tahrir telah mengungkapkan kebangkrutan rezim baik di bidang politik maupun intelektual. Sebaliknya, sebagaimana yang kini sedang mewabah di negeri Muslim lainnya, rezim malah membalasnya dengan melakukan tindakan represif dan diktator.

Inilah Bukti Rezim Pakistan Antek Amerika

Rezim Pakistan dan para penyelenggara negaranya tetap menjadi antek (*a client state subservient*) Amerika. "Ini adalah rezim yang sama, yang awalnya menyangkal kehadiran intelijen Amerika CIA dan para militer bayaran Amerika Blackwater. Kebohongan rezim Pakistan akhirnya terungkap dengan tertangkapnya agen CIA Raymond Davis di Lahore pada tahun 2011," tulis Pernyataan Sikap Hizbut Tahrir Pakistan poin



enam dari sembilan poin yang disampaikan delegasi Hizbut Tahrir Inggris ke Komisi Tinggi Pakistan di London, Jumat (25/5/2018).

Rezim ini juga menyangkal bahwa pesawat tanpa awak *drone* Amerika terbang dari basis yang berlokasi di wilayah Pakistan. Kebohongan itu juga akhirnya terbuka. Rezim ini terus bersembunyi dan berbohong tentang kerjasama dengan Amerika karena membunuh rakyatnya sendiri di bawah kedok memerangi militansi untuk mengamankan pendudukan Amerika di Afghanistan.

Pada poin tujuh disebutkan, rezim Pakistan menuduh para aktivis Hizbut Tahrir melakukan tindakan kriminal tanpa adanya bukti. Namun, agen CIA Raymond Davis dibebaskan tanpa hukuman setelah ia membunuh warga Pakistan di siang bolong.

Seperti dilansir Kantor Pusat Media Hizbut Tahrir, rezim ini juga mengizinkan atase Militer Amerika Kolonel Joseph Hall untuk pergi begitu saja setelah ia membunuh warga Pakistan lainnya



di Islamabad. “Meskipun memiliki bukti jelas dari agen kita menyebabkan kematian dan teror di Pakistan secara berulang, rezim tidak pernah menghukum para pembunuh kita. Sebaliknya, rezim menuduh aktivis damai Hizbut Tahrir yang hanya dianggap jahat di mata pemerintah lantaran mendakwahkan kewajiban menegakkan kembali Khilafah,” masih pada poin tujuh.

Pada poin delapan, ditegaskan bahwa rezim Pakistan melalui sistem politik sekulernya telah gagal untuk memecahkan banyak krisis yang dihadapi rakyat. Mulai dari krisis pendidikan, krisis kesehatan, utang yang semakin membengkak, kegagalan ekonomi pasca inflasi kronis, pengangguran, kekurangan listrik dan gas. Rezim ini tidak memiliki solusi kecuali sikap tunduk lebih lanjut ke kebijakan Amerika saja.

“Mereka terus-menerus berkhianat sebagai imbalan untuk dolar Amerika dan tirani yang mereka berikan melalui sistem korup mereka tidak akan menyelamatkan mereka dari murka orang-orang Pakistan di dunia ini maupun azab yang lebih besar dari Allah SWT di akhirat,” pungkask Pernyataan Sikap HT Pakistan tersebut.

Partainya Erdogan Tolak Membatalkan Perjanjian dengan Israel



Sebuah mosi yang mengusulkan pembatalan perjanjian ekonomi, militer dan politik antara Turki dan Israel ditolak oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Presiden

Recep Tayyip Erdoğan dan sekutunya dalam Pemilu, Partai Gerakan Nasionalis (MHP) di Parlemen pada hari Kamis (10/5/2018), situs berita T24 melaporkan.

Mosi itu diajukan oleh Partai Rakyat Demokratik yang pro-Kurdi (HDP).

“Sebuah mosi untuk mengevaluasi keputusan Parlemen untuk melakukan pembatalan atas semua perjanjian politik, ekonomi dan militer dan penganan sanksi ekonomi terhadap Israel telah ditolak oleh AKP dan MHP,” kata *tweet* dari HDP seperti diberitakan www.turkishminute.com, Rabu (15/5/2018).



“AKP akan melanjutkan hubungannya dengan Israel,” kata oposisi utama Partai Republik Rakyat (CHP), wakil ketua Ali Şener dalam *tweet*-nya, yang menggarisbawahi kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan dari partai yang berkuasa terkait kebijakan Israel dan Palestina.

Perdana Menteri Binali Yıldırım pada Selasa menyerukan negara-negara Muslim untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan Israel, sehari setelah pasukan keamanan Israel menewaskan 60 warga Palestina selama terjadinya protes di perbatasan Gaza.

“Inilah yang terjadi ketika sebuah keputusan didasarkan pada kepentingan ‘nasional Turki’ atau kepentingan orang-orang kaya yang terkait dengan pemerintah, sementara panduan dari al-Quran hanyalah untuk dibaca, bukan menjadi dasar keputusan Pemerintah,” komentar aktivis Hizbut Tahrir Inggris Taji Mustafa.

Sambut Kunjungan Dubes Amerika, Menhan Malaysia Dikecam

Baru empat hari menjabat, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu menerima kunjungan Duta Besar Amerika untuk Malaysia HE Kamala Shirin Lakhdar, Senin (21/5/2018) di Wisma Pertahanan.

Dubes AS tersebut sebelumnya sudah mengunjungi Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan mengadakan pertemuan selama sejam, namun sangat sedikit liputan berita mengenai itu.

Padahal semasa menjadi Perdana Menteri pada periode yang dulu, Mahathir terkenal lantang mengkritik negara Uncle Sam tersebut. Mohamad Sabu juga terkenal sebagai demonstran yang lantang mengutuk segala campur tangan dan kejahatan Amerika atas dunia Islam.

“Sungguh amat dikesalkan apabila Menteri Pertahanan yang dulunya sangat terkenal sebagai ‘pejuang Islam’ telah menerima kunjungan Duta Besar Amerika di kantornya malah menyambutnya dengan penuh gembira,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Malaysia Abdul Hakim Othman dalam pers rilisnya, Sabtu (26/5/2018).

Padahal, lanjut Abdul Hakim, Amerika merupakan negara kafir yang sedang memerangi dan memusuhi umat Islam secara nyata (*Ad-Dawlah Al-Kâfirah al-Harbiyah al-Muharibah bi al-Fi’l*).

Amerika merupakan negara teroris, malah merupakan teroris nomor satu dunia. Amerika

telah membunuh puluhan ribu, jika tidak ratusan ribu kaum Muslimin. Justru, Menteri Pertahanan tidak sepatutnya menerima kunjungan tersebut dan menyatakan penolakannya dengan jelas.

“Inilah pesan yang kita perlu sampaikan kepada kerajaan Amerika bahwa kita (umat Islam) tidak akan menerima bentuk persahabatan dan kerjasama apa pun dengan teroris Amerika selagi Amerika ‘tidak bertaubat’ dari segala kejahatannya terhadap umat Islam dan negeri kaum Muslimin,” tegas Abdul Hakim.

Lebih disesalkan lagi, penerimaan Dubes Amerika itu ketika Amerika baru saja memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Tindakan ini memberikan tamparan yang cukup hebat kepada Dunia Islam dan merupakan sebuah penghinaan oleh Amerika terhadap kaum Muslim di seluruh dunia.

“Apatah lagi lebih 50 dari warga Tanah yang Diberkati (Palestina) dilaporkan terbunuh dan ribuan yang lain cedera akibat teror dari tentera Yahudi tatkala warga Tanah Yang Diberkati (Palestina) melakukan protes terhadap perpindahan tersebut. Pada saat inilah Menteri Pertahanan Malaysia menerima kunjungan duta Amerika dengan senyuman lebar!,” beber Abdul Hakim.

Abdul Hakim mengingatkan kunjungan diplomatik bermanis muka tersebut merupakan cara awal Amerika untuk menjinakkan negara mana saja termasuk Malaysia.

“Wahai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan! Kami dengan ini mengingatkan Anda agar sentiasa berhati-hati dengan agenda, hipokrasi dan tipu daya Amerika, walaupun dengan hanya sebuah kunjungan! Anda hendaklah berlaku keras terhadap orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah SWT, musuh Rasul-Nya saw. dan musuh kaum Mukmin, dan hendaklah berkasih sayang dengan orang-orang Mukmin,” seru Abdul Hakim seraya mengutip al-Quran Surat al-Fath Ayat 29: *Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.* [Joko Prasetyo]



M. Ismail
Yusanto:

MAKAR JAHAT MEREKA PASTI GAGAL

Pengantar Redaksi:

Khilafah terus-menerus jadi sorotan pihak-pihak yang phobia terhadap Islam. Tentu dengan segala label negatifnya. Dikatakan: Khilafah radikal, Khilafah memecah-belah, Khilafah menginspirasi terorisme, Khilafah anti Pancasila, Khilafah mengancam NKRI dan seabrek julukan negatif lainnya.

Betulkah demikian? Jika tidak, mengapa banyak tuduhan negatif terhadap ide Khilafah? Mengapa ide Khilafah seolah demikian menyeramkan? Mengapa para pengusung ide Khilafah banyak dipersekusi? Apa latar belakang di balik semua itu? Bagaimana pula kita menyikapi semua tuduhan tersebut?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan kepada Ustadz M. Ismail Yusanto dalam Hiwar kali ini. Berikut jawaban beliau.

Ada yang menuduh Khilafah sebagai ajaran radikal yang menginspirasi terorisme. Bagaimana menurut Ustadz?

Ini jelas tuduhan sangat keji. Dua istilah tersebut, yakni *radikal* dan *terorisme*, merupakan istilah bermuatan negatif. Bahkan terorisme sering disebut sebagai *extraordinary*

crime, kejahatan luar biasa. Jadi jelas, melekatkan Khilafah dengan radikalisme dan terorisme merupakan propaganda busuk untuk memusuhi Islam.

Mengapa demikian?

Karena Khilafah adalah ajaran Islam. Hukumnya wajib. Tidak ada seorang ulama pun yang menyelisih kewajiban ini. Dalil tentang kewajiban Khilafah sangat banyak, jelas dan tegas. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami, para sahabat Nabi saw. telah menjadikan pengangkatan khalifah pasca Nabi saw. wafat sebagai *ahamm al-wâjibât*, kewajiban paling penting. Buktinya, mereka lebih mendahulukan urusan pengangkatan khalifah dibandingkan dengan pemakaman jenazah beliau.

Khilafah juga sering disebut sebagai *tâj al-furûdh*, mahkota kewajiban. Pasalnya, banyak kewajiban dalam syariah yang pelaksanaannya bergantung pada keberadaan Khilafah. Ketika Khilafah tidak ada, hukum-hukum tersebut terlantar dan terabaikan; termasuk kewajiban menegakkan hukum-hukum *hudûd*, *jinâyât* dan *ta'zîr*. Demikian juga kewajiban jihad. Berbagai hukum terkait dengan sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, politik luar negeri, dan lain-lain juga hanya bisa dijalankan secara sempurna ketika ada Khilafah.

Oleh karena itu, menyebut Khilafah sebagai ajaran radikal yang menginspirasi terorisme adalah penghinaan terhadap Islam. Islam dianggap sebagai kejahatan, bahkan menginspirasi kejahatan luar biasa. Apakah kita menerima tuduhan keji seperti itu?

Mengapa harus Khilafah yang mereka sebut sebagai ajaran radikal?

Karena mereka tahu persis bahwa Khilafah inilah yang akan menjadikan umat Islam bangkit kembali. Ketika Islam ditegakkan secara *kâffah* akan terwujud rahmatan lil al-'alamin.

Peradaban Islam akan dilihat kebaikannya secara kasatmata. Tentu sangat kontras dengan peradaban Barat yang rusak. Karena itu tegaknya Khilafah adalah lonceng kematian bagi peradaban Barat.

Dengan Khilafah umat Islam juga akan kembali bersatu. Ketika itu terjadi, akan menjadi kekuatan raksasa. Barat yang sekarang dengan semena-mena menumpahkan darah umat Islam, menjarah kekayaan mereka dan menjajah negerinya akan mudah dikalahkan. Alhasil, tegaknya Khilafah akan mengakhiri dominasi mereka.

Tentu ini sangat menakutkan mereka. Maka dari itu, mereka menciptakan berbagai makar jahat untuk menghalangi kembalinya Khilafah. Di antara caranya adalah dengan menciptakan stigma buruk tentang Khilafah. Harapannya, umat Islam sendirilah yang akan menolak kehadiran kembali Khilafah.

Namun demikian, kita yakin bahwa makar jahat mereka itu akan gagal. Pasalnya, pemahaman umat bahwa Khilafah adalah ajaran Islam semakin meluas dan menguat. Ketika pemahaman ini telah diterima oleh umat, maka mereka tidak akan mudah tertipu oleh propaganda Barat. Sebaliknya, mereka akan melawan siapa pun yang menfitnah agamanya.

Bagaimana Islam memandang tindak terorisme?

Islam tidak mengenal terorisme. Apalagi dilakukan kepada penduduk sipil yang tidak berdosa. Islam melarang keras.

Dalam Islam memang ada ajaran jihad. Namun, jihad jelas bukan terorisme. Jihad adalah perang di jalan Allah SWT. Tujuannya mencari ridha Allah SWT. Karena itu dalam pelaksanaannya pun tidak akan menghalalkan semua cara. Ada sejumlah ketentuan yang harus ditaati. Sebagai contoh, ketika Rasulullah saw. memberangkatkan pasukannya, beliau

berpesan kepada pasukannya agar tidak membunuh anak-anak, perempuan dan orangtua yang tidak terlibat dalam peperangan.

Sangat jauh berbeda dengan Amerika dan negara-negara kafir penjajah lainnya ketika memerangi bangsa lain. Tanpa rasa belas kasihan mereka menjatuhkan bom-bom yang memakan korban jutaan penduduk sipil. Lihat apa yang terjadi pada Perang Dunia I dan II. Juga ketika Amerika menjatuhkan bom atom di Jepang. Berapa juta orang yang meregang nyawa. Ini juga yang dialami oleh penduduk Afghanistan, Irak, Suriah, Palestina dan lain-lain.

Jika mau jujur, merekalah teroris sebenarnya. Mestinya tidak layak mereka bicara memerangi terorisme. Bagaimana bisa dikatakan memerangi terorisme, sementara di tangan mereka jutaan manusia meregang nyawa karena kebrutalan mereka.

Ada yang mengatakan, ada kesamaan ide HTI dengan para pelaku teror. Sama-sama mengusung ide Khilafah. Karena itu HTI dianggap menginspirasi terorisme. Benarkah demikian?

Lagi-lagi, ini adalah fitnah sangat keji. Masak hanya dianggap mengusung ide Khilafah lantas dituduh sebagai sebagai inspirator? Kalau dituduh inspirator, tunjukkan mana ide yang dianggap menginspirasi itu? HTI sama sekali tidak menyerukan aksi terorisme. Untuk menegakkan Khilafah, dengan jelas dan tegas Hizbut Tahrir membatasi kegiatannya dengan dakwah. Tidak menempuh jalan kekerasan. Non-kekerasan adalah di antara prinsip penting Hizb sejak didirikan. Prinsip ini tidak pernah berubah dan berlaku di seluruh dunia. Maka dari itu HTI sama sekali tidak pernah melakukan aksi kekerasan, termasuk saat melakukan aksi-aksi demonstrasi. Semuanya dijalankan secara damai. Tidak ada kegiatan yang merusak, membakar atau

membuat kerusakan.

HTI juga menolak keras aksi terorisme yang dilakukan dalam wilayah damai. Oleh karena itu, setiap ada aksi terorisme di Indonesia, HTI hampir selalu mengeluarkan pernyataan resmi yang mengcam aksi tersebut. Lalu bagaimana mungkin ada orang melakukan kekerasan, kemudian HTI dipersalahkan karena dianggap menginspirasi?

Ya, karena idenya sama. Sama-sama menginginkan Khilafah?

Kalau cara berpikir itu digunakan secara konsisten untuk semuanya, sungguh sangat berbahaya. Saya kira mereka juga tidak akan setuju. Sebagai contoh, kalau ada seorang ketua umum sebuah parpol setiap hari mengatakan, "Saya Pancasila, Saya Indonesia," kemudian terbukti menjadi koruptor. Apakah orang lain atau organisasi lain yang memiliki slogan yang sama bisa dituduh ikut terlibat dalam korupsi itu hanya karena dianggap memiliki ideologi yang sama? Saya yakin mereka pasti akan menolak.

Ada juga yang menuding pelaku teror pernah mengaji di HTI atau pernah menjadi anggotanya?

Ini juga *ngaco*. Kalau begitu cara berpikirnya, maka ketika ada orang korupsi, mencuri, merampok, membunuh, atau kejahatan lainnya, tidak hanya pelakunya yang dipersalahkan. Sekolah atau universitas tempat dia belajar sebelumnya juga harus dipersalahkan. Dianggap ikut terlibat.

Tapi kan lembaga pendidikan itu tidak menyuruh melakukan kejahatan?

Ya, sama. HTI juga tidak pernah menyuruh mereka melakukan teror. Bagaimana bisa ikut dipersalahkan.

Kalau pernah menjadi anggota?

Itu artinya, *kan* mantan. Justru itu menunjukkan bahwa ada ketidaksamaan antara HTI dan orang tersebut. Sangat mungkin, perbedaannya dalam soal penggunaan kekerasan sehingga dia keluar atau dikeluarkan dari HTI.

Selain itu di mana-mana mantan tidak boleh dikaitkan dengan organisasi sebelumnya. Sebagai contoh, Surya Paloh dulunya pengurus Golkar. Kemudian dia keluar mendirikan Partai Nasdem. Pertanyaannya: apakah ketika dia bermasalah, Golkar yang menjadi organisasi dia sebelumnya ikut dipermasalahkan?

Pernyataan ini sering di ulang-ulang, benarkah ada ide Khilafah ala HTI?

Ini juga bagian dari makar jahat untuk menghalangi tegaknya Khilafah. Setelah tak bisa mengelak bahwa Khilafah ajaran Islam, lalu dibuat lapis penghalang berikutnya, yakni menolak Khilafah 'ala HTI'. Mereka berkata, "Kami mengakui Khilafah adalah ajaran Islam, tetapi bukan Khilafah versi HTI."

Dengan menyebut 'ala atau versi HTI', mereka ingin menunjukkan bahwa pemahaman HTI tentang Khilafah itu menyimpang, berbeda dengan yang lain, dan tidak *mu'tabar*.

Ini jelas tuduhan tak berdasar. Tunjukkan mana Khilafah versi HTI yang dianggap menyimpang dan berbeda dengan pendapat ulama *mu'tabar*?

Mereka mengatakan, mengangkat khalifah tidak harus dengan mendirikan Khilafah. Seorang presiden di sebuah negara republik bisa dianggap sebagai seorang khalifah. Bagaimana menurut Ustadz?

Pendapat ini justru yang menyimpang dari dalil-dalil dalam al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas *Syar'i*; juga penjelasan para ulama *mu'tabar*.

Sedikit saja jelaskan, istilah *khilafah* itu

berasal dari Rasulullah saw. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang memberitakan periodisasi kepemimpinan umat Islam. Sesudah masa *Nubuwwah*, umat Islam akan mengalami era Khilafah '*ala minhâj an-nubuwwah*. Kemudian *mulk[an] 'adhdhan*, kekuasaan yang menggigit. Setelah itu *mulkan jabariyyah*, kekuasaan diktator. Setelah itu berakhir, kemudian akan kembali lagi Khilafah '*ala minhâj an-nubuwwah*. Ini menunjuk pada sistem pemerintahannya.

Demikian pula istilah *khalifah*, juga disebutkan oleh Rasulullah saw dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah saw. menyebut sepeninggal beliau yang memegang pengaturan urusan umat Islam adalah para khalifah. Beliau bersabda: *wa satakûnu khulafâ'a fa taktsur*, dan akan ada para khalifah, jumlahnya sangat banyak.

Alhasil, kedua istilah itu lekat. Tidak bisa dipisahkan. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagai contoh, Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*-nya mengatakan bahwa adalah khalifah pemangku jabatan dalam Khilafah. Tugas utamanya adalah menegakkan Islam. Semua ulama *mu'tabar* sepakat bahwa mengangkat seorang khalifah itu hukumnya wajib. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihinya.

Apakah benar para ulama terdahulu mendukung ide Khilafah berdasar akal dan hawa nafsu?

Ini juga tuduhan keji terhadap para ulama. Para ulama *mu'tabar* itu mendasarkan pendapatnya pada dalil syariah. Imam al-Nawawi *rahimahullâh*, misalnya, mengatakan para ulama sepakat tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah. Kemudian beliau tegaskan: *wa wujûbuhu bi al-syar'i lâ bi al-aql*; dan kewajiban tersebut berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.

Menyebut para ulama terdahulu

mendukung ide khilafah karena akal dan hawa nafsu merupakan sikap lancang terhadap mereka.

Benarkah para ulama mendukung Khilafah karena saat itu dianggap sebagai pegawai Khilafah sehingga wajar kalau mendukung Khilafah?

Ini *kan* membayangkan para ulama seperti dirinya. Kalau dia tidak setuju dengan pendapat para ulama tersebut, silakan tunjukkan dalil yang lebih kuat. Namun, jika tidak bisa, jangan menuduh para ulama *mu'tabar* dengan tuduhan hina itu. Sebab, mengatakan ulama mendasarkan pendapatnya dengan akal dan hawa nafsu, dan realitas saat itu, sama dengan menuduh para ulama itu menjual agamanya untuk kepentingan dunia.

Orang yang berjuang menegakkan Khilafah di tuduh justru memberontak kepada Allah SWT. Benarkah demikian?

Ini pertanyaan sangat aneh. Menegakkan Khilafah adalah perintah Allah SWT, bagaimana orang yang mengerjakan perintah itu bisa disebut memberontak kepada-Nya? Sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat.

Mestinya sebutan memberontak kepada Allah SWT itu lebih tepat disematkan kepada orang yang menolak, menghalangi dan memusuhi Khilafah.

Khilafah disebut sebagai label penguasa. Akhirnya, Donald Trump disebut sebagai Khalifah dunia saat ini. Benarkah demikian?

Ini lebih aneh lagi. Dari segi apa pun tidak bisa diterima. Para ulama sepakat bahwa salah satu syarat seorang khalifah itu adalah Muslim. Bagaimana Trump bisa disebut sebagai khalifah pada hal dia jelas-jelas kafir.

Seperti saya katakan tadi, tugas utama khalifah adalah menerapkan syariah. Trump

Dengan menyebut 'ala atau versi HTI', mereka ingin menunjukkan bahwa pemahaman HTI tentang Khilafah itu menyimpang, berbeda dengan yang lain, dan tidak *mu'tabar*. Ini jelas tuduhan tak berdasar. Tunjukkan mana Khilafah versi HTI yang dianggap menyimpang dan berbeda dengan pendapat ulama *mu'tabar*?

adalah presiden Amerika, sebuah negara Kapitalis dan imperialis. Bukan hanya tidak menerapkan Islam, Amerika memusuhi Islam dan memerangi kaum Muslim. Lalu bagaimana mungkin presidennya bisa disebut khalifah?

Bagaimana menyikapi orang yang menolak ide Khilafah ini, Ustadz?

Kita harus bersabar untuk terus menyampaikan kewajiban agung ini. Bisa jadi penolakan itu disebabkan ketidaktahuan. Semoga dengan kesabaran untuk terus menyampaikan, suatu saat akan berubah. Prinsipnya, harus terus bersabar, apa pun yang terjadi. Terus istiqamah meniti dakwah ini. Semoga Allah SWT segera menurunkan pertolongan-Nya kepada orang-orang yang menolong agama-Nya. []



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BAGAIMANA MENYIKAPI FATWA?

Soal:

Bagaimana kedudukan fatwa yang “mengharamkan yang wajib” atau “menghalalkan yang haram”? Apakah fatwa tersebut mempunyai nilai, khususnya dalam konteks hukum syariah? Apakah diakui sebagai hukum syariah, atau tidak?

Jawab:

Pertama-tama, kaum Muslim harus paham, bahwa hukum syariah adalah seruan Pembuat syariah, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama:

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ هُوَ خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُنْتَلَقُ
بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ، إمَّا بِالْإِقْتِضَاءِ، أَوْ التَّحْيِيرِ، أَوْ
الْوَضْعِ.

Hukum syariah adalah seruan Pembuat syariah yang terkait dengan perbuatan manusia, baik yang terkait dengan tuntutan (melakukan atau meninggalkan perbuatan), pilihan atau wadh'i.

Karena hukum syariah adalah seruan Pembuat syariah maka hukum syariah harus bersumber dan digali dari dalil syariah. Karena itu dalil syariah disebut oleh para ulama sebagai *hujjah* yang membuktikan bahwa hukum tertentu merupakan hukum syariah. Dengan demikian, tanpa adanya dalil syariah yang menjadi sumber dari hukum tertentu, hukum tersebut tidak bisa disebut hukum syariah.

Dalil syariah itu sendiri ada empat yaitu:

al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. Ini yang disepakati. Adapun yang lain seperti *Mashâlih Mursalah*, *Istihsân*, Ijtihad Sahabat, dan lain-lain adalah apa yang diklaim sebagai dalil, tetapi sesungguhnya tidak layak disebut daill. Pasalnya, keberadaannya tidak bisa dibuktikan dengan dalil *qath'i*, atau wahyu. Adapun empat dalil yang telah disepakati, semuanya bisa dibuktikan dengan dalil *qath'i*, atau wahyu.

Mengenai dalil syariah yang telah disepakati pun masih bisa dipilah menjadi dua, ada yang sumbernya *qath'i*, dan ada yang *zhanni*.

Mengenai al-Quran, tidak ada perselisihan, tentang sumbernya, yaitu dari Allah. Karena itu dari aspek sumber (*tsubûl*), al-Quran statusnya *qath'i* meski maknanya bisa *qath'i* dan bisa *zhanni*.

Adapun as-Sunnah, dari aspek *tsubûl*, statusnya ada yang *qath'i*, seperti Hadis Mutawatir, dan ada yang *zhanni*, seperti Hadis Ahad. Maknanya juga demikian, bisa *qath'i* dan bisa *zhanni*. Begitu juga dengan Ijmak Sahabat dan Qiyas.

Inilah yang disebut dalil syariah.

Adapun yang lain, selain empat dalil di

atas, sebagian ulama menyebut dengan istilah *Syubhat ad-Dalil*, merujuk pada sumber dari dalil-dalil yang masih diperselisihkan itu. Istilah *Syubhat ad-Dalil* bisa juga merujuk pada isi (redaksi) dalil ketika ada redaksi yang lebih dominan maknanya (*ghâlib*) justru tidak diambil, malah mengambil yang maknanya lemah (*maghlûb*).¹

Kembali pada pertanyaan di atas, bagaimana status fatwa yang “mengharamkan yang wajib” atau “menghalalkan yang haram”? Fatwa seperti ini ada beberapa kemungkinan. *Pertama*: Jika fatwa tersebut didasarkan pada dalil syariah berarti ada kemungkinan dua atau lebih dalil syariah yang bertabrakan (*ta’ârudh*) sehingga kesimpulan hukumnya bisa berbeda, bahkan kontradiksi. Dalam konteks seperti ini, harus diteliti, benarkah karena dua dalil tersebut sama-sama *qath’i*, sama-sama umum dan satu sama lain bertentangan (*ta’ârudh*)? Jika iya, kemungkinannya hanya satu, yaitu salah satu pasti di-*naskh* (*mansûkh*). Contoh firman Allah SWT:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah [2]: 275).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ

الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan semua sisa-sisa riba jika kalian beriman (QS al-Baqarah [2]: 278).

Dua nas di atas jelas bertentangan dengan nas berikut ini:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

مُضَاعَفًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Wahai orang yang beriman, janganlah kalian

memakan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kalian kepada Allah. Semoga kalian beruntung (QS Ali Imran [3]: 130).

QS Ali ‘Imran ayat 130 ini masih membolehkan riba jika tidak banyak. Yang diharamkan adalah yang berlipat ganda. Padahal nas sebelumnya—QS al-Baqarah (2) ayat 275 dan 278—mengharamkan riba secara umum, baik yang banyak maupun sedikit. Karena itu kedua nas ini jelas berbenturan. Karena sama-sama *qath’i* dan umum, maka QS Ali Imran (3) ayat 130 ini dihapus (*mansûkh*) dan tidak berlaku lagi. Dengan begitu QS Ali Imran (3) ayat 130 ini tidak bisa digunakan sebagai dalil, yang membolehkan riba. Jika ada fatwa yang dibangun dengan dalil seperti ini jelas tidak mempunyai nilai sedikit pun. Dengan kata lain, fatwa tersebut tidak dianggap sebagai hukum syariah. Ini kemungkinan pertama.

Jika dalil yang bertabrakan itu tidak sama-sama umum, ada kemungkinan yang satu umum, dan yang satu lagi khusus, sehingga bisa dikompromikan, dan tidak bertentangan. Misalnya, firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

Wahai orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian (QS al-Maidah [5]: 1).

Ayat ini dipertentangkan dengan dalil-dalil yang mewajibkan adanya Khilafah dan Khalifah. Padahal dalil-dalil tersebut tidak saling bertentangan. Justru sebaliknya. Pengangkatan Khalifah dilakukan dengan baiat. Baiat itu sendiri bagian dari akad sukarela (*‘aqd murâdhah*) yang dilakukan rakyat kepada Khalifah. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, ketika QS al-Maidah (5) ayat 1 ini digunakan dalam konteks memenuhi akad, yang hukumnya wajib, maka memenuhi akad baiat kepada Khalifah jelas wajib. Lalu di mana



pertentangannya?

Nah, pertentangannya terjadi ketika konteks akad dalam QS al-Maidah (5) ayat 1 digunakan untuk menjustifikasi “akad-akad” yang menyalahi hukum syariah, seperti kesepakatan untuk terikat dengan Sekularisme, Liberalisme, bahkan hukum warisan penjajah yang jelas bertentangan dengan Islam. Padahal konteks QS al-Maidah (5) ayat 1 jelas tidak bisa ayat digunakan untuk ini. Namun, keumuman “akad-akad” tersebut diperkosa untuk memenuhi “birahi” mereka. Di sinilah kesalahannya.

Kesalahan *kedua*, nas yang sama dibenturkan dengan kewajiban untuk menegakkan Khilafah dan mengangkat Khilafah.

Karena itu, dari aspek dalil, sebenarnya tidak ada benturan. Yang ada adalah memperkosa dalil untuk memenuhi “birahi” mereka. Karena itu fatwa seperti ini tidak mempunyai nilai sedikit pun dalam Islam.

Nah, pertentangannya terjadi ketika konteks akad dalam QS al-Maidah (5) ayat 1 digunakan untuk menjustifikasi “akad-akad” yang menyalahi hukum syariah, seperti kesepakatan untuk terikat dengan Sekularisme, Liberalisme, bahkan hukum warisan penjajah yang jelas bertentangan dengan Islam. Padahal konteks QS al-Maidah (5) ayat 1 jelas tidak bisa ayat digunakan untuk ini.

Kemungkinan *ketiga*, tidak berbenturan, tetapi dalil-dalil syariah tersebut dikalahkan oleh kaidah yang diklaim sebagai kaidah syariah, seperti:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.

Kaidah ini digunakan untuk membatasi (*taqyîd*) atau men-*takhshîsh*, atau tepatnya mengalahkan dalil-dalil yang menyatakan kewajiban menegakkan Khilafah dan mengangkat Khilafah. Karena itu, menurut pengakuan mereka, mereka tidak menolak Khilafah, tetapi Khilafah saat ini tidak relevan. Apalagi upaya menegakkan Khilafah bisa menimbulkan kerusakan, dan seterusnya. Itu berbagai dalih yang mereka gunakan. Lebih mengerikan lagi, apa yang jelas-jelas wajib berubah jadi haram, dengan menggunakan kaidah ini.

Sebagaimana dalam *Soal-Jawab* sebelumnya, kaidah ini bukan dalil syariah. Dengan demikian kaidah ini tidak bisa digunakan untuk membatasi (*taqyîd*) atau men-*takhshîsh* dalil-dalil syariah yang ada. Karena itu kesimpulan hukum yang dibangun dengan menggunakan kaidah ini tidak bisa dianggap sebagai hukum syariah sehingga tidak mempunyai nilai sedikit pun dalam konteks syariah.

Selain itu, dengan kaidah ini, bisa ditarik kesimpulan sebaliknya, bahwa dengan alasan maslahat, sistem yang tidak islami, yang seharusnya haram diterapkan, akhirnya boleh, dengan alasan mencegah kerusakan, dan mewujudkan kemaslahatan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah melanggengkan hukum dan sistem kufur yang bertentangan dengan Islam.

Kemungkinan lain adalah klaim ijtihad baru.

Pertanyaannya, bolehkah ada ijtihad baru yang menyalahi dalil syariah? Jawabannya jelas tidak boleh.

Para ulama sepakat, ijtihad tidak boleh dilakukan ketika ada dalil. Misalnya, dalil tentang kewajiban menegakkan Khilafah dan mengangkat Khalifah jelas ada. Mulai dari al-Quran, as-Sunnah hingga Ijmak Sahabat, baik dengan *dalâlah manthûq* maupun *mafthûm*. Secara *qath'i*, sistem ini telah berdiri dan bertahan hingga 14 abad sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Islam, bagaimana mungkin dianggap tidak ada? Karena itu justru kalau ada klaim ijtihad, yang menyatakan menegakkan Khilafah dan mengangkat Khalifah tidak wajib, maka ijtihad seperti ini wajib ditolak, dan tidak mempunyai kedudukan sama sekali dalam hukum Islam.

Dalam kaidah ushul juga telah dinyatakan:

لَا إِجْتِهَادَ عِنْدَ وُجُودِ النَّصِّ

Tidak boleh ada ijtihad ketika ada nas yang menyatakannya.

Dengan demikian, dari berbagai aspek, fatwa seperti ini tidak mempunyai kedudukan dalam hukum Islam karena tidak mempunyai pijakan dan sumber dalil syariah. Kalaupun tampak menggunakan dalil syariah, dalil tersebut digunakan tidak sesuai dengan konteksnya. Tepatnya, dalil tersebut diperkosa untuk memenuhi “birahinya” demi melanggengkan sistem kufur. Inilah yang diingatkan oleh Nabi saw.:

«أَخَوْفُ مَا أَخَافَ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلَيْهِمُ
اللسان»

Yang paling aku takutkan akan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lisannya pandai beralih (HR Ahmad).

Semoga Allah SWT menyelamatkan umat

Para ulama sepakat, ijtihad tidak boleh dilakukan ketika ada dalil. Misalnya, dalil tentang kewajiban menegakkan Khilafah dan mengangkat Khalifah jelas ada. Secara *qath'i*, sistem ini telah berdiri dan bertahan hingga 14 abad sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Islam, bagaimana mungkin dianggap tidak ada? Karena itu justru kalau ada klaim ijtihad, yang menyatakan menegakkan Khilafah dan mengangkat Khalifah tidak wajib, maka ijtihad seperti ini wajib ditolak, dan tidak mempunyai kedudukan sama sekali dalam hukum Islam.

Nabi Muhammad saw. dari orang-orang seperti ini. *Wallâhu a'lam.* []

Catatan kaki:

¹ *Syubhat ad-Dalil* dalam konteks makna, ketika ada makna yang lebih kuat [*ghalib*] tidak diambil, justru mengambil makna yang lebih lemah [*maghlub*]. Contoh, penggunaan konotasi hadis *Muzara'ah*. Hadis ini digunakan oleh Imam Syafii sehingga *Muzara'ah* boleh. Padahal konotasi ini lemah dibandingkan dengan konotasi *Musaqat*. Ini didukung riwayat Aisyah yang menyatakan, bahwa istri-istri Nabi saw. mendapatkan buah-buahan dari hasil panen Tanah Khaibar. Artinya, Tanah Khaibar ditanami pohon, bukan biji-bijian, seperti gandum, dan lain-lain. Kalau pun ada, tanaman tersebut seperti tumpang sari. Bukan tanaman utama. Karena itu konotasi yang kuat [*ghalib*] adalah kebolehan *Musaqat*, bukan *Muzara'ah*. Bagi yang menggunakan hadis tersebut sebagai dalil kebolehan *Musaqat*, maka statusnya menggunakan *Dalil*, bukan *Syubhat ad-Dalil*. Berbeda dengan Imam Syafii, atau Mazhab Syafii, yang menggunakan konotasi *Muzara'ah*, maka penggunaan konotasi seperti ini masuk dalam kategori menggunakan konotasi yang lemah [*maghlub*]. Karena itu, bisa disebut menggunakan *Syubhat ad-Dalil*, bukan *Dalil*.



TAKWA

Ramadhan telah berlalu. Idealnya, setelah melewati masa-masa “training” sebulan penuh selama Ramadhan, setiap Muslim menjadi “sosok baru”. Berbeda antara sebelum Ramadhan dan setelah Ramadhan. Setelah Ramadhan ia makin rajin beribadah. Ia melakukan banyak shalat sunnah, shaum sunnah, berzikir dan *bertaqarrub* kepada Allah SWT, dll. Ia makin banyak bersedekah dan makin berakhlakul karimah. Ia makin rajin menuntut ilmu. Ia makin giat berdakwah dan beramal makruf nahi mungkar. Demikian seterusnya. Sebaliknya, ia pun makin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Singkatnya, ia makin bertakwa kepada Allah SWT.

Takwa inilah yang menjadi “buah” dari shaum yang ia jalani selama sebulan penuh selama Ramadhan (QS al-Baqarah [2]: 183). Jika itu yang berhasil ia raih, berarti shaumnya benar. Sebaliknya, jika tidak, berarti shaumnya selama Ramadhan hanyalah sekadar menahan rasa lapar/haus semata. Demikian sebagaimana yang diisyaratkan Baginda Nabi saw. (HR Ahmad dan ad-Darimi).

Berbicara tentang *takwa*, Baginda Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Muadz bin Jabal ra. saat beliau mengutusnyanya ke Yaman, “*Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun/kapanpun/dalam keadaan*

bagaimanapun...” (HR at-Tirmidzi).

Terkait frasa *ittaqilLâh* (*bertakwalah engkau kepada Allah*) dalam potongan hadis di atas, banyak ulama mendefinisikan kata *takwa*. Umumnya *takwa* mereka maknai dengan: *melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya serta menetapi hukum-hukum-Nya*. Dengan kata lain, hakikat *takwa* adalah sebagaimana dinyatakan oleh Hasan al-Bashri dan Umar bin Abdul Aziz, yakni: *menjauhi semua yang Allah larang dan melaksanakan semua yang Allah perintahkan; lebih dari itu adalah kebaikan*.

Menurut ulama salaf, *takwa* juga bisa berarti meninggalkan banyak hal yang mubah (halal) hanya karena takut terjatuh pada keharaman. Karena itu sikap *wara'* (takut terjatuh ke dalam dosa) dan takut kepada Allah, itulah hakikat *takwa*.

Masih terkait dengan *takwa*, Sayyid bin al-Musayyib pernah ditanya seseorang, “Bagaimana *takwa* itu?” Ia balik bertanya, “Bagaimana pendapatmu, jika engkau berjalan di jalanan yang penuh duri, apa yang engkau lakukan?” Orang itu menjawab, “Saya tentu akan hati-hati dan berusaha menghindari duri-duri itu agar tidak melukai kaki saya.” Sayyid bin al-Musayyib kemudian berkata, “Itulah *takwa*, yakni engkau menghindari berbagai ‘duri’ kemaksiatan.”

Adapun frasa *haytsuma kunta* maknanya adalah: *di tempat manapun kamu berada, baik dilihat manusia ataupun tidak* (Ismail bin Muhammad al-Anshari, *At-Tuhfat ar-Rabbaniyyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah*, hlm. 18).

Secara lebih rinci dapat dijelaskan, bahwa kata *haytsu* bisa merujuk pada tiga: tempat (*makan*), waktu (*zaman*) dan keadaan (*ha*). Karena itu sabda Baginda Rasul saw. kepada Muadz ra. tersebut sebagai isyarat agar ia bertakwa kepada Allah SWT tidak hanya di Madinah: saat turunnya wahyu-Nya, saat ada bersama beliau, juga saat dekat dengan Masjid Nabi saw. Namun, hendaklah ia bertakwa

kepada Allah SWT di mana pun, kapan pun dalam keadaan bagaimana pun ('Athiyah bin Muhammad Salim, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah*, 42/4-8; Al-Mubarakfuri, VI/104; Muhammad bin 'Alan ash-Shiddiqi, *Dal'il al-Falihîn*, I/164).

Alhasil, kita pun sejatinya bertakwa tidak hanya saat berada di bulan Ramadhan saja, yang kebetulan baru kita lalui, tetapi juga di luar Ramadhan selama sebelas bulan berikutnya.

Terkait takwa pula, Abu Bakar ash-Shiddiq pernah berkata, "*Akyas al-kays at-taqwâ wa ahmaq al-humqi al-fujûr*." Artinya, "Orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang cerdas adalah yang paling bertakwa. Orang yang paling bodoh di antara orang-orang bodoh adalah yang suka bermaksiat."

Apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq benar adanya. Contoh kecil, betapa banyak pejabat yang bergaji tinggi dan menikmati ragam fasilitas negara yang serba *lux* dan tentu serba gratis, masih saja terdorong untuk korupsi. Ia pun akhirnya tertangkap tangan dan masuk penjara. Ia celaka oleh perbuatannya sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena ia tidak bertakwa kepada Allah SWT. Saat ia tak bertakwa, ia tampak bodoh. Jika saja ia bertakwa, tentu ia akan memiliki sifat *qanâ'ah* dan tentu bisa bersikap cerdas; menahan diri untuk korupsi. Ia tak akan tergoda oleh sesuatu yang bisa membuat dirinya celaka sekaligus menghancurkan harga diri dan kehormatannya.

Karena itu penting kita mengamalkan perkataan sebagian ulama salaf yang berkeliling ke majelis-majelis seraya berkata, "Siapa saja yang ingin selalu mendapatkan keselamatan (di dunia dan akhirat), hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT." (Ibnu Rajab, *Ar-Rasâ'il*, 3/110).

Banyak sifat yang dilekatkan kepada orang-orang bertakwa (*muttaqîn*). Di antaranya, jika kita merujuk ayat-ayat di awal surah al-Baqarah, orang bertakwa adalah orang yang: mengimani yang gaib; mendirikan shalat;

menginfakkan sebagian harta; mengimani al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum al-Quran; meyakini alam akhirat (QS al-Baqarah [2]: 1-4).

Lalu jika kita merujuk pada ayat lain, orang bertakwa disifati dengan beberapa ciri: menginfakkan hartanya di saat lapang ataupun sempit; mampu menahan amarah; mudah memaafkan kesalahan orang lain; jika melakukan dosa segera ingat kepada Allah SWT dan memohon ampunan-Nya; tidak meneruskan perbuatan dosanya (QS Ali Imran [3]: 133-135).

Tentu masih banyak sifat orang bertakwa yang disebutkan di dalam al-Quran maupun as-Sunnah.

Selain itu takwa memiliki sejumlah tanda. Di antaranya adalah yang dinyatakan oleh al-Hasan, "Orang bertakwa memiliki sejumlah tanda yang dapat diketahui, yakni: jujur/benar dalam berbicara; senantiasa menunaikan amanah; selalu memenuhi janji; rendah hati dan tidak sombong; senantiasa memelihara silaturahmi; selalu menyayangi orang-orang lemah/miskin; memelihara diri dari kaum wanita; berakhlak baik; memiliki ilmu yang luas; senantiasa ber-*taqarrub* kepada Allah." (Ibn Abi ad-Dunya, *Al-Hilm*, I/32).

Terkait takwa pula, Zubair ibn al-Awwam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya. Di dalam surat itu dinyatakan, "Ammaba'du. Sungguh orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yakni: sabar dalam menanggung derita, ridha terhadap *qadha'*, mensyukuri nikmat dan merendahkan diri (tunduk) di hadapan hukum-hukum Alquran." (Ibn al-Jauzi, *Shifat ash-Shafwah*, I/170; Abu Nu'aim al-Asbahani, *Hilyah Awliya'*, I/177).

Semoga setelah Ramadhan ini, kita benar-benar memiliki ketakwaan paripurna, lengkap dengan segala sifat dan tanda-tanda (ciri-ciri)-nya. Amin.

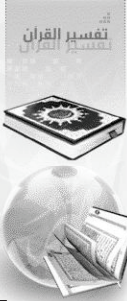
Wâ mâ tawfiqi illâ billâh. 0



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



DAHSYATNYA AZAB NERAKA

(Tafsir QS 'al-Mursalat [77]: 29-34)

انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30)

لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ

صُفُرٌ (33) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34)

(Dikatakan kepada mereka pada Hari Kiamat), "Pergilah kalian menuju azab yang dulu kalian dustakan. Pergilah kalian menuju naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka." Sungguh neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan (QS al-Mursalat [77]: 29-34).



alam ayat-ayat sebelumnya Allah SWT mengingatkan sejumlah kenikmatan yang Dia berikan kepada manusia. Kenikmatan yang disebutkan adalah bumi yang dijadikan sebagai tempat berkumpul dan berhimpun bagi manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Di bumi itu juga dijadikan gunung yang kokoh dan tinggi menjulang. Mereka pun diberi minuman air tawar yang menyegarkan. Demikian besar nikmat tersebut hingga orang-orang yang mendustakan semua nikmat itu patut mendapatkan hukuman yang berat.

Kemudian dalam ayat-ayat ini digambarkan azab yang akan diterima oleh orang-orang yang mendustakan nikmat-Nya.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Inthalaqû ilâ mâ kuntum bihi tukadzdzibûn* (Dikatakan kepada mereka pada Hari Kiamat), "Pergilah kalian menuju azab yang dulu kalian dustakan)."

Ayat ini memberitakan peristiwa yang akan dialami oleh orang-orang kafir pada Hari Kiamat. Inilah yang akan dikatakan kepada orang-orang kafir tersebut.¹ Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat-Nya sekaligus menjadi *hujjah* Allah SWT atas mereka pada Hari Kiamat."²

Ketika itu mereka diperintahkan untuk berjalan menuju tempat yang dulu merela dustakan. Sesuatu yang mereka dustakan ketika mereka masih hidup di dunia itu adalah

azab.³ Imam al-Qurthubi berkata, “Berjalanlah kalian menuju azab, yakni neraka yang dulu kalian dustakan. Sungguh kalian telah melihat dengan mata kepala.”⁴

Menurut Asy-Syaukani dan al-Alusi, perkataan ini merupakan *tawbikh[an] wa taqrî[an]* (celaan dan kecaman) terhadap mereka.⁵

Kemudian dilanjutkan: *Inthalaqû ilâ zhill[în] dzî tsalâtsi syu’ab* (Pergilah kalian menuju naungan yang mempunyai tiga cabang).

Perintah kepada mereka agar berjalan menuju azab kembali diulang dalam ayat ini. Penyebutan kata: *inthaliqû* (pergilah, berjalanlah) dalam dua tempat dengan bentuk kalimat perintah (*al-amr*) menunjukkan adanya *at-ta’kid* (penegasan).⁶ Namun demikian, menurut Syihabuddin al-Alusi, itu bukan *tikrâr* (pengulangan), tetapi *khushûsh[an]* (khususnya).⁷

Kemudian digambarkan azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir itu. Azab itu berupa *azh-zhill* (naungan) yang memiliki tiga cabang. Dalam ayat ini disebutkan: *zhill[în] dzî tsalâtsi syu’ab*

Secara bahasa, kata *azh-zhill*, yang bentuk jamaknya adalah *azh-zhilâl*, adalah sesuatu yang menaungi Anda, seperti awan dan sebagainya. *Zhill al-layl* (naungan malam) adalah hitamnya. Itu merupakan bentuk majaz *isti’ârah* karena *azh-zhill* pada hakikatnya adalah terangnya sinar matahari yang berada di bawah sinarnya. Jika tidak ada terang maka itu adalah gelap, bukan terang.⁸

Dalam konteks ayat ini, kata *azh-zhill* bermakna *ad-dukhân* (asap). Tepatnya, *dukhân Jahannam* (asap Neraka Jahanam).⁹

Menurut Imam al-Qurthubi, kata *zhill* (naungan) yang sesungguhnya adalah *ad-dukhân* (asap) itu membumbung tinggi, kemudian dia bercabang. Begitulah keadaan asap yang besar apabila naik lalu bercabang.¹⁰

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Hal itu disebabkan karena asap yang disebutkan itu naik dari baranya. Ketika telah meninggi, ia terpecah menjadi tiga bagian.”¹¹

Menurut asy-Syaukani, naungan itu merupakan asap Neraka Jahanam yang muncul, kemudian terpecah menjadi tiga bagian. Mereka terus berada di sana hingga selesai hisab atau perhitungan. Asap tersebut sangat besar sehingga ketika naik akan berpecahan menjadi beberapa bagian.¹²

Menurut az-Zuhaili, mereka berpindah dari satu azab ke azab yang lain. Azab itu mengepung mereka pada semua sisi (Lihat: QS al-Kahfi [19]: 29).

Surâdiq an-nâr (gejolak api neraka) adalah *ad-dukhân* (asap). Dengan demikian penamaan neraka dengan *azh-zhill* merupakan majaz dari aspek mengepung mereka dari semua arah, sebagaimana dalam (QS al-Zumar [39]: 16).¹³

Penggunaan kata *azh-zhillu* dengan makna *ad-dukhân* sekaligus merupakan *uslûb at-tahâkum* (gaya bahasa mengejek atau mengolok-olok). Menyebut azab dengan *azh-zhill* (naungan) merupakan *tahâkum wa sukhriyyah* (ejekan dan sindiran) kepada mereka.¹⁴

Kemudian dilanjutkan: *Lâ zhalîl[în] wa lâ yughnî min al-lahab* (yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka). Ini adalah gambaran lain tentang *azh-zhill* atau naungan bagi orang-orang kafir itu. *Azh-Zhill* (naungan) dalam ayat ini bukanlah bermakna hakiki, seperti naungan pohon atau tembok yang menaungi.¹⁵ Naungan bagi mereka itu *lâ zhalîla* (tidak menaungi). Menurut al-Alusi, makna *lâ zhalîl* adalah *lâ muzhallîl* (tidak memberikan naungan).¹⁶

Penjelasan senada juga dikemukakan Imam al-Qurthubi yang berkata, “Tidak seperti naungan yang melindungi dari terik matahari.”¹⁷

Ibnu Jarir berkata, “Naungan itu tidak

melindungi mereka dari panasnya api neraka.”¹⁸

Di dalam naungan itu tidak ada kenyamanan dan tidak ada ketenangan.¹⁹

Selain itu juga: *wa lâ yughnî min al-lahab* (tidak pula menolak nyala api neraka). Hal itu karena naungan untuk mereka itu sesungguhnya adalah asap yang tidak bisa menghalangi manusia dari *al-lahab* (kobaran api). Menurut az-Zuhaili, *al-lahab* adalah *syu'lah an-nâr* (lidah api).²⁰

Imam al-Qurthubi berkata, “*Al-Lahab* adalah bagian atas api ketika api itu berkobar, berwarna merah, kuning dan hijau).²¹

Menjelaskan ayat ini, asy-Syaukani berkata, “Tidak melindungi dari panas dan tidak menahan dari kobaran api.”

Al-Kalbi berkata, “Tidak dapat menahan panasnya api neraka dari kalian.”²²

Dengan demikian *azh-zhill* (naungan) tersebut sama sekali tidak melindungi mereka dari kobaran api neraka. Sebaliknya, kobaran itu mengepung dari sisi kiri dan sisi kanan mereka, bahkan dari seluruh penjuru, sebagaimana diberitakan dalam QS az-Zumar [39]: 16.²³

Dengan demikian ungkapan ini sesungguhnya merupakan *tahakkum* (ejekan) dan *ta'rîdh* (sindiran) kepada mereka. Pasalnya, naungan mereka berbeda dengan naungan orang-orang Mukmin.²⁴ Naungan mereka itu sebagaimana diberitakan dalam firman-Nya:

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٥٦﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَّخْمُومٍ ﴿٥٧﴾ لَا يَارِدُ وَلَا
كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

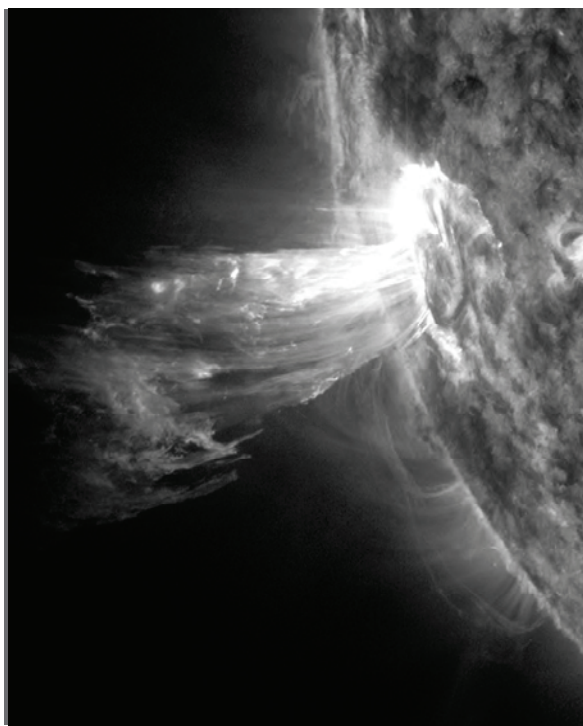
Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air panas yang mendidih serta dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan (QS al-Waqiah [56]: 42-44).

Kemudian digambarkan: *Innahâ tarmî bi*

syarar[in] ka al-qashr (Sungguh neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana).

Frasa *innahâ* adalah neraka.²⁵ Ayat ini memberitakan bahwa neraka yang menjadi tempat azab bagi orang-orang kafir itu melontarkan *asy-syarar*. Kata *syarar* merupakan bentuk jamak dari kata *syarah* (bunga api). Menurut asy-Syaukani, kata *asy-syarar* berarti api yang beterbangan dan berpecahan.²⁶

Az-Zuhaili berkata, “Api yang beterbangan di segala penjuru.”²⁷



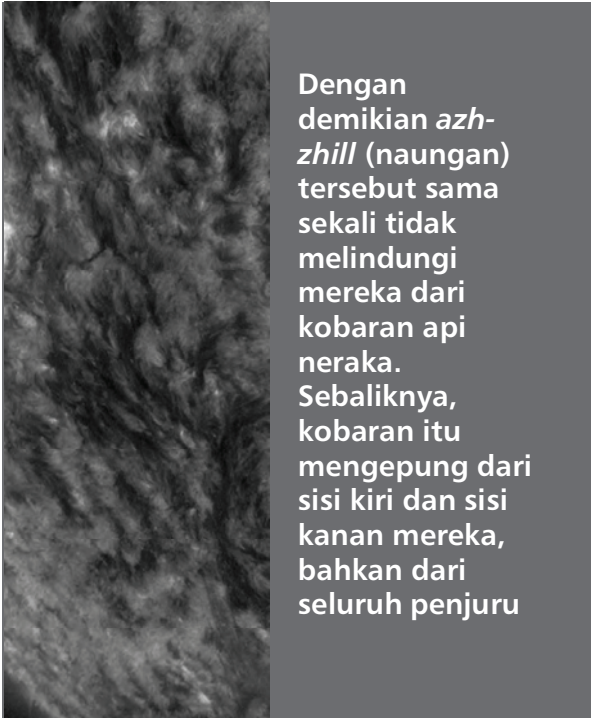
Kemudian diterangkan bahwa *syarar* yang dilontarkan oleh neraka itu seperti *al-qashr*. Secara bahasa, *al-qashr* adalah bangunan yang tinggi²⁸ atau bangunan yang besar.²⁹ Dengan demikian ayat ini menyerupakan antara *asy-syarar* kobaran api neraka dengan *al-qashr* (istana). Tidak disebutkan *wajh asy-syibh* (aspek keserupaannya). Namun, dari konteksnya dapat dipahami bahwa ada dua

aspek keserupaan pada keduanya, yakni: besar dan tinggi.³⁰

Dengan demikian ayat ini menggambarkan bahwa api yang dilontarkan dari Neraka Jahanam sangat besar.³¹

Kemudian Allah SWT berfirman: *Ka annahu jimâlat[un] shufr[un]* (Seolah-olah ia iringan unta kuning)

Ini merupakan gambaran lainnya dari kobaran api yang dilontarkan oleh neraka itu. Bentuknya seperti *jimâlatu ash-shufr* (iringan unta kuning).



Dengan demikian *azh-zhill* (naungan) tersebut sama sekali tidak melindungi mereka dari kobaran api neraka. Sebaliknya, kobaran itu mengepung dari sisi kiri dan sisi kanan mereka, bahkan dari seluruh penjuru

Kata *jimâlatu* merupakan bentuk jamak dari kata *jamâl* yang berarti *al-ibil* (unta).³² Adapun *ash-shufrah* adalah salah satu jenis warna antara hitam dengan putih, namun lebih dekat ke warna hitam. Karena itu kadang-kadang kata tersebut digunakan untuk menyebut warna hitam.³³

Pengertian tersebut juga diambil oleh sebagian mufasssir. Menurut mereka, kata *ash-*

shufr di sini bermakna *as-sûd* (hitam).³⁴

Al-Wahidi berkata, *ash-shufr* maknanya adalah *as-sûd* (warna hitam) menurut para mufasssir.”

Al-Farra' juga berkata, “*Ash-Shufr* adalah *sawâ al-ibil* (hitamnya unta). Tidak tampak warna hitam pada unta kecuali kemasukan warna kuning. Oleh karena itu, orang Arab menyebut hitamnya unta sebagai *shufr[an]* (kuning).”³⁵

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Pendapat yang benar adalah yang menyebutkan bahwa maksud frasa *jimâlatu ash-shufr* bermakna *al-ibil as-sûd* (unta berwarna hitam). Itulah makna yang populer dalam percakapan orang Arab. *Al-Jimâlât* merupakan bentuk jamak dari kata *jimâl* seperti *rijâl rijâlât* (laki-laki), dan *buyût wa buyûtât* (rumah).³⁶

Menurut ar-Razi, ini merupakan pendapat mayoritas mufasssir. Menurut mereka, yang dimaksud dengan *shufr* (warna kuning) di sini adalah *sûd* (warna hitam) yang mengenai warna kuning.³⁷

Itu menunjukkan bahwa neraka itu gelap, baik kobaran bara dan lidah apinya. Neraka itu adalah hitam, buruk dilihat dan sangat panas.³⁸

Dengan demikian kobaran api itu dalam besarnya diserupakan dengan *al-qashr* (bangunan besar dan tinggi, istana). Adapun dalam hal warna, banyak, iringan dan kecepatan gerakannya diserupakan dengan unta-unta yang berbaris-baris.³⁹

Kemudian Allah SWT berfirman: *Wayl[un] yawma 'idz[in] li al-mukadzdzibîn* (Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan). Menjelaskan ayat ini, Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Kecelakaan pada Hari Kiamat bagi orang-orang yang mendustakan ancaman yang dijanjikan Allah SWT ini kepada hamba-hamba-Nya yang mendustakannya.”⁴⁰

Wahbah az-Zuhaili berkata, “Azab dan kehinaan pada Hari Kiamat yang menegangkan untuk orang-orang yang mendustakan para

utusan Allah SWT dan ayat-ayat-Nya. Tidak ada tempat lari bagi mereka dari azab-azab itu.”⁴¹

Demikianlah. Orang-orang kafir itu akan mendapatkan kecelakaan besar pada Hari Kiamat. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan hina-dina. Mereka benar-benar akan merasakan neraka dan azab Allah SWT. Inilah yang mereka dustakan ketika mereka masih hidup di dunia. Semoga kita dijauhkan dari azab-Nya.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- ¹ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 162
- ² Ath-Thabari, *al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 136
- ³ Al-Khazin, *Lubûb al-Tâ'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 384; al-Jazairi, *Aysr al-Tafsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ullum wa al-Hikam, 2003), 495; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ûnî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 194
- ⁴ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 162
- ⁵ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 433; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ûnî*, vol. 15, 194
- ⁶ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 433
- ⁷ Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ûnî*, vol. 15, 194
- ⁸ Abu Bakar al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al0-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 196
- ⁹ Az-Zamakhshari, *al-Kasasyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1987), 680; al-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 774; al-Khazin, *Lubûb al-Tâ'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 384
- ¹⁰ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 162. Lihat juga al-Zamakhshari, *al-Kasasyâf*, vol. 4, 680; al-Khazin, *Lubûb al-Tâ'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 384
- ¹¹ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 136
- ¹² Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 433. Bahwa mereka terus berada dalam naungan tersebut hingga selesai hisab juga dijelaskan al-Alusi, *Rûh al-Ma'ûnî*, vol. 15, 194
- ¹³ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 326
- ¹⁴ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 324
- ¹⁵ Al-Jazairi, *Aysr al-Tafsîr*, vol. 5, 495
- ¹⁶ Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ûnî*, vol. 15, 194
- ¹⁷ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 162
- ¹⁸ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 136
- ¹⁹ As-Sa'di, *Taysîr al-Karim al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 904
- ²⁰ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 325
- ²¹ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 162-163
- ²² Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 433
- ²³ As-Sa'di, *Taysîr al-Karim al-Rahmân* (tt: Muassasah al-

Demikianlah. Orang-orang kafir itu akan mendapatkan kecelakaan besar pada Hari Kiamat. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan hina-dina. Mereka benar-benar akan merasakan neraka dan azab Allah SWT. Inilah yang mereka dustakan ketika mereka masih hidup di dunia.

Risalah, 2000), 904

- ²⁴ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30, 774; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ûnî*, vol. 15, 194; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 326
- ²⁵ Al-Jazairi, *Aysr al-Tafsîr*, vol. 5, 495; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 325
- ²⁶ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 433
- ²⁷ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 327
- ²⁸ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 162
- ²⁹ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 434
- ³⁰ Al-Jazairi, *Aysr al-Tafsîr*, vol. 5, 495. Lihat juga al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 324; al-Baidhawi, *Anwûr al-Tanzîl Asrâr al-Tâ'wil*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1998), 276
- ³¹ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30, 774-775
- ³² Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 434
- ³³ Asy-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharib al-Qur'ân*, 487
- ³⁴ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 434
- ³⁵ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 434
- ³⁶ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 141
- ³⁷ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30, 775. Lihat juga al-Sa'di, *Taysîr al-Karim al-Rahmân*, 904
- ³⁸ As-Sa'di, *Taysîr al-Karim al-Rahmân*, 904
- ³⁹ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30, 775. Lihat juga Lihat juga al-Baidhawi, *Anwûr al-Tanzîl Asrâr al-Tâ'wil*, vol. 5, 276; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ûnî*, vol. 15, 195; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 326-327
- ⁴⁰ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 141
- ⁴¹ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 327

Menurut istilah, musyawarah adalah mengambil pendapat atas suatu urusan dengan cara membicarakannya dengan orang lain, lalu ditetapkan sebuah kesimpulan berdasarkan aklamasi atau suara terbanyak. Musyawarah termasuk cara pengambilan pendapat. Pengambilan pendapat (*akhdu ar-ra'y*) adalah menarik pendapat atas suatu persoalan, baik dilakukan sendirian maupun secara berkelompok.

Perintah bermusyawarah disebutkan di dalam al-Quran serta ditunjukkan oleh Sunnah Nabi saw. dan para sahabat *radhiyallāhu 'anhum*. Allah SWT berfirman:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

Disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (QS Ali Imran [3]: 159).

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

(Bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sementara urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS asy-Syura [42]: 38).

Ayat di atas merupakan perintah

KETENTUAN BERMUSYARAWAH Pasal 108 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr*

Masih berhubungan dengan Majelis Umat, *Telaah Kitab* kali ini membahas Pasal 108, tentang musyawarah.

Menurut bahasa Arab, musyawarah berasal dari perkataan orang Arab, *syurtu al-'asl, idzâ akhadztuhu min mawadldihihi wastakhrajtuhu* (aku memeras madu, yakni jika aku mengambil madu dari tempatnya kemudian aku mengeluarkannya).

Asy-Syura adalah *mashdar* dari kata *syâwara*, yakni meminta pendapat dari *al-mustasyâr* (orang yang diminta pendapat atau dilibatkan dalam musyawarah). Kata *asy-syûra, al-masyûrah* dan *al-masywarah* memiliki makna yang sama. Al-Fara' berkata, "Asal dari kata *al-musyawarah* adalah *masywarah*, kemudian dikonversi menjadi *masyuarah* untuk meringankan."

Al-Laits berkata, "*Al-Masyûrah* (*maf'alah*) merupakan *musytaq* dari *al-is'yârah*.



bermusyawarah atas urusan-urusan kaum Muslim. Hanya saja, perintah bermusyawarah di sini tidaklah wajib, tetapi sunnah. Indikator (*qar'inah*) yang menunjukkan kesunnahan musyawarah adalah: *Pertama*, Allah SWT memuji kaum Mukmin yang bermusyawarahkan urusan-urusan mereka (QS asy-Syura [42]: 38). *Kedua*, Nabi saw banyak bermusyawarah dengan para sahabat dalam banyak urusan. Ini menunjukkan betapa Nabi saw. mendorong umatnya untuk bermusyawarah. Di dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa Abu Hurairah ra. berkata:

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Tidaklah aku melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah saw. (HR at-Tirmidzi).

Ketiga, perilaku Rasulullah saw. dalam bermusyawarah dengan para sahabat yang penuh kelembutan, diiringi pemaafan dan istighfar (QS Ali Imran [3]: 159).

Hukum musyawarah adalah sunnah (*mandûb*). Namun demikian, hasil musyawarah dalam perkara-perkara teknis dan tidak membutuhkan keahlian khusus serta tidak terkait dengan hukum syariah mengikat Khalifah. Khalifah wajib menjalankan keputusan Majelis Umat dalam perkara-perkara itu.

Menurut ulama tafsir, perintah untuk bermusyawarah pada QS. Ali Imran [3]: 159 sebatas pada urusan-urusan yang belum ditetapkan oleh syariah. Urusan-urusan yang telah ditetapkan oleh syariah tidak boleh dimusyawarahkan lagi. Keputusan syariah harus dilaksanakan oleh semua orang baik mereka setuju atau tidak terhadap keputusan tersebut. Allah SWT memerintahkan Nabi saw. untuk tidak terpengaruh terhadap keinginan-keinginan manusia dalam menegakkan hukum Allah SWT (QS al-Maidah [5]: 48-49).

Obyek Musyawarah

Musyawarah untuk menentukan suatu keputusan tidak bisa diberlakukan pada semua urusan. Ada urusan-urusan tertentu yang bisa diputuskan berdasarkan musyawarah. Ada pula yang tidak.

Pengambilan pendapat atas suatu masalah harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

Pertama, tidak ada musyawarah dalam masalah yang berhubungan penetapan hukum syariah dan pendapat-pendapat *syar'iyah*. Sebabnya, masalah seperti ini telah ditetapkan berdasarkan nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Pengambilan pendapat dalam masalah hukum syariah atau pendapat-pendapat *syar'iyah* harus melalui *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Penetapan hukum syariah dan pendapat-pendapat *syar'iyah* tidak boleh dilakukan dengan cara dimusyawarahkan dengan orang banyak, lalu kesimpulannya ditetapkan berdasarkan aklamasi atau suara mayoritas. Pasalnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menggali hukum syariah dari nash-nash syariah. Penetapan hukum syariah dan pendapat-pendapat syariah diserahkan sepenuhnya pada ijtihad seorang mujtahid. Jika ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum dan pendapat syariah, ia harus dikembalikan pada pendapat yang *râjih* (lebih kuat). Suara mayoritas maupun musyawarah mufakat tidak boleh diberlakukan dalam urusan-urusan semacam ini. Khalifah berhak mengadopsi salah satu hasil ijtihad seorang mujtahid untuk diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Pada saat Khalifah mengadopsi hukum syariah sebagai hukum negara, maka hukum tersebut berlaku umum bagi seluruh warga negara Khilafah.

Kedua, pengambilan pendapat dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan definisi atas suatu perkara, baik definisi yang bersifat *syari'iyah* maupun non *syari'iyah*—misalnya definisi tentang hukum syariah, masyarakat, akal dan lain sebagainya—harus didasarkan kepada



definisi yang paling sesuai dengan fakta yang hendak didefinisikan, bukan ditetapkan berdasarkan aklamasi atau suatu mayoritas. Dengan kata lain, penetapan urusan-urusan seperti ini harus dikembalikan pada pendapat ahli atau orang yang menguasai bidangnya; tidak boleh ditetapkan berdasarkan musyawarah (pengambilan pendapat dengan aklamasi atau suara mayoritas).

Ketiga, dalam urusan-urusan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, pengambilan pendapat harus dirujuk kepada orang yang memang ahli dalam masalah ini. Misalnya, untuk menetapkan obat apa yang paling mujarab untuk sebuah penyakit harus dirujuk kepada pendapat dokter ahli, bukan suara mayoritas atau aklamasi. Rasulullah saw. pernah membatalkan pendapat beliau dan mengikuti pendapat Khubaib bin Mundzir dalam urusan pertahanan perang di Badar. Ibnu Hisyam dalam *Sīrah*-nya menuturkan:

Pada saat Perang Badar Kubra, Nabi Mahammad saw. menetapkan sebuah tempat untuk bertahan menghadapi pasukan Quraisy. Hubab bin al-Mundzir bin al-Jamuh ra. bertanya kepada Nabi saw., “Wahai Rasulullah, apakah tempat ini termasuk tempat yang ditentukan Allah dan kita tidak boleh memajukan atau mengundurkannya; ataukah tempat ini ditetapkan berdasarkan pendapat, pedang dan taktik perang?”

Rasulullah saw. menjawab, “*Ini termasuk pendapat, pedang dan taktik perang.*”

Hubab bin Mundzir bin al-Jamuh pun menyampaikan usulan kepada Nabi saw, “Wahai Rasulullah, ini bukanlah tempat yang tepat. Pergilah bersama para sahabat hingga tiba di mata air yang paling dekat dengan orang-orang Quraisy. Kita berhenti di sana, kemudian kita tutup dan timbun mata air itu. Setelah itu kita bangun sebuah kolam. Kita penuhi kolam itu dengan air sehingga kita bisa berperang melawan orang-orang Quraisy dalam keadaan

kita bisa minum, sedangkan mereka tidak bisa minum.”

Rasulullah saw. bersabda, “*Sungguh, engkau menyampaikan usulan yang tepat.*”

Selanjutnya Rasulullah saw. dan para sahabat berangkat ke medan Badar. Sesampainya di mata air yang dekat dengan pasukan Quraisy, beliau berhenti, mengambil airnya, dan mengisikannya di kolam-kolam yang telah dibangun oleh kaum Muslim hingga penuh. Lalu para sahabat melemparkan timba-timba mereka ke kolam yang telah kosong tersebut. (Ibnu Hisyam, *As-Sīrah an-Nabawīyyah*, hln. 424).

Keempat, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan atau urusan-urusan teknis, pengambilan keputusan didasarkan pada aklamasi atau suara mayoritas. Hanya dalam urusan seperti inilah musyawarah bisa diberlakukan. Sebagai contoh, dalam Perang Uhud, Rasulullah saw. dan para sahabat mengambil keputusan untuk menyongsong musuh di luar kota Madinah berdasarkan suara mayoritas.

Pendapat Majelis Umat dalam urusan-urusan hukum syariah, urusan-urusan yang berhubungan dengan definisi atas suatu perkara, baik definisi yang bersifat *syar’iyyah* maupun non-*syar’iyyah* dan urusan-urusan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, tidak mengikat Khalifah. Artinya, Khalifah boleh mengambil pendapat Majelis Umat, atau menolaknya.

Adapun dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan perbuatan yang akan dilaksanakan, atau urusan-urusan teknis, maka pendapat Majelis Umat mengikat seorang Khalifah. Khalifah wajib melaksanakan pendapat atau keputusan Majelis Umat dalam urusan-urusan seperti ini.

Wallâhu al-Musta’ân wa Huwa Waliyyu at-Tawfiq. [Gus Syam]



PENCAITAN TERORISME DENGAN RADIKALISME

Terorisme menjadi isu yang paling panas pasca serangan 11 September 2001. Setelah serangan itu Amerika Serikat membuat sebuah blok internasional untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai terorisme. Dengan politik “*stick and carrot*” ini, AS memaksa dunia untuk bersama AS dengan sebuah ancaman: “*Either you are with us or with terrorist*”.

Negara di luar Amerika tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendak Amerika. Mereka tak bisa menolak “*Global War on Terrorism*” AS. Mereka bisa jadi akan diperangi oleh Amerika sebagai satu-satunya negara adidaya saat ini. Berbagai kebijakan muncul di hampir seluruh negara di dunia terkait program ini.

Peraih Hadiah Nobel Noam Chomsky dari Massachusetts Institute of Technology, AS, menyebut Amerika memanfaatkan terorisme sebagai instrumen kebijakan standar untuk memukul atau menindas lawan-lawannya dari kalangan Islam.

Isu perang melawan terorisme ini, menurut Chomsky dalam beberapa tulisannya digulirkan sejak awal 1990-an, ada jauh sebelum tragedi WTC maupun berbagai pengeboman di sejumlah kawasan di Dunia Islam. Perang

terhadap terorisme itu sebenarnya ditujukan untuk kepentingan yang luas, yakni perang terhadap Islam. Presiden AS George W Bush sejak awal perang mengisyaratkan ini dengan menyebut perang melawan terorisme adalah *Crusade* (Perang Salib).

Meskipun mengaku salah ucap, kata-kata yang senada diulangi lagi oleh Bush dan pejabat di bawahnya. Perang ini pun menjadikan Islam sebagai monster dan iblis. Tampak dari istilah-istilah berkonotasi buruk yang disandingkan dengan Islam oleh Bush untuk menamakan musuhnya seperti istilah Islam fasis, Islam radikal, atau Islam militan. Bush di depan The National Endowment for Democracy (September 2003) menyebut ideologi teroris dengan istilah “*the murderous ideology of the Islamic radical*” dan menyamakan perang ini sama dengan perang melawan Komunisme.

Seiring waktu, Amerika berusaha meluaskan sasaran dari *Global War on Terrorism* ini. Pasalnya, tindak kekerasan oleh ‘teroris’ tak membuat umat Islam menjauh dari agamanya. Justru sebaliknya, banyak kejadian terorisme meningkatkan *ghirah* Islam di berbagai negara.

Dalam situasi seperti ini, Amerika pun

memperluas wilayah perangnya ini menjadi ‘*Global War on Radicalism*’. Bagi Amerika, radikalisme dianggap sebagai benih menuju terorisme sehingga benih-benih terorisme ini harus dicabut sejak awal.

Fitnah yang Gagal

Pasca Tragedi 11 September, arah dari perang melawan terorisme itu makin jelas. Ini setelah Bush menyebutkan secara jelas ideologi Islam di balik aksi-aksi terorisme dunia internasional. Ia juga menyebut tujuan dari ideologi Islam ini, yakni mendirikan pemerintahan Islam global yang disebut oleh Bush dengan istilah ‘Imperium Islam’.

Presiden Bush dalam pidato kepada rakyatnya 8 Oktober 2005 menyebutkan, “Para militan meyakini bahwa mengendalikan satu negeri akan mempersatukan umat Islam, memungkinkan mereka menggulingkan semua pemerintahan moderat dan menegakkan imperium radikal Islam dari Spanyol hingga Indonesia.”

Pidato Bush ini mengarah pada institusi politik Islam—Khilafah Islam—yang memang bersifat global dan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukumnya. Inilah target sebenarnya dari program perang Amerika tersebut.

Tak mengherankan, Hizbut Tahrir (HT) yang berjuang menegakkan kembali institusi Islam ini menjadi sasaran *global war on terrorism* ini. Di beberapa negara, HT sempat dituding terlibat dalam berbagai aksi terorisme sehingga gerakan ini dilarang melakukan aktivitas. Namun, pengadilan tidak pernah membuktikan keterlibatan tersebut.

HT sempat juga dianggap berafiliasi ke ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) yang melancarkan perang melawan rezim Irak dan Suriah. Tudingan itu dengan sendirinya gugur setelah HT mengumumkan bahwa deklarasi khilafah oleh ISIS tidak sesuai dengan syariah.

Mata dunia kian terbuka setelah salah satu *syabab* HT di Suriah justru dibunuh dengan keji oleh ISIS. Percobaan mengaitkan HT dengan ISIS gagal. Apalagi belakangan terbukti bahwa ISIS adalah organisasi kekerasan yang dibuat Amerika untuk kepentingan politiknya di kawasan Timur Tengah.

Rupanya, pola yang sama dilakukan di Indonesia. Setiap ada aksi bom, pasti dikaitkan dengan perjuangan menegakkan Khilafah. Itu dilakukan berulang-ulang oleh para pejabat rezim. Seolah-olah dengan menyebarkan opini itu, rezim ingin mengatakan bahwa pelaku bom adalah pejuang Khilafah dan orang yang memperjuangkan Khilafah adalah teroris.

Bahkan ada seorang mantan pejabat di Indonesia dengan berani mengatakan ada 25 orang yang terlibat terorisme pernah bersinggungan dengan HT. Tuduhan itu dia sampaikan di depan majelis hakim PTUN Jakarta. Tudingan itu terbantahkan dengan sendirinya dalam persidangan tersebut. Tak ada bukti sama sekali.

Sejauh ini, HT Indonesia senantiasa mengutuk dan mengecam tindak kekerasan—termasuk aksi bom—di Indonesia. Bagi HTI, tindakan itu justru mencitraburukkan Islam dan kaum Muslim. Justru musuh-musuh Islam yang diuntungkan dengan adanya aksi kekerasan tersebut.

Walhasil, upaya mengaitkan HT dengan aksi terorisme ini gagal dilakukan. Barat sebenarnya sangat tahu sepak terjang HT. Di berbagai terbitan HT, jelas sekali bagaimana perjuangan menegakkan kembali Khilafah dilakukan. HT tak menempuh jalan kekerasan. HT bahkan mengharamkan kekerasan dalam mencapai tujuan. Jalan dakwah itu sudah dipahami oleh siapa pun yang mengamati dakwah HT di seluruh dunia. Wajar jika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tak memasukkan HT dalam daftar organisasi teroris internasional.

Senjata Baru

Aksi terorisme gagal disematkan kepada HT di seluruh dunia. Namun, bukan berarti tidak ada cara lain untuk menghentikan langkah dakwah HT ini. Dengan meluaskan wilayah peperangan (*battle ground*) *war on terrorism*, Barat menggunakan istilah lainnya yakni menyematkan HT sebagai kelompok radikal.

Legitimasi tuduhan ini setidaknya bisa dipahami dari cara pandang mereka. Dikutip Fanani dalam Rizal Sukma (2004), *radicalism is only one step short of terrorism*, bahwa pada umumnya para teroris yang melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, khususnya agama. Hal ini tampak tatkala pelaku teroris melegitimasi tindakannya dalam paham keagamaan radikal yang ia anut (Ahmad Fuad Fanani, 2012: 5).

Sebagaimana pernah dikatakan oleh mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai, radikalisme lebih berbahaya dibandingkan terorisme. Alasannya, radikalisme menjadi cikal bakal terorisme. Ia mencoba mem-*framing* opini bahwa radikalisme adalah biang terorisme sehingga orang harus dijauhkan dari paham radikal.

Hanya saja, definisi radikalisme ini tidak jelas dan multitafsir. Selalu saja rezim ini mengkonotasikan radikalisme sebagai hal yang negatif. Ini mirip seperti yang terjadi pada zaman kolonial Belanda saat menjajah Indonesia. Orang-orang Muslim yang tidak mau tunduk dan taat kepada Belanda disebut kelompok radikal. Sebaliknya, mereka yang mau bekerja sama/berkompromi dengan Belanda disebut sebagai kelompok moderat.

Pola yang sama sekarang pun digunakan. Kelompok yang tidak mau berkompromi dengan pandangan Barat yang kafir, menolak orang kafir menjadi pemimpin, menjadikan Israel sebagai musuh, ingin menegakkan

syariah dan khilafah, dianggap sebagai kaum radikal dan harus dimusuhi.

Lalu mereka meluncurkan proyek baru, yakni deradikalisasi. Benar saja, proyek baru ini mendapat dukungan dana internasional. Dana dikucurkan kepada mereka yang dianggap moderat. Melalui tangan-tangan sesama Muslim inilah Barat memainkan isu dan strategi untuk memecah-belah umat Islam sekaligus menghancurkan Islam dari dalam.

Tak tanggung-tanggung, proyek deradikalisasi itu didukung pula oleh ulama-ulama *sū'*. Mereka menjual ayat agama untuk menyerang pandangan-pandangan prinsipil para ulama masyhur yang dianggap pro terhadap radikalisme. Tanpa malu-malu, melalui para intelektual pelacur, mereka menyerang ajaran Islam yang dianggap tak sesuai dengan cara pandang Barat. Tak jarang para intelektual Muslim penjual ayat ini menafsirkan ayat al-Quran dan al-Hadis secara serampangan, mengikuti maunya sendiri.

Lagi-lagi, kepada HT, mereka sematkan cap radikal pula. Dalihnya, HT mempunyai prinsip-prinsip yang bertentangan dengan paham-paham Barat serta ingin membangun institusi Islam, yakni Khilafah.

Menjegal Islam

Pada awal tulisan ini telah disinggung bahwa ujung dari proyek GWOT ataupun GWOR adalah Islam. Dalam konteks Indonesia, proyek tersebut ditujukan untuk mencegah atau memperlambat bangkitnya Islam. Seperti diketahui, Indonesia adalah negeri Muslim terbesar. Indonesia memiliki peran penting di tingkat regional, yakni Asia Tenggara. Keberadaan Indonesia di Dunia Islam memiliki peran cukup strategis. Menjadi sangat berbahaya bila Indonesia melepaskan diri dari Barat dan kemudian tampil sebagai negara yang mengemban ideologi Islam. Dalam pandangan Barat, ini adalah sebuah malapetaka. Sebab, itu

berarti Barat akan terdepak dari negeri-negeri Islam yang kaya sumberdaya alam.

Karena itu berbagai cara dilakukan agar umat Islam tidak kembali pada agamanya secara benar. Mereka tahu penerapan syariah secara *kâffah* dalam negara Khilafah sangat membahayakan eksistensi Barat, tidak hanya di negeri-negeri Islam, tetapi di dunia secara umum.

Untuk itu, Barat berusaha menjauhkan umat Islam dari pemahaman agamanya yang hakiki. Dalam konteks inilah, proyek deradikalisasi digerakkan. Barat melakukan monsterisasi bahwa Islam adalah paham radikal yang membahayakan. Monsterisasi inilah yang kelak melahirkan islamophobia di Barat dan seluruh dunia.

Pada saat yang sama Barat mendukung mereka yang dikategorikan sebagai Islam moderat. Jangan heran bila muncul istilah Islam Nusantara, sebagai lawan Islam radikal. Ini adalah bagian dari desain deradikalisasi yang digerakkan dengan menggunakan orang Islam sendiri sebagai garda terdepannya.

Mereka yang tidak menerima Islam Nusantara [baca: Islam moderat] dianggap radikal, fundamentalis, dan islamis, bahkan teroris. Malah sekarang mereka yang menginginkan syariah dan Khilafah dianggap sebagai anti-Pancasila dan anti-NKRI. Para mubalig pun didaftar, siapa yang moderat dan siapa yang dianggap radikal.

Selain mencegah kebangkitan Islam, proyek deradikalisasi terkait dengan upaya memojokkan kelompok Islam. Di Indonesia, eksistensi kelompok Islam ini makin menguat. HT Indonesia dianggap salah satu penggerakannya. Ini terlihat dalam Aksi Bela Islam tahun 2017. Soliditas kelompok Islam terbukti mampu menjegal Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Meski Ahok didukung oleh rezim penguasa dan juga dana yang besar, ternyata ia tak bisa berhadapan dengan

Karena itu berbagai cara dilakukan agar umat Islam tidak kembali pada agamanya secara benar. Mereka tahu penerapan syariah secara *kâffah* dalam negara Khilafah sangat membahayakan eksistensi Barat, tidak hanya di negeri-negeri Islam, tetapi di dunia secara umum.

kekuatan Islam yang menentang dirinya. Di sinilah konteks program deradikalisasi ada benang merah, yakni untuk kepentingan rezim penguasa berkuasa kembali untuk masa jabatan kedua. Dalam pandangan rezim, kelompok radikal dianggap menghalangi rezim berkuasa kembali. Maka dari itu, siapa saja orang/lembaga yang dianggap bagian, membantu, atau berafiliasi kelompok radikal pasti disikat. Di sinilah bisa dipahami mengapa HT Indonesia dibubarkan oleh rezim Indonesia.

Walhasil, secara politik, proyek deradikalisasi ini digerakkan oleh kekuatan global yang dulu menghancurkan Islam dan institusinya, yakni Khilafah. Mereka tidak ridha bila syariah Islam tegak di muka bumi dan memimpin dunia. Karena itu dengan segala cara, termasuk yang paling kotor sekalipun, mereka akan menghancurkan benih-benih kebangkitan Islam. HT tahu tentang permainan itu dan selalu membongkar makar-makar mereka. [Humaidi]

TANPA PENGORBANAN, UMAT AKAN TERHINAKAN

«يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا». فَقَالَ قَائِلٌ
وَمِنْ قَلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ
وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ».
فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»

"Berbagai bangsa nyaris saling memanggil untuk melawan kalian sebagaimana orang-orang saling memanggil untuk menyantap hidangan mereka." Salah seorang bertanya, "Apakah karena kami ketika itu sedikit?" Rasul menjawab, "Bahkan kalian pada hari itu banyak. Akan tetapi, kalian laksana buih di lautan. Sungguh Allah mencabut ketakutan dan kegentaran terhadap kalian dari dada musuh-musuh kalian. Allah pun menanamkan di hati kalian al-wahn." Salah seorang bertanya, "Apakah al-wahn itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan benci kematian." (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis ini juga dikeluarkan oleh at-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya, Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya, Abu Nu'aim di *Al-Hilyah*, ar-Ruwiyani di dalam *Musnad*-nya, al-Baihaqi di dalam *Syua'ab al-Îmân* secara *mawqûf* dari Tsauban dan di dalam *Dalâ'il an-Nubuwwah* secara *marfû'*, Ibnu 'Asakir di dalam *Târîkh Dimasyq*, dan Ibnu Abi ad-Dunya di dalam *Al-'Uqûbât*.

Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadzi Abu ath-Thayib di dalam *'Awn al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâwud* menjelaskan, "*an tadâ'â 'alaykum*" bermakna: *mereka saling memanggil untuk memerangi kalian, menghancurkan kekuatan kalian dan merampas negeri dan harta yang kalian miliki.*

Sabda Rasul saw., *al-akalatu* adalah dalam bentuk jamak dari *âkil* (orang yang makan). Jadi

kata itu bermakna: *sekelompok orang yang makan bersama. Ilâ qash'atihâ*, menurut Mula Ali al-Qari, bermakna: *hidangan yang diambil tanpa penghalang dan pesaing sehingga mereka memakan hidangan itu dengan tenang dan satu barisan.* Mereka juga mengambil apa yang ada di tangan kalian tanpa menderita kelelahan atau *dharary* yang mereka derita atau masalah yang menghalangi mereka. Ia mengatakan di dalam *Al-Majma'*, hadis di atas bermakna: kelompok kekufuran dan umat-umat yang sesat akan saling memanggil untuk memerangi kalian; sebagian mereka memanggil sebagian yang lain guna berhimpun untuk memerangi kalian, menghancurkan kekuatan kalian dan menguasai negeri yang menjadi milik kalian. Hal itu seperti sekelompok orang yang saling memanggil satu sama lain untuk sama-sama menyantap hidangan yang mereka

peroleh tanpa penghalang sehingga mereka memakan hidangan itu dengan tenang tanpa kesusahan.

Rasul saw. menjelaskan bahwa petaka itu terjadi bukan karena sedikitnya jumlah kaum Muslim. Bahkan jumlah kaum Muslim banyak, namun laksana buih di lautan. Banyak, namun tidak berbobot. Lemah dan tidak terjalin dalam ikatan yang kuat sehingga mudah diceraiberaikan.

Hadis ini menjelaskan bahwa faktor jumlah banyak bukanlah kunci keberhasilan selama tercerai berai dan tidak bersatu. Hadis ini juga mengisyaratkan agar kaum Muslim menjauhi hal-hal yang menjadikan kondisi mereka laksana buih di lautan, di antaranya sebab-sebab perpecahan, tercerai-berai. Sebaliknya, kaum Muslim harus mengupayakan dan mengedepankan persatuan dan ikatan yang menyatukan mereka dan membuat mereka kuat. Di tengah-tengah mereka juga harus ada kesiapan kolektif untuk berkorban. Persatuan dan kesiapan kolektif untuk berkorban itu merupakan bagian dari faktor keberhasilan dan kemenangan.

Karena kaum Muslim digambarkan laksana buih, maka ketakutan dan kegentaran terhadap kaum Muslim pun tanggal dari dada musuh-musuh mereka. Keadaan kaum Muslim semacam ini menumbuhkan keberanian musuh-musuh mereka untuk menyerang mereka dan merampas harta benda dan kekayaan bahkan negeri mereka.

Adapun *al-wahn*, menurut pengarang *ʿAwn al-Maʿbūd*, bermakna: *adh-dhaʿf* (kelemahan). Menurutnyapun juga menurut ath-Thayibi, pertanyaan “*mā al-wahn*” maksudnya adalah pertanyaan tentang apa *al-wahn* itu atau apa yang menyebabkan *al-wahn* itu. Jadi yang ditanyakan oleh para sahabat adalah apa yang menyebabkan kaum Muslim seperti itu. Kemudian Rasul saw. menjelaskan bahwa sebabnya adalah cinta dunia dan benci

kematian.

Cinta dunia dan benci mati saling terkait. Siapa yang cinta dunia, dia akan enggan untuk berpisah dan melepaskan apa saja yang bersifat duniawi. Karena itu dia akan membenci kematian karena kematian artinya memisahkan dia dari apa yang ia cintai. Sebaliknya, siapa yang benci kematian, ia ingin bertahan selama mungkin di dunia, tidak ingin kehilangan apa yang dia miliki dan mengejar apa saja yang dia anggap menjauhkan dia dari kematian. Kebanyakan yang dikejar itu adalah harta dan tahta (kedudukan) karena dengan harta dan tahta itu dia menduga akan bisa “membeli” kehidupan. Cinta dunia dan benci mati itu akan membuat orang menjauhi apa saja yang dia anggap mendekatkan pada kematian atau kesulitan. Dengan keduanya itu, seseorang pun akan enggan berbuat demi Islam, berdakwah, amar makruf dan nahi mungkar, mengoreksi penguasa, bersedekah, berinfaq, berjihad dan berjuang demi kemuliaan Islam.

Musuh-musuh Islam sangat paham akan rahasia kelemahan kaum Muslim ini. Karena itu miliaran dolar mereka kerahkan untuk membuat kaum Muslim jadi sosok pecinta dunia, pemburu harta dan tahta, pencari kenikmatan jasmani; atau untuk menjauhkan kaum Muslim dari Islam dan perjuangan untuk Islam. Karena itu ide sekulerisme, hedonisme, kapitalisme, materialisme, mengutamakan manfaat dan sebagainya ditanamkan ke dalam benak dan disemai di hati kaum Muslim. Dilakukan pula stigmatisasi dan monsterisasi Islam dan para pejuangnya.

Untuk menyelamatkan umat Islam, maka penyakit cinta dunia dan benci mati itu harus ditanggalkan dan dieliminasi dari diri kaum Muslim. Para aktivis Islam, terutama para ulama, punya tanggung jawab besar dalam hal itu.

Wallâh aʿlam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]



HADIS SAHIH

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ

Khabar (hadis) yang diterima (*khavar maqbûl*) adalah *khavar* yang penuturnya lebih di-*râjih*-kan kejujurannya. *Khavar maqbûl* adalah wajib dijadikan *hujjah* dan diamalkan (Dr. Mahmud Thahan, *Taysir Mushthalah al-Hadîts*, hlm. 32).

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-ʿAshqalani dalam *Nukhbah al-Fikar fi Musthalahi Ahli al-ʿAtsar* menyatakan, dilihat dari sisi berbagai variasi tingkatannya, *khavar maqbûl* terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu *shahîh* dan *hasan*. Masing-masing terbagi menjadi dua yaitu: “li dzâtihi” dan “li ghayrihi”.

Dengan demikian secara keseluruhan *khavar maqbûl* itu terbagi menjadi: 1. *shahîh li dzâtihi*; 2. *hasan li dzâtihi*; 3. *shahîh li ghayrihi*; 4. *hasan li ghayrihi*.

Para ulama hadis dan para fukaha menegaskan bahwa hadis yang bisa diterima dan dijadikan *hujjah* adalah hadis sahih dan

hadis *hasan*. Para ulama dan para fukaha juga telah merinci kriteria hadis sahih dan hadis *hasan* tersebut.

Hadis Sahih

Shahîh menggunakan bentuk *faʿîl[un]* berasal dari kata: *shahha-yashihhu- shuhh[an]* wa *shihhat[an]* fahuwa *shahîh[un]*. *Shahha* artinya sehat, selamat dari cela dan cacat. Berita dikatakan *shahha* (sahih) artinya berita itu nyata, benar sesuai dengan kenyataan (Kamus al-Munawwir). Jadi secara bahasa, *shahîh* berarti yang sehat, yang selamat dari cela dan cacat, yang nyata, benar sesuai dengan kenyataan. Dari sini, hadis *shahîh* secara bahasa berarti hadis yang selamat dari cela dan cacat.

Adapun secara istilah, hadis sahih adalah hadis *musnad* yang *sanad*-nya bersambung dengan penukilan oleh perawi yang adil dan *dhâbith*, dari perawi yang adil dan *dhâbith*, dari awal hingga akhir *sanad*-nya; tidak mengandung ‘*illat* dan tidak *syâdz* (Imam Ibnu Shalah, *Muqaddimah*, I/9; al-ʿAllamah Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, III/87).

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, *khavar ahad* yang dinukilkan oleh perawi yang adil dan sempurna *dhâbith*, *sanad*-nya bersambung, tanpa mengandung ‘*illat* dan tidak *syadz*, adalah *shahîh li dzâtihi*.

Menurut Imam Ibnu Syarf an-Nawawi di dalam *At-Taqrîb wa at-Taysîr li Maʿrifati Sunan al-Basyîr an-Nadzîr fi Ushûl al-Hadîts*, hadis sahih adalah hadis yang *sanad*-nya disambung oleh orang-orang (para perawi) yang adil lagi *dhâbith* tanpa ada *syadz* dan tidak pula ‘*illat*.

Hadis yang demikian ini diputuskan sebagai hadis sahih tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Shalah. Imam



Ibnu Shalah menambahkan, para ahli hadis kadang berbeda pendapat tentang kesahihan sebagian hadis karena perbedaan pendapat mereka dalam hal adanya sifat-sifat tersebut di dalam hadis itu. Bisa juga karena perbedaan pendapat mereka tentang persyaratan sebagian sifat ini, seperti yang terjadi pada hadis *mursal*.

Menurut definisi dan batasan di atas, hadis sahih haruslah memenuhi kriteria: 1. *Sanad*-nya bersambung. 2. Perawinya adil dan *dhâbith* dari awal hingga akhir *sanad*. 3. Tidak *syadz*. 4. Tidak ada *'illat*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani menjelaskan empat kriteria itu: *Sanad*-nya bersambung (*muttashil*). Artinya, perawi menerima langsung dari perawi di atasnya, yakni gurunya, dan begitu seterusnya hingga akhir *sanad*. Semua perawi dalam rangkaian *sanad* itu harus memiliki sifat *'âdil* dan *dhâbith*. *'Âdil* adalah sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh takwa dan kehormatan diri serta menjauhi perbuatan buruk, seperti syirik, kefasikan dan bid'ah.

Dhâbith (akurasi) adalah kemampuan seorang perawi untuk menghafal hadis dari gurunya dan menyampaikan hadis itu dalam bentuk sebagaimana yang telah dia dengar dari gurunya. *Dhâbith* ini ada dua macam, yaitu: *Pertama*, *dhâbith bi shadri*, yaitu kemampuan seorang perawi untuk menghafal hadis dengan sempurna sehingga mungkin bagi dia untuk menyebutkan hadis itu pada saat menyampaikan atau meriwayatkannya dalam bentuk persis seperti yang ia dengar dari gurunya. *Kedua*, *dhâbith bi kitâb*, yaitu terpelihara bukunya dari kesalahan, yang menjadi tempat untuk mencatat hadis atau *khaby* yang telah dia dengar dari salah seorang atau beberapa gurunya; dengan dikoreksikan dengan kitab asli dari guru yang ia dengarkan hadisnya, atau diperbandingkan dengan kitab-kitab yang terpercaya kesahihannya. Ia

memelihara bukunya dari tangan-tangan orang yang hendak merusak hadis-hadis di dalam kitab-kitab lainnya.

Adapun *syadz* secara bahasa berarti yang tersendiri. Secara istilah maknanya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi kontradiksi dengan hadis dari perawi lain yang lebih kuat darinya.

Sementara itu, *'illat*, yang dimaksud adalah di dalam hadis tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis tersebut (Lihat: Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani, *Nuzhah an-Nazhar*, hlm. 99-103).

Sesuai empat kriteria itu, tidak termasuk sahih hadis yang terputus *sanad*-nya, semisal *munqathi'* dan *mu'dhal*. Tidak dinilai sahih hadis yang dinukilkan oleh perawi yang *majhûl* (tidak jelas) secara *zhâhir* maupun *bâthin*, *majhûl* orangnya atau yang diketahui kedhaifannya. Tidak dinilai sahih hadis yang dinukilkan oleh perawi yang tidak hapal, yakni hadis itu dinukilkan oleh perawi yang lupa dan banyak salah. Tidak dinilai sahih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang menyalahi riwayat para perawi lain yang lebih kuat, sebab ketika menyalahi berarti hadis tersebut *syadz*. Tidak dinilai sahih pula hadis yang di dalamnya ada sebab-sebab tersembunyi yang menyebabkan cela atau cacat, sebab ketika begitu berarti mengandung *'illat* (Al-'Allamah Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, III/87-88).

Terkait penilaian sahih, menurut Imam an-Nawawi dalam *At-Taqrîb*, jika dikatakan "*shahîh*" maknanya bukan bahwa itu dipastikan (sahih). Jika dikatakan *ghayru shahîh* (tidak sahih) maknanya tidak sahih *sanad*-nya, dan yang terpilih bahwa itu tidak dipastikan.

Imam Ibnu Shalah dalam *Muqaddimah* menyatakan, ketika mereka mengatakan, "Ini adalah hadis sahih," maknanya bahwa *sanad*-nya bersambung disertai sifat-sifat yang telah disebutkan. Bukanlah termasuk syaratnya



harus dipastikan sebab ada hadis sahih yang *infirad* (menyendiri) dengan riwayat seorang perawi adil saja, sementara itu bukan termasuk *khabar* yang disepakati penerimaannya oleh umat. Demikian pula jika mereka berkata, bahwa hadis itu *ghayru shahîh* (tidak sahih), maka hal itu tidak *qath'i* (pasti) bahwa dia (perawi) itu dusta pada masalah yang sama, sebab kadang dia termasuk orang yang jujur pada masalah yang sama; melainkan yang dimaksudkan bahwa tidak sahih *sanad*-nya berdasarkan syarat yang telah disebutkan.

Menurut Al-'Allamah Taqiyyuddin an-Nabhani dan Imam Ibnu Shalah, perkara dalam mengetahui hadis sahih berakhir pada apa yang dikeluarkan oleh para imam dalam karya mereka. Yang dimaksud di sini adalah para imam hadis yang masyhur. Sahih adalah apa yang terdapat pernyataan atas kesahihannya pada salah satu *Shahihayn* atau di dalam karya para imam hadis *mu'tamadah* yang masyhur.

Jadi ada kebutuhan mendesak untuk memperhatikan klasifikasinya mengenai hal itu. Klasifikasi sahih:

1. Sahih yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.
2. Sahih yang dikeluarkan oleh al-Bukhari saja tanpa Muslim.
3. Sahih yang dikeluarkan oleh Muslim tanpa al-Bukhari.
4. Sahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya.
5. Sahih menurut syarat al-Bukhari saja, tetapi beliau tidak mengeluarkannya.
6. Sahih menurut syarat Muslim, tetapi beliau tidak mengeluarkannya.
7. Sahih menurut selain keduanya dan tidak menurut syarat al-Bukhari maupun Muslim.

Inilah induk klasifikasi sahih. Yang paling tinggi adalah yang pertama. Para ahli hadis

banyak menyebut hadis ini sahih *muttafaq 'alayh*, maksudnya disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim; bukan *ittifâq al-ummah* (disepakati oleh umat) (Ibnu Shalah, *Muqaddimah*, hlm. 17; Al-'allamah Taqiyyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, III/88).

Menurut Imam an-Nawawi, hadis sahih itu bisa ditemukan di dalam *Ash-Shahihayn* (*Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*). Kemudian, tambahan dalam *Ash-Shahîh* diketahui dari kitab Sunan yang *mu'tamadah* seperti *Sunan Abû Dâwud*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan an-Nasa'î*, Ibnu Khuzaimah, ad-Daraquthni, al-Hakim al-Baihaqi dan yang lain, yang dinyatakan (*manshûsh*) atas kesahihannya, dan tidak cukup adanya di kitab-kitab kecuali dalam kitab orang yang mensyarakatkan pembatasan pada yang sahih saja.

Al-Hakim memperhatikan tambahan terhadap keduanya (*Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*). Namun, Al-Hakim *mutasâhîl* (longgar) dalam mensahihkan hadis. Karena itu apa yang ia sahihkan, sementara tidak kita temukan dari imam *mu'tamad* lainnya pernyataan sahih atau penilaian *dha'îf*-nya, maka kami memutuskan bahwa itu hadis *hasan*, kecuali tampak di dalamnya *'illat* yang mengharuskan *dha'îf*-nya, dan mendekatinya dalam penilaiannya adalah *Shahîh Ibni Hibban* (Imam an-Nawawi, *At-Taqrîb*).

Semua itu berkaitan dengan hadits *shahîh li dzâtihi*.

Adapun *hadits shahîh li ghayrihi*, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani menjelaskan di dalam *Nukhbatu al-Fikâr*, bahwa hadis tersebut adalah hadis *hasan li dzâtihi* jika diriwayatkan dari jalan lain yang setingkat atau lebih kuat darinya. Dinamakan hadis *shahîh li ghayrihi* karena kesahihannya tidak datang dari *sanad*-nya itu sendiri, tetapi karena bergabungnya dengan *sanad* yang lain.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

Common attack
1970-2013

Armed Assault

Assassination

Bombing

Facility Destruction

Hijack

Hostage Taking, Kidnapping

Unarmed Assault

KONSPIRASI GLOBAL DALAM PERANG MELAWAN TERORISME

Perang melawan terorisme” bukan merupakan jargon baru yang didengungkan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Kampanye ini bukanlah juga sebuah proyek yang bebas nilai atau steril dari kepentingan. Terorisme telah menjadi sebuah isu yang didesain sedemikian rupa—untuk dimanfaatkan—oleh AS untuk lebih mencengkeramkan hegemoninya di seluruh dunia tanpa terkecuali.

Istilah *terorisme* masih dimaknai dengan standar ganda, sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Misalnya, Amerika menganggap pembunuhan Indira Gandhi sebagai aksi terorisme, sementara pembunuhan Raja Faisal dan Presiden Kennedy tidak disebut terorisme. Pada tahun 1997, awalnya AS mencap pengeboman Gedung Kantor Penyelidikan Federal (FBI) di Oklahoma sebagai aksi terorisme. Namun, setelah diketahui bahwa pelakunya adalah orang Amerika sendiri, yakni Timothy Mc Veigh, pengeboman tersebut dikategorikan sebagai aksi kriminal biasa. Ketika pejuang Hamas melakukan bom syahid melawan kebrutalan tentara Israel, AS menamainya sebagai aksi terorisme. Sebaliknya, tindakan brutal yang dilakukan para serdadu Israel yang telah membantai dan memporakporandakan kalangan sipil disebut sebagai pembelaan diri untuk merespon (serangan) musuh. Peruntuhan Gedung WTC—yang hingga detik ini belum

terbukti siapa pelakunya—disebut sebagai terorisme. Sebaliknya, tindakan brutal AS dan sekutunya yang menghancurkan burukkan Afghanistan beserta 7.5 juta penduduknya yang telah menewaskan ribuan rakyat sipil yang tak berdosa dinamakan sebagai penegakkan keadilan tanpa akhir (*enduring justice*). Itulah arti terorisme yang mereka definisikan.

Sejarah menunjukkan bahwa Amerika memanfaatkan peristiwa peledakan Kantor Penyelidikan Federal (FBI) di Oklahoma pada tahun 1997 (yang belakangan diketahui bahwa pelakunya adalah orang Amerika sendiri) dengan mengeluarkan Undang-undang Perlawanan terhadap Terorisme yang disetujui Senat AS. Namun, pelaksanaannya tidak mendapat banyak respon dari negara-negara di dunia. Berikutnya, melalui momentum peledakan Gedung WTC tanggal 11 September 2001, AS pun segera menyeru seluruh negara di dunia untuk membentuk undang-undang melawan terorisme di masing-masing negara. Berbeda dengan tahun 1997, hampir seluruh dunia kini berada di belakang AS. Lagi-lagi, pada tahun 1997 yang dituduh adalah orang Islam, ternyata bukan. Kini, yang dituduh juga orang Islam, dan tanpa bukti negeri Muslim Afghanistan dihancurkan. Padahal sampai saat ini AS tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pelakunya adalah orang Islam, khususnya ribuan penduduk sipil yang diujani ratusan bom-bom mereka.

Bahkan Dubes AS untuk Indonesia saat itu (Gelbard) menyatakan bila tidak terbukti bahwa yang bersalah itu adalah kaum Muslim kelompok al-Qaida, AS siap meminta maaf. Kenyataannya, ribuan orang sipil Muslim Afganistan tewas, sejumlah pejuang yang ditangkap tidak diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Tanah Afganistan diduduki. AS menempatkan Hamid Karzai untuk menguasai pemerintahan.

AS melanjutkan aksinya di Irak dan kini di Suriah. Kedua negeri Muslim tersebut kini luluh-lantak akibat aksi sepihak AS dengan alasan perang melawan terorisme. Keberadaan ISIS yang menjadi biang kehancuran di Irak dan Suriah menjadi tanda tanya. Apakah betul mereka adalah umat Islam yang ingin menegakkan Islam? Ataukah mereka adalah 'konspirasi' yang mencitraburukkan Islam yang justru membuat umat 'ketakutan' dengan upaya penegakkan syariah Islam.

Bila dikaitkan dengan strategi dasar Amerika, jelas bahwa sebenarnya isu terorisme hanyalah alat politiknya untuk melanggengkan dirinya sebagai negara adikuasa. Di dalam "Rencana Strategis AS dalam Hubungan Internasional" yang dikeluarkan Februari 1999 disebutkan bahwa tujuan kepemimpinan internasional AS adalah menciptakan kemakmuran yang lebih aman dan dunia yang demokratis demi keuntungan bangsa Amerika. (Lihat *United States Strategic Plan For International Affairs*. Dirilis oleh Office of Resources, Plans, and Policy, U. S. Departement of State, Washington, DC, February 1999).

Arah semua ini adalah mengembangkan ideologi Kapitalisme yang dianut AS, di samping mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu implementasi strategi untuk mencapai keadaan yang lebih aman dan stabil tadi adalah isu terorisme.

Sasaran sentralnya adalah Islam. Sebabnya, menurut mereka, Islam merupakan kunci dari kebijakan luar negeri AS pasca keruntuhan

sosialisme-komunisme. Karena itu tidak mengherankan jika daftar nama kelompok yang dikategorikan AS sebagai teroris mayoritasnya adalah kelompok Islam. Karena itu pula negeri-negeri Islam menjadi wilayah terpenting yang menjadi sasaran Amerika dalam penerapan undang-undang anti terorisme. Salah satu wujudnya berupa tekanan untuk membela AS atas nama 'memberantas terorisme'. Salah satu contohnya, sesaat setelah peledakan gedung kembar WTC, 11 September 2001, Pemerintah AS memberikan pilihan kepada seluruh dunia apakah berada di belakang AS ataukah berada di belakang teroris. Hal itu pun menjadi tekanan kepada Dunia Islam untuk membuat undang-undang antiterorisme yang persis seperti yang dibuat AS. Tujuannya adalah untuk mengokohkan cengkeraman Amerika di negeri-negeri Islam serta melestarikannya agar tetap berada di bawah hegemoni AS.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa isu terorisme merupakan produk AS sebagai salah satu alat politiknya untuk mencengkeramkan kuku penjajahannya di dunia, khususnya di negeri-negeri Muslim.

Terorisme di Indonesia

Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia tentu menjadi negeri yang penting dalam upaya mendukung AS dalam perang melawan terorisme.

Awalnya, ketika Presiden AS George W. Bush membagi dunia menjadi dua: poros kebaikan dan poros setan, Indonesia masih enggan masuk barisan AS dalam menggempur teroris versi AS. Ketika AS menyerang Afganistan, Indonesia termasuk yang gencar mengkritik. Bahkan soal Jamaah Islamiyah (JI) dan seterusnya, Indonesia masih belum bertindak. Padahal majalah *Time* sudah berkali-kali membuat laporan tentang aktivitas JI di Indonesia, dan mengangkat soal Abubakar Baasyir. Namun, Indonesia belum mengambil tindakan apa-apa.

Titik balik semua itu adalah kasus Bom Bali, 12 Oktober 2002. Apalagi setelah tertangkapnya Imam Samudera dan kawan-kawan yang mengaku sebagai JI. Mereka mengakui keterlibatan mereka dalam kasus bom Bali. Belum reda kasus Bom Bali, pengadilannya masih berlangsung, meletus lagi kasus Marriott.

Dari sini bisa dipahami bahwa Bom Bali dan Bom Marriott adalah bagian dari konspirasi kepentingan politik global. Oleh karena itu analisis terkait dengan kedua kejadian tersebut perlu dibuat secara lebih luas, bahwa kasus ini sudah dirancang dengan sangat canggih, termasuk dampak sosial politiknya. Kita perlu paham, bahwa yang paling ditakuti pihak AS, Israel dan sebagainya, pasca Perang Dingin, adalah kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai “Islam militan”, “Islam fundamentalis”, “Islam radikal”, dan sebagainya. Dalam skenario berdasarkan teori konspirasi ini, maka JI adalah pintu masuk untuk menggulung kelompok-kelompok yang sudah dicap militan itu. Karena itulah, begitu terjadi kasus Bom Marriott, Menlu Australia saat itu Alexander Downer, tidak lupa menyisipkan sebutan “militan” dalam ucapannya.

Berbagai aksi terorisme belakangan ini, mulai dari Bom Thamrin, kerusuhan di Mako Brimob, Peledakan di Gereja dan markas kepolisian di Surabaya, merupakan runtutan aksi terorisme yang terus berkelindan satu sama lain. Sulit untuk mengetahui secara pasti apa motif utama dari para pelaku aksi teror tersebut. Yang pasti, stigmatisasi melalui media terjadi. Para pelaku diidentikan dengan ‘simbol’ keislaman, semacam cadar, keluarga aktivis, penggemar ajaran Islam dan sejenisnya.

Di sisi lain, keberadaan UU Anti Terorisme yang awalnya tersendat pembahasannya, kini dengan mulus disetujui oleh Parlemen. Ada perluasan cakupan kewenangan untuk melakukan antisipasi tindakan terorisme. Gelontoran dana untuk penanganan terorisme

terus mengalir dan tiap tahun terus meningkat. Polri meminta penambahan anggaran untuk penanganan tindak pidana terorisme sebesar Rp 1,925 triliun dalam APBN Perubahan 2016. Pada 2018, Wiranto mengatakan, anggaran 2018 meningkat sebanyak Rp 60 miliar dari APBN 2017. Tambahan anggaran akan dimanfaatkan untuk koordinasi pemberantasan penyelundupan Rp 5,5 miliar, koordinasi relokasi lembaga pemasyarakatan Rp 6 miliar, koordinasi kerukunan nasional Rp 7 miliar dan koordinasi pembentukan pusat penanganan krisis nasional Rp 6,5 miliar. Selain itu, koordinasi pemerataan kekuatan TNI Rp 6 miliar, koordinasi revisi RUU Terorisme Rp 6,5 miliar, koordinasi gerakan Indonesia tertib dalam mendukung gerakan nasional revolusi mental Rp 6 miliar dan satgas propaganda, agitasi serta provokasi Rp 6 miliar. Kemudian koordinasi revitalisasi dewan ketahanan nasional untuk melaksanakan tugas pembinaan bela negara Rp 7,5 miliar dan koordinasi penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi Pancasila Rp 6 miliar.

Secara keseluruhan, pagu indikatif Rp 283,6 miliar ini akan dimanfaatkan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 139,9 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 6 miliar dan program peningkatan koordinasi polhukam Rp 137,7 miliar. Bukan dana yang sedikit tentunya.

Dengan demikian, wajarlah muncul anggapan bahwa perang melawan terorisme ini tidak lebih dari konspirasi global yang membawa kepentingan asing untuk mendeskreditkan Islam dan umat Islam, terutama upaya dalam menegakkan syariat Islam. konspirasi ini berkelindan dengan miliaran rupiah proyek yang dialirkan sehingga kepentingan asing dan berjalannya proyek rupiah bertemu dalam kepentingan yang sama.

Wallâhu a'lam. [H. Budi Mulyana, S.I.P., M.Si.]

SIKAP TEGAS KHALIFAH KEPADA KELUARGANYA

Mungkin sudah menjadi hal yang jamak. Pejabat memperkaya keluarga dan kerabatnya. Bisa juga keluarga dan kerabatnya memanfaatkan kesempatan jabatan orangtuanya. Kita bisa melihat fenomena kasus korupsi yang membelit hampir sebagian besar pejabat negara di negeri ini. Setelah ditelesik, ternyata uang hasil korupsi mengalir juga ke istri, anak dan saudaranya. Demikian juga fenomena keluarga pejabat yang tiba-tiba punya akses mudah dalam fasilitas dan peluang bisnis. Tiba-tiba dengan mudah punya perusahaan ini dan itu. Buka pabrik di sana dan di sini. Dengan mudah mendapatkan proyek di sana dan di sini. Tentu dengan nila yang menggiurkan. Seolah-olah, para pegawai negara memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi anak dan kerabat pejabat dalam segala hal. Tinggal sebut saja, anak atau kerabat si fulan, maka urusan akan lancar dan beres.

Fenomena ini adalah fakta yang kasatmata terjadi menggerogoti negeri ini. Susah memang membuktikan secara hukum. Namun, praktik seperti di atas adalah hal yang lumrah terjadi. Fenomena ini adalah fenomena yang lumrah dalam alam demokrasi. Pasalnya, setiap pejabat yang akan menjabat harus mengeluarkan *cost politic*. Nilainya tidaklah

sedikit. *Cost* ini harus dicarikan jalan keluar menutupi dan tentunya mencari selisih buat keuntungan. Dari mana? Tentu dari catut sana catut sini, ambil proyek sana ambil proyek sini.

Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan ajaran syariah Islam dalam sistem Khilafah. Syariah Islam mengharamkan setiap keluarga dan kerabat pejabat untuk mengambil kesempatan memperkaya diri dan keluarga ketika keluarganya sedang menjabat. Selain hukuman berat telah menanti, sang pejabat diwajibkan oleh syariah memberikan contoh terbaik bagi rakyatnya, bahwa keluarganya memang tidak melakukan itu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Dalam buku *The Great Leader of Umar bin Al Khattab* karya Dr. Muhammad ash-Shalabi, Sang Khalifah pernah berkata, “*Rakyat akan menunaikan kepada pemimpin apa-apa yang pemimpin tunaikan kepada Allah. Jika pemimpin bermewah-mewahan maka rakyat akan bermewah-mewahan.*”¹

Khalifah Umar adalah seorang pemimpin yang sangat ketat melakukan introspeksi terhadap diri dan anggota keluarganya. Ia sadar bahwa pandangan rakyat akan tertuju kepada dirinya. Tidak akan ada gunanya bila ia bertindak keras terhadap rakyatnya, sementara anggota keluarganya bermewah-mewahan

yang mengakibatkan mereka akan hisab di akhirat kelak dan lidah rakyat tidak mengasihi mereka di dunia.

Bila Khalifah Umar melarang rakyat untuk melakukan sesuatu, maka ia menemui keluarganya dan menyampaikan kepada mereka:

*Aku telah melarang rakyat untuk melakukan ini dan itu. Rakyat akan melihat tindak-tanduk kalian sebagaimana seekor burung melihat sepotong daging. Bila kalian melanggar maka mereka akan melanggar. Bila kalian takut melakukannya, mereka juga akan takut melakukannya. Demi Allah, bila salah seorang di antara kalian diserahkan kepada saya karena ia melanggar apa yang sudah saya larang maka saya akan melipatgandakan hukuman kepada dia karena dia kerabat saya. Siapa di antara kalian yang ingin melanggar, silakan! Siapa yang ingin mematuhi, juga silakan!*²

Sikap tegas Khalifah Umar tidak hanya sekadar manis di mulut atau demi pencitraan. Sikap tegas Khalifah Umar benar-benar diwujudkan. Ini bukan hanya semata meneguhkan sikap konsistensi sebagai seorang pemimpin dalam memegang keputusannya. Namun, yang lebih utama, ini adalah bentuk pelaksanaan syariah Islam yang memang mewajibkan seorang pemimpin seperti itu. Pemimpin harus tegas melarang keluarga dan kerabatnya memanfaatkan fasilitas negara.

Sikap tegas ini diwujudkan ketika Khalifah Umar melarang anggota keluarganya memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang dikhususkan oleh negara bagi rakyatnya. Khalifah Umar khawatir bila anggota keluarganya mengkhususkan fasilitas tersebut untuk mereka.

Abdullah bin Umar (putra Khalifah Umar) bercerita, “*Aku pernah membeli beberapa ekor unta dan mengirimnya ke tempat*

penggembalaan. Setelah unta-unta itu besar dan gemuk, aku mengambilnya.”

Abdullah selanjutnya bercerita:

Tatkala Khalifah Umar pergi ke pasar, ia melihat beberapa ekor unta yang berbadan gemuk. “*Siapa pemilik unta-unta ini?*” tanya Umar.

Dikatakan kepada Umar, “Unta-unta ini adalah milik Abdullah bin Umar.”

Kemudian Umar berkata kepada saya, “*Abdullah bin Umar, kamu hebat! Hebat... Kamu adalah putra Amirul Mukminin! Ada apa dengan unta-unta ini?*”

Saya jawab, “Dulu, unta-unta ini saya beli dan saya kirim ke tempat penggembalaan sebagaimana dilakukan kaum Muslim.”

Umar berkata, “*Mereka pasti berkata, ‘Gembalakanlah unta-unta milik putra Amirul Mukminin! Berilah minum unta-unta milik Putra Amirul Mukminin!’ Hai Abdullah, ambillah modalmu dan masukkanlah sisa (keuntungan)-nya ke Baitul Mal kaum Muslim!*”³

Dalam kisah lain, diriwayatkan dari Aslam, ia bercerita:

Abdullah bin Umar bin Ubaidillah bin Umar ikut pergi bersama rombongan pasukan kaum Muslim ke Irak. Tatkala mereka berdua hendak pulang, mereka bertemu dengan Abu Musa al-Asy’ari. Saat itu Abu Musa menjabat sebagai walikota Bashrah. Abu Musa menyambut mereka berdua dengan baik. Kepada mereka berdua, Abu Musa berkata, “*Andai aku bisa melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat untuk kalian berdua, niscaya akan kulakukan. Oh ya, ini ada uang milik publik yang hendak kuserahkan kepada Amirul Mukminin. Aku akan pinjamkan uang ini kepada kalian*

berdua, lalu kalian belikan barang berharga di sini, kemudian kalian jual di Madinah. Setelah itu, kalian serahkan modalnya kepada Amirul Mukminin dan labanya untuk kalian berdua.”

Mereka berdua melakukan apa yang disarankan Abu Musa. Abu Musa menulis sepucuk surat kepada Khalifah Umar. Isinya memberitahukan agar Umar mengambil uang dari mereka berdua. Tatkala mereka berdua bertemu dengan Khalifah Umar, beliau bertanya, “*Apakah Abu Musa meminjamkan uang kepada anggota pasukan yang lain sebagaimana dia meminjamkan uang kepada kalian berdua?*”

Mereka berdua menjawab, “Tidak.”

“*Kalau begitu, hendaklah kalian berdua serahkan uang itu dan labanya ke Baitul Mal!*” kata Khalifah Umar.

Abdullah diam, sementara Ubaidillah berkomentar, “Anda tidak patut melakukan hal ini, wahai Amirul Mukminin. Sekiranya uang ini hilang atau berkurang, kami akan mengganti dan menjaminnya.”

“*Hendaklah kalian berdua serahkan uang itu dan labanya ke Baitul Mal!*” kata Khalifah Umar sekali lagi.

Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap memprotes keputusan Umar. Salah seorang sahabat yang berada di majelis menyarankan, “*Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya bila Anda jadikan hal itu sebagai qirâdh (pemberian modal untuk berdagang dan memperoleh bagian laba).*”⁴

Setelah itu, Khalifah Umar mengambil modal dan separuh dari labanya. Abdullah dan Ubaidillah mendapat separuh dari labanya. Dikatakan, “Hal ini merupakan praktek *qirâdh* pertama dalam Islam.”

Beginilah sosok Khalifah. Tegas dalam pelaksanaan syariah Islam. Ia melarang keras

Beginilah sosok Khalifah. Tegas dalam pelaksanaan syariah Islam. Ia melarang keras keluarga dan kerabatnya untuk memanfaatkan fasilitas negara dan umum untuk kepentingan pribadinya. Sebuah teladan yang jauh panggang dari api dengan situasi sekarang.

keluarga dan kerabatnya untuk memanfaatkan fasilitas negara dan umum untuk kepentingan pribadinya. Sebuah teladan yang jauh panggang dari api dengan situasi sekarang.

Pejabat dalam alam demokrasi-kapitalis justru sebaliknya. Sebuah kesempatan dan peluang ketika keluarga dan kerabatnya jadi pejabat. Dipakai untuk memperkaya diri dengan mengambil dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada.

Alhasil, hanya dengan pelaksanaan syariah Islam sajalah, keluarga dan kerabat tidak akan pernah berani memanfaatkan fasilitas negara.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Abu Umam]

Catatan kaki:

¹ Dr. Muhammad Qal'aji, *Mawsu'ah Fikih Umar bin Al Khattab*, halaman 146.

² Mahdh Ash-Shawab, 3/893.

³ Ibnu Al jauzi, *Manaqib Umar*, halaman 157-158.

⁴ An-Najjar, *Al Khulafaur Ar-Rasyidun*, halaman 244.

AGENDA UMAT



Sumedang. Ijtima ulama Kabupaten Sumedang kembali diadakan dengan tema "Khilafah Ajaran Islam, Bukan Ajaran Teroris". Acara bertempat di Pondok Pesantren Asmaul Husna Sumedang, Jawa Barat pada hari kamis [7/6]. Dalam ijtima ulama kali ini beberapa tokoh, ulama dan asatidz Kabupaten Sumedang menolak mengaitkan terorisme dengan paham khilafah.



Bekasi. Ramadhan betul-betul dimaknai sebagai bulan perjuangan oleh ulama Bekasi. Ijtima' Ulama yang disambung dengan buka puasa bersama terlaksana pada Ahad [25/5]. Tampak hadir KH Mahmudin al-Hafidz (Ketua MUI Kabupaten Bekasi dan Pengasuh PP Tamrinus Syibyan, Cikarang, Kabupaten Bekasi), KH Miqdad Ali Azka (Pengasuh Pondok Pesantren Nida' Assunnah, Pondok Melati), dan sejumlah ulama lain.



Madura. Indonesia penuh problem. Karena itu Sabtu [26/5] Ijtima' Ulama dan Masyarakat Madura memberikan jawabannya. Acara dilaksanakan di Masjid Sabibal Muhtadin Desa Batu Ampar Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep Jatim. Hadir tidak kurang dari 50 ulama, kiai, ustadz dan tokoh masyarakat. Di antaranya KH Ahmad Danniji, KH Muh. Sahor dari Lenteng, Kiai Muh. Rosyidi Harits dan beberapa pengasuh majelis taklim.

Surabaya. Ahad [3/6] Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Surabaya Timur berkumpul di kediaman KH Abdul kholiq, selaku ketua FUIB (Forum Umat Islam bersatu) Kota Surabaya. Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Surabaya Timur menolak mengaitkan perilaku terorisme dengan Islam. Apalagi mengaitkan dengan khilafah.



Sleman. Ijtima' Ulama Aswaja bertajuk "Menyatukan Pendapat tentang Kriminalisasi Khilafah" diadakan di Kediaman Ustadz Amir Hamzah, Mubaligh Sleman pada Ahad [3/6]. Selain Ustadz Amir Hamzah, Narasumber lain dalam acara tersebut adalah Ustadz Muhammad Yusuf Elfuruqi, Pengasuh Majelis Raudhatil Muhibbin.



Bekasi. Pernyataan sikap Forum Majelis Mudzakarrah Ulama dan Asaatidz Kota Bekasi merespon kejadian pengeboman tempat ibadah dan tempat lainnya di Jawa Timur dalam Ijtima' Ulama di Majelis Taklim Bait Al Khoir pada hari jumat [25/5]. Para ulama sepakat Khilafah Ajaran Islam, Bukan Ajaran Teroris.



Sleman. Multaqo Ulama Sleman bertema "Ramadhan Syahrul Quran: Menjadikan Al-Quran Imam dalam Kehidupan Kita", bertempat di Pondok Pesantren Ar-Rahman Sleman, DIY pada hari ahad [3/6]. "Terorisme Bukan ajaran Islam, maka mengaitkan Terorisme dengan Islam apalagi sebagai ajaran Islam merupakan framing jahat", ujar Kyai Abah Narko A Fikri (Abah Narko), Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qawwiy



Tangerang. Ahad [27/5] Ulama Aswaja berkumpul dan memberikan pendapatnya. Mereka juga memberikan dukungan pada perjuangan HTI dan menepis fitnah penyudutan Islam. Al Mukarom KH Arsyad sebagai Shahibul Bait menyatakan bahwa umat Islam itu jauh dari terorisme.



Cianjur. "(Pengesahan) UU Antiterorisme sangat terkait dengan kepentingan global," ujar Ust. Eri Ridwan memulai acara Ijtima Ulama Cianjur yang digelar di Pondok Pesantren an-Najmu Tsaaqib di Kp. Gelar Kec. Cibeber Cianjur pada Ahad [3/6] sore. Sekitar 70 kiai dan asatidz menghadiri acara yang bertemakan "Terorisme Bukan Ajaran Islam" tersebut.



Rancah. Para ulama berkumpul pada agenda Ijtima Ulama untuk membahas Khilafah pada hari Ahad [1/6] di Pondok Pesantren Babussalam, Rancah, Ciamis. Pada kesempatan tersebut, Ustadz Husen Al-Banjari mengungkapkan bahwa ada upaya mencitraburukkan ide khilafah oleh orang-orang sekular dan kafir.



Ciamis. Ijtima' Ulama Ciamis ypada Kamis [31/5], di Ponpes Darul Ulum Petir Ciamis, dihadiri sejumlah ulama, kiai dan asatid. Mereka menolak framing jahat yang mengaitkan terorisme dengan Islam. Mereka pun menolak stigmatisasi jahat terhadap khilafah sebagai ajaran Aswaja.



Bogor. Ahad [25/5] Ulama Aswaja Bogor berkumpul menyikapi fitnah terorisme yang diujukan pada Islam. Shohibul Fadhillah KH Amin dari Ponpes Al-Amin, menyampaikan bahwa terorisme bukan Islam. Islam tidak mengajarkan terorisme.